



Citra **Kabupaten Belitung** *dalam Arsip*



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2022

Citra
Kabupaten Belitung
dalam Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia



Citra
Kabupaten Belitung
dalam Arsip

Pengarah

Drs.Imam Gunarto, M.Hum
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. Kandar, MAP
Deputi Bidang Konservasi Arsip

Penanggung Jawab Program

Dra.Multi Siswati, MM
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Teknis

Mira Puspita Rini, S.Sos, M.Hum
Koordinator Kelompok Substansi
Pemanfaatan dan Penerbitan Naskah Sumber

Narasumber

Natasia, S.S
Wahyu Kurniawan, S.IP

Penulis

Nur Mas Intan Berliana Marpaung, S.AP, M.AP

Penelusur Arsip

Dian Eka Fitriani, S.S
Anggi Suryaningtia, A.Md

Desain & Layout

Beny Oktavianto, S.Kom

Penerbit

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

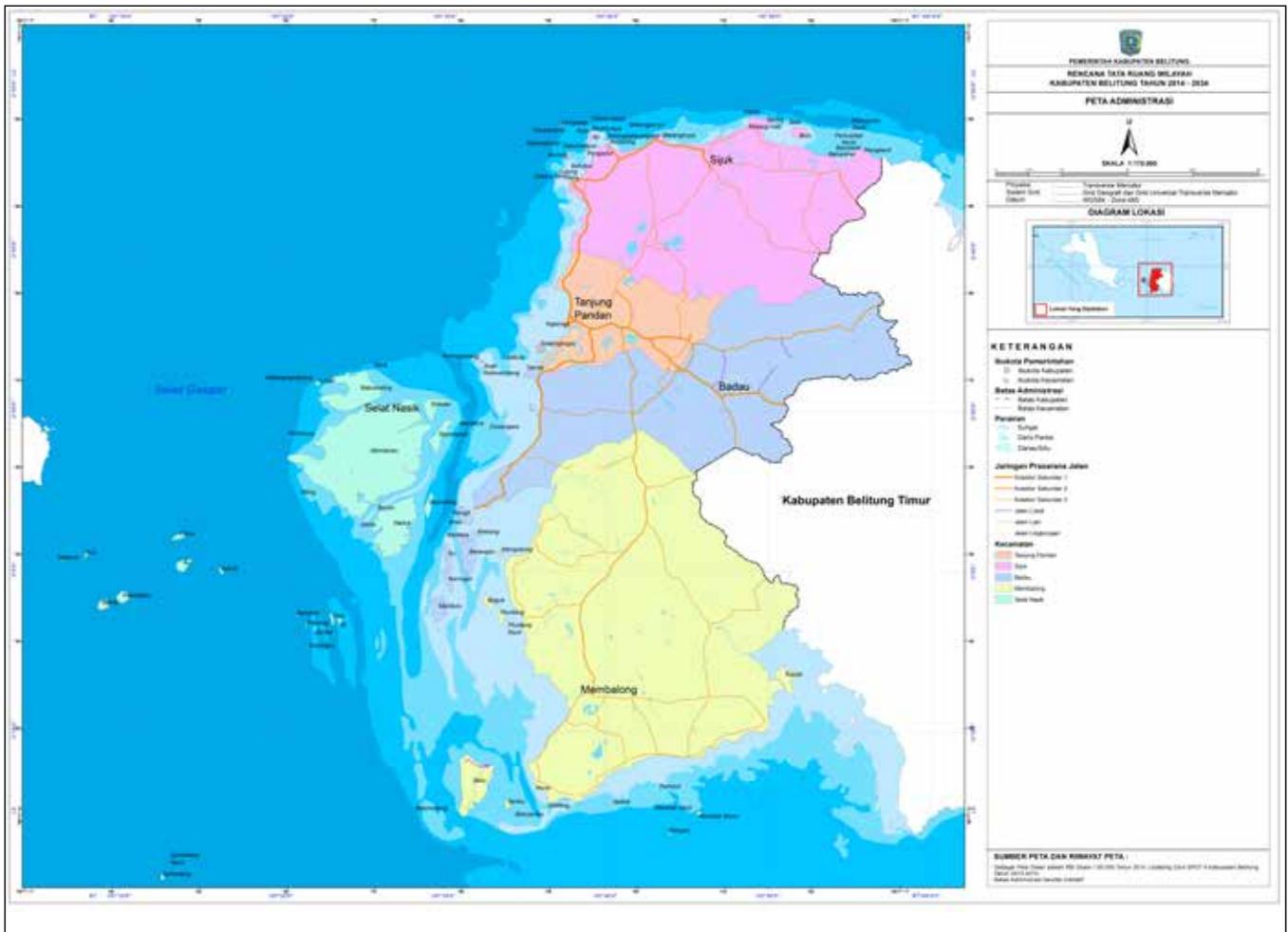
ISBN 978-602-6503-28-2



Hak Cipta © 2022

Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.





PETA WILAYAH KABUPATEN BELITUNG
 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



LAMBANG PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG



H. SAHANI SALEH, S.SOS.
Bupati Belitung
Periode 2018 - 2023



ISYAK MEIROBIE, S.SN., M.SI
Wakil Bupati Belitung
Periode 2018 - 2023



MZ. HENDRA CAYA
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
Periode 2018 - 2023



ANSORI

Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Periode 2018 - 2023

BUPATI BELITUNG DARI MASA KE MASA



H. Zainal Abidin Pagaralam
Bupati Belitung
Periode 1955 - 1958



Wahab Aziz
Bupati Belitung
Periode 1961 - 1967



H.A.S. Hanandjoeddin
Bupati Belitung
Periode 1967 - 1972



Koesniohadi
Bupati Belitung
Periode 1972 - 1977



Mas Sopian
Bupati Belitung
Periode 1978 - 1980



Cholil Aziz
Bupati Belitung
Periode 1980 - 1981



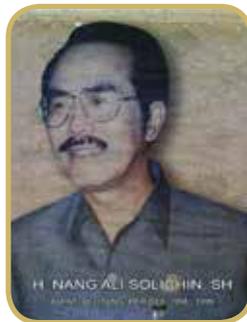
Soemarsono
Bupati Belitung
Periode 1981 - 1985



H.A.S. Kristyanto
Bupati Belitung
Periode 1986 - 1991



H. Urip TP. Alam
Bupati Belitung
Periode 1991 - 1998



H. Nang Ali Solichin, SH
Bupati Belitung
Periode 1998 - 1999



H. Ishak Zainuddin, B.Sc
Bupati Belitung
Periode 1999 - 2004



Ir. H. Darmansyah Husein
Bupati Belitung
Periode 2004 - 2008



**Haryono Moelyo
Pj. Bupati Belitung**
Periode 2008



Ir. H. Darmansyah Husein
Bupati Belitung
Periode 2009 - 2013



H. Sahani Saleh, S.Sos.
Bupati Belitung
Periode 2013 - 2018



H. Sahani Saleh, S.Sos.
Bupati Belitung
Periode 2018 - 2023



SAMBUTAN





SAMBUTAN BUPATI BELITUNG

BISSMILLAHI ROHMANIR ROHIM

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berbagai kebijakan pembangunan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung hingga berada pada posisi yang dikenal secara Nasional maupun Internasional, salah satunya sebagai Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional di Indonesia. Tentunya pada titik ini, dukungan dan partisipasi dari elemen masyarakat juga turut menjadi andil terhadap pencapaian posisi tersebut, sebagai bentuk dari penghargaan terhadap kinerja bersama yang dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Belitung berharap agar setiap rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media daerah, dapat terangkum dalam media komunikasi yang tidak akan tergerus waktu dan terangkum baik pada buku arsip, yakni Buku Citra Daerah.

Penyusunan Buku Citra Daerah Kabupaten Belitung penting untuk dilaksanakan sebab banyak sejarah penting yang harus disampaikan dan diketahui oleh khalayak agar semangat untuk membangun daerah terus meningkat, serta menjadi upaya untuk menghormati setiap jasa-jasa para pemimpin maupun masyarakat yang telah memberikan sumbangsih penuh demi kemajuan Kabupaten Belitung. Tentunya, sejarah berperan besar dalam membentuk jati diri bangsa dan arsip memiliki peran penting, ketika kehadiran arsip itu memantik ingatan kolektif yang dapat digunakan untuk membentuk identitas bersama. Dengan membaca sejarah yang ada pada Buku Citra Daerah, masyarakat sadar akan perjalanan sejarahnya dan merasa diikat oleh suatu pengalaman bersama.

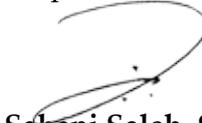
Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, serta pihak yang terkait atas disusunnya Buku Citra Daerah Kabupaten Belitung. Kiranya dengan sinergitas bersama, seluruh koleksi kearsipan terkait Kabupaten Belitung dapat terangkum dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga pada akhirnya Buku Citra Daerah menjadi media yang dapat mengkomunikasikan kepada pembaca khususnya generasi muda, bagaimana upaya bersama dalam membentuk citra positif daerah hingga berada pada kemajuan pembangunan dalam upaya mewujudkan ekonomi yang berkeadilan berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung.

Demikian yang dapat saya sampaikan, selamat membaca Buku Citra Daerah Kabupaten Belitung. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik dan memiliki nilai guna bagi kebijakan pembangunan dimasa mendatang, serta teruslah berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi sejarah pada setiap kemajuan yang dicapai oleh Kabupaten Belitung. Teriring doa dan harapan, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa mengiringi setiap langkah yang kita laksanakan.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Belitung,



H. Sahani Saleh, S.Sos.



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman dan warna-warni indah tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa, oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Arsip menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan seni budaya dan sebaiknya disajikan secara menarik, sehingga menguatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda pada budaya bangsanya. (Presiden Joko Widodo, Juli 2021)

Khazanah arsip mengenai Kabupaten Belitung banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), memberikan warna tentang keberagaman dalam merajut memori kolektif daerah seperti tradisi lesong panjang yang dilakukan oleh masyarakat Belitung setelah panen, ada pula pantai Tanjung Kelayang yang pernah dikunjungi oleh Duta Besar Bolivia. Salah satu memori yang terekam dalam arsip adalah bangunan Mesjid Jamik Tanjungpandan dengan bentuk lamanya yang masih memperlihatkan ciri arsitektur mesjid-mesjid kuno di Indonesia yaitu beratap tumpang. Masjid ini terletak di permukiman keturunan Depati Belitung, yang dinamakan Kampong Raje (Kampung Raja). Selain itu, terekam pula infrastruktur yang dibangun berkaitan erat dengan prasarana dan sarana pertambangan timah,. Terdapat juga arsip-arsip denah, yang salah satunya merupakan gambar denah situasi mulut sungai Tjoeroecoek di pantai barat Pulau Belitung pada masa Kolonial.

Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam

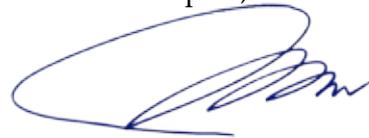
arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk diatas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Citra Daerah Kabupaten Belitung terdiri dari 98 arsip yang berasal dari koleksi khazanah Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung.

Citra Daerah Kabupaten Belitung ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah daerah Kabupaten Belitung khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, 1 November 2022

Kepala,



Imam Gunarto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peta Wilayah Kabupaten Belitung	iv
Lambang Pemerintah Kabupaten Belitung	v
Bupati Bupati	vi
Wakil Bupati Belitung	vii
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung	viii
Ketua DPRD Kabupaten Belitung	ix
Bupati Belitung dari masa ke masa	x
Sambutan Bupati Belitung	xii
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	xiv
Daftar Isi	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Masa Kerajaan	7
B. Sejarah Masa VOC dan Kolonial Belanda	5
C. Sejarah Masa Pendudukan Jepang	27
D. Sejarah Masa Kemerdekaan	30
CITRA KABUPATEN BELITUNG DALAM ARSIP	37
A. Geografis	38
B. Politik dan Pemerintahan	44
C. Keagamaan	80
D. Sosial Budaya	84
E. Pariwisata	94
F. Pendidikan dan Olahraga	104
G. Kesehatan	114
H. Ekonomi dan Industri	120
I. Infrastruktur	132
J. Transportasi	144
Daftar Pustaka	155
Penutup	157





PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Kabupaten Belitung berada di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam bahasa setempat, pulau ini disebut Pulau Belitong. Penduduk Belitong dikelompokkan ke dalam suku Melayu dan secara spesifik disebut Melayu Belitong. Namun dalam kesehariannya, Melayu Belitong menyebut diri mereka Urang Belitong. Sedangkan bahasanya sering disebut Bahasa Melayu Belitong atau Bahasa Belitong.

Pada awalnya wilayah Kabupaten Belitung mencakup seluruh Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Namun seiring terbentuknya provinsi baru yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 4 Desember 2000, wilayah kabupaten ini dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur (Belitim). Pemekaran ini secara resmi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Undang-Undang ini ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 25 Februari 2003. Pemekaran wilayah tersebut hanya menyangkut masalah administrasi saja, sedangkan sejarah dan budaya di kedua kabupaten merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Sekarang terdapat lima kecamatan di Kabupaten Belitung yakni Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik. Satu kecamatan di antaranya yakni Kecamatan Selat Nasik berada di Pulau Mendanau, wilayah perairan barat Pulau Belitung. Ibukota Kabupaten Belitung terletak di Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan. Secara geografis Kabupaten Belitung terletak antara 107° 08' BT sampai 107° 58' BT dan 02° 30' LS sampai 03° 15' LS dengan luas seluruhnya 229.369 ha atau kurang lebih 2.293,69 km². Wilayah Kabupaten Belitung juga terdiri dari 98 pulau besar dan kecil di sekitarnya yang sebagian diantaranya tidak berpenghuni.

Jumlah total penduduk Kabupaten Belitung tercatat sebanyak 184.004 jiwa Data hasil sensus penduduk (SP) tahun 2021. Adapun sebaran penduduknya disetiap kecamatan dapat dilihat dalam daftar berikut ini :

1. Kecamatan Tanjungpandan, 104.152 jiwa
2. Kecamatan Badau, 15.168 jiwa
3. Kecamatan Membalong, 26.833 jiwa
4. Kecamatan Sijuk, 31.342 jiwa
5. Kecamatan Selat Nasik, 5.674 jiwa.

Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung yakni sebanyak 42 desa dan 7 kelurahan. Wilayah desa terbagi menjadi 127 dusun dan kelurahan terbagi menjadi 30 lingkungan. Pembagian wilayah ini tersebar di lima kecamatan. Wilayah Kecamatan

Tanjungpandan terdiri dari Kelurahan Kota, Kelurahan Parit, Kelurahan Kampung Damai, Kelurahan Pangkallalang, Kelurahan Paal Satu, Kelurahan Tanjung Pendam, Kelurahan Lesung Batang, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Air Merbau, Desa Aik Ketekok, Desa Juru Seberang, Desa Air Saga, Desa Buluh Tumbang, Desa Perawas, Desa Aik Rayak, dan Desa Dukong. Kecamatan Badau terdiri dari Desa Badau, Desa Ibul, Desa Kacang Butor, Desa Air Batu Buding, Desa Cerucuk, Desa Sungai Samak, dan Desa Pegantungan. Kecamatan Membalong terdiri dari Desa Membalong, Desa Padang Kandis, Desa Perpat, Desa Lassar, Desa Simpang Rusa, Desa Bantan, Desa Kembiri, Desa Tanjung Rusa, Desa Pulau Seliu, Desa Pulau Sumedang, Desa Gunung Riting, dan Desa Mentigi. Kecamatan Sijuk terdiri dari Desa Sijuk, Desa Pelepak Pute, Desa Tanjung Binga, Desa Terong, Desa Air Seruk, Desa Air Selumar, Desa Sungai Padang, Desa Batu Itam, Desa Keciput, dan Desa Tanjong Tinggi. Kecamatan Selat Nasik terdiri dari Desa Selat Nasik, Desa Pulau Gersik, Desa Petaling, dan Desa Suak Gual.

Rincian pembagian wilayah kelurahan dalam Kecamatan Tanjungpandan adalah sebagai berikut. Kelurahan Kota: Lingkungan I dan Lingkungan II. Kelurahan Parit: Lingkungan I, Lingkungan II, Lingkungan III, dan Lingkungan IV. Kelurahan Kampung Damai: Lingkungan I dan Lingkungan II. Kelurahan Pangkallalang: Lingkungan Air Pancur, Lingkungan Tanjungbaru, Lingkungan Air Berutak, Lingkungan Pak Mangga, Lingkungan Kelapa Gading, Lingkungan Perintis, Lingkungan Hayati Mahim, Lingkungan Batu Tanjung, dan Lingkungan Gunung Payung. Kelurahan Paal Satu: Lingkungan I, Lingkungan II, Lingkungan III, dan Lingkungan IV. Kelurahan Tanjung Pendam: Lingkungan Tanjung Pendam, Lingkungan Pagar Alam, Lingkungan Perai, dan Lingkungan Baru. Kelurahan Lesung Batang: Lingkungan Gajah Mada I, Lingkungan Lesung Batang, Lingkungan Sudirman, Lingkungan Idaman.

Rincian pembagian wilayah dusun dalam Kecamatan Tanjungpandan adalah sebagai berikut. Desa Pelempang Jaya: Dusun Air Pelempang Timur dan Dusun Mekar. Desa Air Merbau: Dusun Aik Rembing, Dusun Kerjan, Dusun Aik Rendudong, dan Dusun Asam Lubang. Desa Aik Ketekok: Dusun Air Ketekok, Dusun Permai, dan Dusun Kayu Manis. Desa Juru Seberang: Dusun Juru Seberang dan Dusun Telok Dalam. Desa Air Saga: Dusun Tanjung Kubu, Dusun Sukadamai, Dusun Air Saga, Dusun Air Serkuk, dan Dusun Air Kesembung. Desa Buluh Tumbang: Dusun Perawas II, Dusun Buluh Tumbang, dan Dusun Air Mungkui. Desa Perawas: Dusun Perawas, Dusun Air Raya Ujung I, Dusun Air Raya Ujung II, Dusun Kelekak Usang. Desa Aik Rayak: Dusun Air Raya Barat I, Dusun Air Raya Barat II, Dusun Air Raya Barat III, Dusun Air Raya Barat IV, Dusun Air Raya Timur I, dan Dusun Air Raya Timur II. Desa Dukong: Dusun Pilang I, Dusun Pilang II, dan Dusun Pilang III.

Rincian pembagian wilayah dusun dalam Kecamatan Badau adalah sebagai berikut. Desa Badau: Dusun Badau I, Dusun Badau II, dan Dusun Kelekak Datuk. Desa Ibul: Dusun Bukit Ibul, Dusun Ibul, dan Dusun Kematang Bersing. Desa Kacang Butor: Dusun Kacang Butor, Dusun Kepayang, Dusun Air Begantung, dan Dusun Bukit Indah. Desa Air Batu Buding: Dusun Air Batu Buding dan Dusun Parit Gunung. Desa

Cerucuk: Dusun Cerucuk dan Dusun Mempiu. Desa Sungai Samak: Dusun Sungai Samak, Dusun Tanjung Tikar Tiris, Dusun Pulau Bayan, dan Dusun Petikan. Desa Pegantungan: Dusun Suge, Dusun Gunung Tiong, dan Dusun Pegantungan.

Rincian pembagian wilayah dusun dalam Kecamatan Membalong. Desa Membalong: Dusun Membalong, Dusun Rejomulyo, Dusun Ujung Gersik, Dusun Air Buntar, Dusun Parang Buluh, Dusun Air Kundur, dan Dusun Rejosari. Desa Padang Kandis: Dusun Padang Kandis, Dusun Tanjung Tembela, dan Dusun Batu Lubang. Desa Perpat: Dusun Perpat, Dusun Kepang, dan Dusun Karang Asam. Desa Lassar: Dusun Air Batu Lassar, Dusun Tungkup, Dusun Lassar, Dusun Dudat, Dusun Batu Mana, Dusun Pulau Betangan, dan Dusun Ulim. Desa Simpang Rusa: Dusun Air Nangka, Dusun Air Merah, Dusun Kampung Baru, dan Dusun Simpang Rusa. Desa Bantan: Dusun Kampung Ilir, Dusun Air Malik, dan Dusun Bantan. Desa Kembiri: Dusun Kembiri dan Dusun Air Gede. Desa Tanjung Rusa: Dusun Sabung, Dusun Tanjung Rusa, dan Dusun Nyurun. Desa Pulau Seliu: Dusun Seliu I dan Dusun Seliu II. Desa Pulau Sumedang: Dusun Pulau Sumedang. Desa Gunung Riting: Dusun Gunung Riting dan Dusun Cepun. Desa Mentigi: Dusun Mentigi dan Dusun Gunung Kurak.

Rincian pembagian wilayah dusun dalam Kecamatan Sijuk. Desa Sijuk: Dusun Simpang Empat Sijuk, Dusun Ulu, dan Dusun Piak Air. Desa Pelepek Pute: Dusun Pelepek Pute, Dusun Balitung, dan Dusun Aik Kalak. Desa Tanjung Binga: Dusun Pantai Selatan dan Dusun Timur Jaya. Desa Terong: Dusun Bebute dan Dusun Terong. Desa Air Seruk: Dusun Air Seruk I, Dusun Air Seruk II, dan Dusun Air Rembikang. Desa Air Selumar: Dusun I Air Selumar, Dusun II Air Selumar, Dusun III Air Selumar, dan Dusun IV Air Selumar. Desa Sungai Padang: Dusun Sungai Padang dan Dusun Munsang. Desa Batu Itam: Dusun Batu Itam I, Dusun Batu Itam II, dan Dusun Batu Itam III. Desa Keciput: Dusun Tanjung Kelayang dan Dusun Kampung Baru. Desa Tanjong Tinggi: Dusun Mekar Jaya dan Dusun Mekar Baru.

Rincian pembagian wilayah dusun dalam Kecamatan Selat Nasik. Desa Selat Nasik: Dusun Tomok dan Dusun Darat. Desa Pulau Gersik: Dusun Pulau Gersik I, Dusun Pulau Gersik II, Dusun Pulau Kuil, Dusun Pulau Kalambau, dan Dusun Pulau Buntar. Desa Petaling: Dusun Petaling. Desa Suak Gual: Dusun Suak Gual.

- Adapun batas wilayah Kabupaten Belitung yakni sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Cina Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar

Sejarah pembentukan alam Belitung memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Satu contoh adalah geosite lava bantal di Tanjung Siantu, Desa Sijuk. Geosite Tanjung Siantu menjadi bukti keberadaan Belitung yang sudah ada sekitar 350 juta tahun lalu. Geosite ini juga mengandung fosil fusulinid yang mengindikasikan jejak samudra purba yang hilang sekitar 419 tahun yang lalu. Keunikan alam yang dimiliki Belitung dan Belitung Timur

dianggap memiliki arti penting dalam geologi. Akhirnya pada tanggal 15 April 2021 UNESCO menetapkan Belitong sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Hingga kini terdapat 17 geosite di Belitong dan sembilan di antaranya berada di Kabupaten Belitong. Kesembilan geosite itu yakni Juru Seberang, Desa Wisata Terong, Hutan Mangrove Kuala, Bukit Peramun, Tanjung Kelayang, Batu Bedil, Tanjung Siantu, Gunung Tajam, dan Batu Baginda.

Kabupaten Belitong juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016. KEK pariwisata ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 14 Maret 2019 dan termasuk 10 destinasi pariwisata prioritas. Pada akhir Desember 2019 jumlah wisatawan nusantara tercatat 329.091 orang dan wisatawan mancanegara 19.063 orang dengan total seluruhnya 348.154 orang. Sampai Desember 2020 terdapat 71 hotel dan penginapan dengan total jumlah kamar mencapai 2662 unit. Di antara hotel tersebut, satu hotel masuk klasifikasi bintang 5, lima hotel bintang 4, delapan hotel bintang 3, tujuh hotel bintang 2, dan empat hotel bintang 1.

Penduduk Kabupaten Belitong merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kesatuan masyarakat Pulau Belitong. Laporan Depati Belitong tentang jumlah penduduk tahun 1851 menunjukkan pembagian masyarakat menjadi empat kelompok. Ke empat kelompok itu yakni Orang Darat (Urang Darat, Orang Laut (Urang Laut), perantau Melayu dan Bangsa Timur serta Tionghoa. Orang Darat dalam bahasa Belanda disebut *Billitonizen* atau Orang Belitong. Mereka adalah kelompok dengan jumlah paling besar dan disebut sebagai penduduk bumiputra Pulau Belitong. Sedangkan jumlah terbanyak kedua adalah Orang Laut yang dulu masih hidup di atas perahu.

Asal usul Orang Darat di Belitong sulit ditelusuri. Bahkan geolog Belanda Cornelis de Groot menyangsikan Orang Darat sebagai penduduk asli Pulau Belitong. Sebab Orang Darat yang ditemuinya di pedalaman Belitong pada abad ke-19 memiliki bahasa Melayu yang khas. Bahasa Melayu yang digunakan oleh Orang Darat tampak menunjukkan asal usul mereka. Menurut De Groot, sebagian besar mereka adalah Orang Melayu dari keresidenan Palembang dan pantai timur Sumatera, dari pulau-pulau keresidenan Riau, dari Bangka, dari Sukadana dan dari semenanjung Malaysia. Sedangkan sebagian kecilnya berasal dari keturunan Makasar dan Bugis, dan dari Keling. Semua orang dari berbagai daerah itu, baik yang pertama maupun yang terakhir dimasukkan sebagai kelompok Orang Darat dari Belitong. Ensiklopedia Hindia-Belanda tahun 1896 memperkirakan pada zaman kuno mungkin terdapat sebuah koloni Melayu datang ke Pulau Belitong dan kemudian menjadi penduduk asli setempat.

Pada abad ke-20 bumiputra Pulau Belitong menyebut diri mereka “Urang Belitong” dan bahasa mereka disebut Bahasa Belitong atau Bahasa Melayu Belitong. Buku Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia Jilid A-K mengelompokkan Urang Belitong ke dalam suku bangsa Melayu. Pada abad ke-21 identitas Melayu tersebut diperkuat dengan adanya Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Belitong dan Kabupaten Belitong

Timur. Secara garis besar bahasa Belitong terdiri atas delapan dialek, yaitu dialek Badau, Dendang, Gantung, Sijuk, Manggar, Kelapa Kampit, Membalong, dan Pulau Seliu.

Matapencaharian Orang Darat umumnya adalah berladang dan mengumpulkan produk-produk hutan. Ladang atau baisa disebut *ume* (huma) dibuka dengan cara menebang hutan muda untuk menanam padi kering tanpa pengairan. Kayu terbaik hasil penebangan hutan digunakan untuk membangun rumah. Menurut Cornelis de Groot, rumah Orang Darat abad 19 disebut rumah durat. Sisa kayu yang tidak digunakan akan dibakar untuk menambah kesuburan tanah. Proses selanjutnya adalah menanam padi yang dikenal dengan sebutan nugal. Para pria membuat lobang menggunakan tongkat kayu. Pada saat yang bersamaan kaum perempuan mengisi lobang tersebut dengan benih padi. Lobang tanam sengaja dibiarkan terbuka karena nanti akan tertutup abu secara alami karena tertiuap angin maupun tersapu hujan. Satu lahan digarap paling lama dua tahun. Setelah itu mereka akan pindah membuka ladang baru di hutan lain. Dalam kurun waktu 10 tahun, lahan bekas huma sudah kembali menjadi hutan muda dan Orang Darat bisa membuka ladang lagi di lahan tersebut.

Komoditi perdagangan Orang Darat umumnya adalah produk-produk hutan seperti kayu, damar, rotan, gaharu, sarang burung, madu, dan lilin. Mereka dikenal pula sebagai pembuat tikar yang andal, yang dijual hingga ke luar negeri. Selain itu mereka juga mengerjakan besi yang bahan bakunya berasal dari batu besi magnit yang banyak ditemukan di seantero Pulau Belitong. Besi dari Belitong dikenal dengan sebutan Besi Belitong yang banyak dicari sebagai material pembuatan keris dan senjata pusaka lainnya. Besi itu ditempa dari bijih besi menjadi sebuah pelat berukuran panjang $\pm 15,72$ cm, lebar 5,24 cm, dan tebal 1,31 cm. Sebagian besi itu diolah lagi oleh para pandai besi di kampung-kampung menjadi perkakas. Contohnya seperti parang, kapak, beliung, serampang, tirok, tombak, seruit, keris panjang, keris pendek, pisau raut, kantip, dan tumbuk lada. Perdagangan pahat, kapak, dan parang dari Belitong ke Batavia setidaknya sudah dicatat oleh VOC pada abad ke-17. Namun sumber lain menyebut para pedagang dari Majapahit abad ke-14 dan ke-15 telah menggunakan parang dari Belitong sebagai alat barter rempah-rempah di Pulau Timor.

Islam merupakan agama Urang Belitong di Pulau Belitong. Sebelumnya pada abad ke-19 Cornelis de Groot telah menyebutkan seluruh Urang Darat beragama Islam. Belum diketahui secara pasti kapan Islam pertama kali masuk dan kemudian berkembang di Pulau Belitong. Dalam tradisi lisan Belitong banyak sekali dijumpai kisah-kisah tentang tokoh penyebar agama Islam. Salah satu legenda penyebar Islam yang umum dikenal di Pulau Belitong adalah Datuk Gunong Tajam. Makamnya terletak di bukit Gunong Tajam dan merupakan puncak tertinggi di Pulau Belitong setinggi 510 meter. Gunong Tajam berada di Desa Kacang Butor, Kabupaten Belitong. Letaknya hampir berada di tengah-tengah Pulau Belitong. Selain menjadi destinasi wisata religi, Gunong Tajam sekarang juga termasuk geosite dalam Geopark Belitong.

A. SEJARAH MASA KERAJAAN

Hikayat Raja-Raja Pasai yang ditulis pada abad ke-14 telah menulis nama Belitung dengan sebutan *Nĕgĕri Bĕlitong*. Pada satu masa dalam hikayat tersebut dikisahkan Pasai dipimpin oleh Sultan Ahmad (1346-1383). Sultan ini kemudian ditaklukkan oleh Majapahit. Sementara wilayah Belitung pada masa yang sama disebutkan sebagai bagian dari Negeri Ujong Tanah. Tak lama setelah menaklukkan pasai, Majapahit melanjutkan gerakannya ke wilayah Ujong Tanah. Belitung dan beberapa pulau serta daerah jajahan Raja Ujong Tanah kemudian takluk kepada Majapahit. Penaklukan itu dilaksanakan oleh sebuah armada dibawah pimpinan Patih Gajah Mada. Sejak penaklukan tersebut Belitung selanjutnya memberi upeti kepada Ratu Majapahit.

Catatan tahunan kekaisaran Dinasti Ming abad ke-15 yakni Ming Shi-Lu menuliskan nama Ma-ye-weng pada 27 Oktober 1405. Nama ini juga diterjemahkan menjadi Ma-li-dong, Ma-ye-dong, Ma-yi-dong dan semuanya dianggap merujuk pada Pulau Belitung. Catatan singkat itu menyatakan, utusan dikirim untuk mengambil proklamasi Kekaisaran untuk menenangkan dan mengajar enam negari Fan-su-er, Mi-nang-ge-bu, Luzon, Ma-ye-weng, Nan-wu-li dan Suo-luo. Namun sebagian peneliti menganggap nama Ma-ye-weng atau Ma-yi-dong menjerus pada Pulau Mindoro di Filipina.

Penjelajah Portugis Tome Pires menyebut nama *Bylitam* dalam tulisan yang dikenal dengan judul 'Suma Oriental'. Nama *Bylitam* dalam tulisan abad ke-16 itu kemudian diartikan sebagai Belitung. Pedagang Belitung disebut telah menjalin hubungan dagang hingga ke Malaka. Sedangkan secara politik ada seorang Pate yang saat itu memimpin Belitung. Firman Jaya dalam buku Sejarah Politik Pulau Belitung (2020:25) menduga keberadaan Pate berkaitan erat dengan kekuasaan Kesultanan Demak. Kekuasaan itu diperoleh Demak setelah mengalahkan Kerajaan Tanjungpura di wilayah barat Pulau Kalimantan. Mungkin beberapa masa sebelumnya Kerajaan Tanjungpura pernah memberi pengaruh signifikan pada Belitung. Sebab bahasa Belitung sangat mirip dengan bahasa Melayu di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang merupakan wilayah Kerajaan Tanjungpura. Dalam tradisi lisan, abad ke-16 merupakan awal berdirinya Kerajaan Badau di Pulau Belitung. Raja pertamanya dikenal dengan nama Datuk Dalung Mayang Gresik atau Datuk Moyang Gresik yang datang dari Jawa.

Pada paruh kedua abad ke-17 tahun 1668 seorang utusan VOC Jan de Harde mengunjungi Pulau Belitung. Ia mendapat keterangan dari orang-orang Melayu setempat bahwa di Sungai Balok terdapat seorang *Kingabey* yang memerintah seluruh Pulau Belitung untuk Pangeran Palembang. Selain itu terdapat pula Kiayaria sebagai pemimpin kedua dari Kingabey tersebut. Dalam tradisi lisan, abad ke-17 disebut sebagai awal berdiri Kerajaan Balok di Pulau Belitung. Raja pertamanya disebut *Kiahi Ge Gedeh Jaakoep* dan juga berasal dari Jawa. Sedangkan versi lain dalam tradisi lisan Belitung menyebut Raja pertama Kerajaan Balok adalah Kyai Rangga. Beliau dianggap sebagai leluhur dari para Depati yang memimpin Pulau Belitung hingga abad ke-19.

Minim sekali data sejarah Belitong pada masa kerajaan, baik sumber internal maupun eksternal. Bahkan sumber-sumber utama dalam sejarah Sriwijaya, Majapahit, maupun Demak tidak pernah menyebut nama Pulau Belitong secara eksplisit. Sedangkan sumber sejarah dari internal Belitong hampir sepenuhnya bersandar pada tradisi lisan. Sementara sumber-sumber tradisi lisan sering kali bertolak belakang satu sama lain dan menimbulkan beragam versi cerita. Komisaris Pemerintah Hindia-Belanda untuk Palembang Jan Isaac Sevenhoven berkunjung ke Belitong tahun 1823. Menurutnya sejarah awal Belitong sangat sulit ditelusuri, hampir sama dengan kebanyakan daerah lain di nusantara.

“Penduduk hanya tahu bahwa para pangeran Jawa dari Majapahit telah mengirim mubalig kepada mereka, dan bahwa mereka telah dibujuk oleh kekuatan persuasi dan harapan keuntungan, untuk menganggap diri mereka tunduk pada pangeran-pangeran itu, atau setidaknya untuk mengakui sebagai sekutu dan pelindung, kepada siapa mereka bersedia membayar sedikit upeti,” kata Sevenhoven (1867:75).

Tampaknya pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, Belitong berperan sebagai sebuah daerah industri, khususnya pengolahan besi. Sumber-sumber sejarah abad ke-17 menyebutkan bahwa sejak abad ke-14 dan ke-15 pedagang dari Majapahit telah menggunakan parang Belitong sebagai komoditi dagang di jalur rempah. Parang Belitong sangat diminati di Pulau Timor dan dibarter dengan kayu cendana dari pulau tersebut. Catatan ini selaras dengan berbagai tradisi lisan di Belitong seperti kisah Datuk Moyang Gresik di Desa Badau dan Datuk Serangas Tuban di Desa Bantan. Kisah kedua tokoh ini dikaitkan dengan kemampuan mereka mengolah besi menjadi senjata. Bahkan sampai sekarang Desa Badau dikenal sebagai pusat pembuatan parang tradisional di Pulau Belitong. Sedangkan kisah Datuk Serangas Tuban menyisakan jejak-jejak batu asah yang konon dulu digunakan untuk mengasah senjata buaatannya. Nama Tuban dibelakang nama Beliau dianggap menunjukkan daerah asalnya di Pulau Jawa. Seperti yang diketahui pada abad ke-14 dan ke-15, Tuban adalah salah satu pelabuhan penting di Jawa, di samping Gresik dan Jepara.

Sejauh ini peta paling tua yang menggambarkan Pulau Belitong adalah peta tahun 1554. Peta itu dimuat dalam buku berjudul *Primo Volume, & Seconda editione Delle Navigazione et Viaggi ... Venice, 1554* karya Ramusio. Dalam peta yang diterbitkan di Venesia Italia tersebut nama Pulau Belitong ditulis ‘Beleiton’. Sementara dalam peta jalur rempah tahun 1594 nama Pulau Belitong ditulis ‘Bibilitam’. Penamaan ini merujuk pada manuskrip Portugis dan sangat mirip dengan istilah yang digunakan oleh Tome Pires yakni Bylitam.

Penyebutan nama Belitong dalam peta-peta buatan Eropa mungkin berkaitan dengan sebuah tradisi lisan abad ke-19. Pada tahun 1859 insinyur pertambangan J.E. Akkringa mendengar sebuah kisah dari pemandu lokal Belitong. Saat itu Akkringa sedang melaksanakan penelitian kandungan timah di sekitar bukit Sarang Naning dekat Sungai Batu (Desa Air Batu Buding). Menurutnya, ada tradisi lisan yang berkembang di

masyarakat Belitong bahwa pemukiman pertama zaman kuno dimulai di bukit Sarang Naning. Penghuninya terdiri dari beragam suku bangsa, antara lain Jawa, Tiongkok, dan 'orang seperti tuan'. Keterangan terakhir mengindikasikan pemukiman kuno tersebut juga dihuni oleh orang Eropa. Penduduk meyakini siapa saja menaiki bukit Sarang Naning akan menemui ajal. Maka itu Akkringa enggan menaiki bukit setinggi kurang lebih 15 meter tersebut. Namun ia mengaku masih bisa melihat bekas-bekas pecahan tembikar di puncaknya yang konon merupakan jejak kebudayaan kuno Sarang Naning. Lokasi tersebut sekarang menjadi perkebunan kelapa sawit dan di sekitarnya juga terdapat pertambangan timah.

Pelaut-pelaut mancanegara mungkin telah mengetahui keberadaan Belitong sejak milenium pertama. Dugaan ini menyusul penemuan situs kapal tenggelam di perairan Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitong pada tahun 1998. Situs ini dikenal dengan sebutan Belitong shipwreck dan dicatat dalam website resmi UNESCO. Sebagian peneliti menamainya dengan sebutan Tang Treasure (Harta Karun Tang) karena kapal karam itu mengandung sekitar 60.000 keramik utuh dari Dinasti Tang.

Belitong Shipwreck ditemukan pada kedalaman 17 meter dengan jarak sekitar 1 mil dari pantai. Jarak ini dianggap dekat dan lokasi perairannya masih terbilang dangkal. Sebagian nelayan masa kini meyakini awak kapal tersebut mungkin selamat dan kemudian mencapai daratan Pulau Belitong. Kapal tersebut diperkirakan berasal dari Oman dan berlayar menuju Tiongkok pada tahun 830 Masehi. Berdasarkan indentifikasi barang-barang berifat pribadi, awak kapal tersebut diduga terdiri dari orang Arab, Melayu, India, dan Tiongkok.

B. SEJARAH MASA VOC DAN KOLONIAL BELANDA

Pengetahuan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tentang Belitong sangat minim hingga paruh pertama abad ke-17. VOC hanya mencatat sejumlah perahu yang datang dari Belitong untuk berdagang di Batavia. Catatan itu ditulis dalam register harian (*dagh registers*) dari Batavia. Catatan paling tua bertanggal 5 Oktober 1640, saat sebuah perahu dari Batavia berangkat ke Belitong dengan membawa pakaian seharga 100 Real. Kemudian laporan kedua yakni 2 Januari 1648 tentang kedatangan sebuah tongkang dari Belitong dengan 21 orang awak yang membawa muatan 10.000 pahat dan parang. Laporan selanjutnya dapat dilihat pada daftar berikut ini ;

- 22 April & 2 Juni 1648 : Tiba di Batavia sebuah perahu dari Belitong dengan membawa pahat dan parang.
- Mei 1661 : Tiba di Batavia sebuah perahu dari Belitong dengan membawa 10.000 pahat dan 50 pikul damar.
- Januari 1663 : Berangkat dari Batavia 4 perahu dengan membawa pakaian ke Belitong.
- Maret 1663 : Pulang kembali satu perahu dari Belitong dengan membawa muatan beras.

- Mei 1665 : Seorang penduduk dari Belitung datang di Batavia dengan membawa 1900 pahat, 100 parang, 5 pikul damar, dan 60 tikar.
- November 1665 : Seorang penduduk dari Belitung membawa 2000 buah pahat ke Batavia.

Pada tanggal 22 Mei 1668, sebuah perahu dari Belitung tiba di Batavia. Perahu itu dinahkodai oleh seseorang bernama *Kiahi Sampoera* (Kyai Sampura). Ia memperkenalkan dirinya sebagai raja atau penguasa dari kepulauan Bangka dan Belitung. Kemudian Sampoera menjalin kerjasama dengan VOC. Kerjasama itu dituangkan dalam kontrak tanggal 10 Juli 1668. Salah satu isinya menyangkut perdagangan sejumlah komoditi dari Belitung.

Setelah kerjasama disepakati, VOC menugaskan Jan de Harde untuk mendampingi Sampoera ke Belitung. Selain untuk memastikan legitimasi Sampoera, Jan de Harde juga ditugasi untuk mengecek kondisi pulau Bangka dan Belitung.

Sampoera berangkat ke pulau Belitung 12 Juli 1668 dengan iringan kapal perang kecil bernama *De Zantlooper* di bawah komando Jan de Harde. Kapal ini juga membawa bahan pakaian dan peralatan perang yang dibeli Sampura dengan perjanjian akan dibayar di Belitung. Peralatan perang tersebut yakni dua pucuk meriam besi dengan 50 peluru, 16 pucuk senjata api, satu pikul peluru, dan 50 tempayan bahan peledak. Jan de Harde akhirnya tiba di Belitung pada tanggal 30 Juli 1668. Kunjungan itu adalah yang pertama kalinya bagi Jan de Harde dan dianggap sebagai utusan pertama VOC yang menginjakkan kaki di Pulau Belitung. Ia beberapa kali tersesat lantaran dalam perjalanan kapalnya terpisah dari perahu Sampura.

Nelayan Melayu setempat memberi tahu Jan De Harde bahwa kapal mereka berlabuh di depan sungai atau tempat bernama Balok (selatan Belitung). Di dalam sungai tersebut terdapat seorang kingabey yang memerintah Pulau Belitung untuk Pangeran Palembang. Dalam laporannya, Jan de Harde menulis penguasa Belitung di Balok dengan sebutan Tommongong (Temenggung). Sedangkan anak dari Temenggung tersebut bernama Sidjaca (Sijaka). Kapal Jan de Harde tidak bisa memasuki sungai karena perairan yang dangkal. Kemudian utusan penguasa Balok datang ke kapal *De Zantlooper* untuk menyambutnya. Utusan tersebut adalah paman Sijaka bernama Mabouiy (Ma boui). Utusan tersebut kemudian menerangkan bahwa Sampura bukanlah Raja di Belitung, tapi hanya seorang wakil dari pembesar di Bangka yang diusir oleh penguasa Palembang dan kemudian menetap di Sungai Kubu, wilayah barat Pulau Belitung.

Setelah mendapat informasi tentang Sampura, Jan de Harde langsung melanjutkan perjalanannya tanpa sempat singgah ke kediaman penguasa Belitung di Balok. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang Penglima yang terikat persaudaraan dengan Sampura. Panglima tersebut disebut berasal dari

Johor dan kemudian memandu Jan de Harde ke kediaman Sampura. Menurut Sampura, kediaman Sampura seperti sarang penyamun atau tempat jagal. Kediaman tersebut dipagari dengan tembok kayu setinggi 5,5-6 meter dengan sebuah balai besar dan rumah panggung dengan dua atap besar. Luas kediaman tersebut sekitar 300 langkah keliling, dilengkapi dengan meriam besar dan kecil. Selain itu masih terdapat 5-6 rumah di dalam pagar yang pekarangannya ditanami pohon buah seperti pisang, kelapa dan sirsak. Selebihnya lingkungan di sekitar kediaman Sampura adalah belukar dan hutan belantara. Hingga waktu perjalanan Harde habis, Sampura tak kunjung pulang ke kediamannya. Informasi dari nelayan menyebutkan bahwa sebagian penghuni Belitong kala itu terdiri dari perompak dan pelarian dari berbagai daerah. Mereka selalu membuat keonaran untuk mengganggu kedudukan penguasa Belitong di Balok. Produk-produk utama yang dihasilkan Belitong sebagian besar adalah perkakas besi, dan selebihnya yakni kulit penyu, lilin, kayu-kayuan dan damar.

Jan de Harde kemudian melanjutkan perjalanan ke Bangka. Ia kembali mendapat informasi dari para kepala suku di sana bahwa tidak ada seorang pun yang tahu keperegian Sampura ke Batavia. Hal tersebut dilakukan semata-mata oleh Sampura untuk membalaskan dendamnya terhadap penguasa Palembang. Maka itu Jan de Harde kemudian membuat kontrak baru dengan para kepala suku tersebut. Namun dalam perjanjian tersebut nama Belitong tidak disebut seperti kontrak yang ditanda tangani Sampura sebelumnya. Selanjutnya tidak ada berita dari VOC tentang kondisi Belitong.

Pada tahun 1672 Jan de Harde kembali ke Bangka dan Belitong. Kedatangannya dalam rangka mengantisipasi kedatangan kapal-kapal Perancis. Namun ternyata kapal-kapal tersebut hanya melintas dalam perjalanan menuju Ceylon. Dari para kepala suku di Bangka Jan de Harde mendapat info bahwa saat itu Sampura telah menjadi Raja Bangka dan pada saat bersamaan sedang berada di Belitong. Kedudukan tersebut diperoleh Sampura setelah menjalin kerjasama dengan Sultan Banten. Jan de Harde kemudian mencari Sampura ke Belitong. Namun saat sedang berlabuh di muara Sungai Kubu, kapalnya diserang oleh perahu yang berpura-pura mencari ikan. Satu awak kapal tewas dan Jan de Harde mengalami luka serius. Dalam laporannya Jan de Harde menyebutkan: "Dari Belitong tidak ada harapan yang baik lagi". Mulai tanggal 23 Juli 1672 hubungan VOC dengan Bangka dan Belitong akhirnya putus. Setelah beberapa tahun kemudian VOC sempat mencatat hubungan perdagangan yang bersifat perseorangan dari Belitong di Batavia. Namun pada tahun 1680 hubungan tersebut terputus lagi dan VOC menganggap Belitong sebagai sarang penyamun dan tempat berkumpulnya pelaut-pelaut dari Makasar dan Bugis.

Belitong kembali membuat VOC ketar-ketir pada tahun 1685. Kala itu Belitong menjadi basis armada Raja Sakti yang sedang mengkampanyekan 'perang suci' umat Islam Nusantara melawan VOC. Raja Sakti terkadang

dipanggil Raja Ibrahim. Ia juga populer dengan nama Paduka Ahmad Shah atau Ahmad Shah bin Iskandar dan punya gelar Yang di-Pertuan Raja Sakti, penguasa Minangkabau.

“Dalam waktu singkat ia berhasil memobilisasi dukungan, dikatakan sebanyak 4.000 orang dan 300 perahu di tahun 1685. Amangkurat II dari Mataram, yang sedang menderita karena persyaratan-persyaratan dalam persekutuannya dengan VOC, menjawab suratnya dengan mengundang Ahmad Syah datang ke Kartasura untuk memimpin perang sabil,” tulis Anthony Reid, dalam bukunya *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*.

Jeyamalar Kathirithamby–Wells pada tahun 1970 menulis sebuah makalah berjudul: *Ahmad Shah Ibn Iskandar and the Late 17th Century ‘Holy War’ in Indonesia* (Ahmad Shah Ibn Iskandar dan “Perang Suci” abad ke-17 di Indonesia). Makalah sepanjang 16 halaman itu dimuat dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* Vol. 43, No. 1 (217) (1970). Menurutnya, 4000 orang yang datang ke Belitung tersebut sebagian besar terdiri dari orang-orang Makasar dan Minangkabau, Riau, Johor, dan Jambi.

“Kekhawatiran Belanda pada kolusi Ahmad Shah dengan kekuatan-kekuatan Muslim semakin diperkuat oleh gejala-gejala pemberontakan gerakan anti-kafir di tempat lain di Nusantara,” tulis Jeyamalar Kathirithamby dalam makalahnya tersebut.

VOC kemudian menggalang kekuatan tandingan pada tahun 1686. Mereka mengambil keputusan untuk menyerang Raja Sakti di Belitong. Namun serangan VOC gagal lantaran armada Raja Sakti sudah lebih dulu meninggalkan Belitong. Setelah itu tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai Belitong dalam laporan-laporan VOC hingga menjelang pertengahan abad ke-18. Padahal selama kurun waktu tersebut perdagangan di Belitong masih tampak aktif dan menjadi tujuan kapal-kapal tradisional dari berbagai daerah.

Gubernur Jenderal VOC Gustaaf Willem Baron van Imhoff pada tahun 1746 meminta Dewan Penasehat (*Raad van Indie*) agar memberikan perhatian pada pulau Belitong. Permintaan ini berkaitan dengan kecurigaannya terhadap aktivitas kapal-kapal tradisional di Belitong. Van Imhoff berasumsi, tidak mungkin kapal-kapal bumiputra begitu sibuk mengunjungi Belitong kalau tidak ada perdagangan yang menguntungkan dari pulau tersebut. Maka ia ingin kondisi Belitong ditinjau secara langsung untuk memastikan tidak ada praktik penyelundupan di luar pengetahuan VOC. Akhirnya terbitlah Resolusi Gubernur Jenderal dan Dewan Penasehat nomor 4 tanggal 18 Maret 1746 tentang perintah pemeriksaan pulau Belitong. Seorang Residen dari Palembang bernama Van den Heuvel ditunjuk untuk melaksanakan resolusi itu.

Butuh waktu 13 tahun bagi VOC untuk mendapat gambaran mengenai situasi

Pulau Belitong. Residen Palembang yang sebelumnya ditugasi selalu beralasan untuk menghindari tugas tersebut. Alasan itu antara lain karena kekurangan kapal dan lambatnya koordinasi surat menyurat dengan pengurus pusat VOC di Belanda. Setelah dua masalah tersebut diatasi, Residen Palembang Van den Heuvel secara terang-terangan memilih mangkir dari tugasnya. Perintah pemeriksaan Pulau Belitong akhirnya tak kunjung dilaksanakan sampai Gubernur Jenderal Baron van Imhoff meninggal dunia pada 1 November 1750. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mossel berusaha melanjutkan gagasan pendahulunya. Namun pada 27 September 1751 Dewan Pengurus VOC di Belanda memerintahkan agar pemeriksaan terhadap pulau Belitong ditunda hingga tahun 1752. Ketika rencana tersebut akan dilaksanakan, giliran pengurus VOC di Batavia yang membatalkannya. Pemeriksaan tersebut dianggap berbahaya karena Belitong dipenuhi batu karang dan sulitnya mendapatkan pemandu lokal yang dapat dipercaya. Silang pendapat antara pengurus VOC di Hindia-Belanda dan di Belanda baru selesai pada tahun 1759 atau 13 tahun setelah rencana pemeriksaan Belitong dicetuskan.

Residen Palembang bernama *Huybert Johan de Heere* akhirnya mengunjungi Belitong pada tanggal 15 Agustus 1759. Menurutny, Pulau Belitong dipimpin oleh seorang Depati yang ditunjuk oleh Sultan Palembang. Wilayah yang secara langsung diperintah oleh Depati adalah Balok dan Tanjong Gunong. Selain itu masih ada wilayah lain yakni Sijuk, Buding, dan Belantu yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ngabehi. Setelah Depati dan Ngabehi, terdapat pula seorang Karia (Krio) di Lenggang yang langsung berada di bawah Depati.

Menurut De Heere para Ngabehi diberikan kekuasaan untuk memerintah di wilayahnya masing-masing. Sementara Depati memerintah wilayahnya dengan bantuan Karia Lenggang. Baik Depati maupun Ngabehi sama-sama menjalankan wewenangnya tanpa bertanggung jawab langsung terhadap Sultan Palembang. Namun Depati memiliki kewajiban mengirim upeti setiap tahun kepada Sultan Palembang. Meski nilai upeti dari Belitong dianggap tak seberapa, tapi Sultan mengaku sudah puas. Sebab upeti tersebut hanya sebagai tanda ketundukan Belitong terhadap Kesultanan Palembang. Sementara kehadiran bajak laut di Belitong sering kali dikesampingkan. Sultan dan para petinggi Belitong dianggap sengaja tutup mata, karena pembajakan tersebut secara tidak langsung juga ikut menguntungkan mereka.

De Heere akhirnya menyarankan VOC agar tidak berinvestasi di Belitong. Selain tidak ada timah, pemberantasan bajak laut juga akan menelan biaya yang besar. Sementara hasil perdagangan yang diperoleh dari Belitong tidak akan cukup untuk menutupi biaya tersebut. Saran Residen De Heere pun diterima dan disetujui oleh para pengurus VOC di Batavia dan di Belanda. Hingga VOC bubar, Belitong tidak sekalipun pernah diduduki oleh VOC. Generasi Belanda selanjutnya pada abad ke-19 mengkritik tindakan VOC terhadap Belitong. Adalah

hal aneh De Heere tidak menemukan timah dan hanya memeriksa wilayah Tanjungpandan. Padahal daerah lain juga telah disebutkan di laporannya.

Insinyur pertambangan Cornelis de Groot mengatakan, Residen De Heere seharusnya tahu keberadaan timah adalah alasan mengapa banyak bajak laut di Pulau Belitung. Bahkan laporan penduduk lokal secara jelas menyebut Belitung mengandung timah, hampir sama seperti di Bangka. Namun Residen tetap membiarkan dirinya dipandu oleh utusan Sultan Palembang dan Depati Belitung. Padahal sang Residen datang dengan kapal perang dan perahu serbu yang dilengkapi persenjataan. Andai saja ia mau sedikit berusaha dan melakukan penelitian secara indenpen, maka timah Belitung seharusnya sudah ditambang Belanda sejak abad ke-18. Namun Residen tampaknya telah diperdaya, entah disengaja atau tidak.

Sewaktu Kesultanan Palembang ditaklukkan Inggris pada tahun 1812, Belitung tetap dipimpin oleh seorang Depati yang berkedudukan di Cerucuk. Dalam tradisi lisan, Depati tersebut dikenal dengan nama Kyai Agus (K.A) Hatam. Belitung dan Bangka kemudian diserahkan oleh Sultan Palembang kepada Inggris. Namun Depati Belitung menolak mengakuinya. Beliau juga tidak mau memenuhi panggilan Residen Inggris untuk bersumpah setia kepada Inggris yang berkedudukan di Muntok, Pulau Bangka. Inggris kemudian mengirim wakilnya bernama Rajah Akil dari Siak ke Belitung pada tahun 1815. Dalam satu serangan mendadak pada malam hari, Rajah Akil menyerbu kediaman Depati di Cerucuk. Akibatnya Depati Hatam pun tewas, sementara anaknya berhasil menyelamatkan diri dalam kondisi luka-luka.

a. Masa Pendudukan Inggris

Belitong mulai menghadapi masa kolonial saat Sultan Mahmud Badaruddin II ditaklukkan oleh Inggris pada tahun 1812. Kedudukan Beliau digantikan oleh adiknya yang bergelar Sultan Ahmad Najamuddin II. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1812, Sultan Ahmad Najamuddin II membuat kontrak baru dengan Inggris. Salah satu poin dalam kontrak tersebut menyatakan Kesultanan Palembang melepaskan hak kekuasaannya atas Pulau Bangka dan Belitung kepada Inggris. Dalam hal ini, Inggris yang dimaksud adalah Perusahaan Hindia Timur Britania atau *British East India Company* atau *East India Company* atau biasa disingkat EIC.

Setelah menaklukkan Palembang, Inggris tidak langsung menindaklanjutinya kekuasaannya Belitung. Sebab Residen Inggris di Muntok kala itu disibukkan dengan berbagai urusan di Palembang. Ia juga harus menyiapkan pembentukan pemukiman baru, menanggulangi penyakit, serta mengurus distrik-distrik kaya tambang timah di wilayah barat Pulau Bangka.

Pada sisi lain, di Eropa terjadi konvensi London pada tahun 1814 antara Inggris dan Belanda yang dikenal dengan istilah *Anglo-Dutch Treaty*. Dalam konvensi itu, pihak Inggris akhirnya menyerahkan kembali koloni Belanda di Nusantara, termasuk Pulau Bangka. Dalam pandangan Inggris, penyerahan Bangka tersebut tidak termasuk Pulau Belitung. Sedangkan Belanda berpandangan penyerahan Bangka otomatis membuat Belitung masuk di dalamnya. Di tengah perbedaan pandangan inilah Inggris berupaya mengirimkan wakilnya untuk menduduki Pulau Belitung.

Inggris menunjuk seorang bangsawan Siak bernama Raja Akil pada tahun 1815. Raja Akil diperintahkan membawa surat ke Depati Hatam yang berisi pergantian kekuasaan di Belitung. Menurut Raja Akil, surat tersebut membuat Depati dan Raden Keling dari Toboali merencanakan aksi serangan terhadapnya. Raden Keling adalah seorang bangsawan Palembang yang memiliki pengaruh sangat kuat di Toboali. Maka itu Raja Akil memutuskan menyerang lebih dulu secara diam-diam ke kediaman Depati di Cerucuk. Serangan mendadak itu berlangsung singkat dan membuat Depati terbunuh. Raja Akil kemudian pergi ke Muntok untuk mencari bantuan untuk mengantisipasi serangan balas dendam Raden Keling yang bersahabat dengan Depati Hatam.

Inggris tidak menindaklanjuti peristiwa pembunuhan Depati Hatam. Kondisi ini dipengaruhi perdebatan antara Inggris dan Belanda terkait kepemilikan Belitung. Di tengah perdebatan itu, Belanda mengambil inisiatif untuk menduduki Belitung pada tahun 1818 dengan mengirim wakilnya bernama Raja Badar. Namun tidak ditemukan laporan mengenai aksi Raja Badar di Belitung. Selama masa kekosongan kepemimpinan itu aksi bajak laut kembali menggeliat di Belitung. Bahkan aksi bajak laut itu semakin menjadi-jadi pada tahun 1820. Kala itu mereka berani naik ke darat dan merampas gudang timah Belanda di Batu Rusa, Bangka. Namun Belanda tidak bisa berbuat banyak karena pada waktu yang bersamaan sedang terjadi pemberontakan di Palembang dan Bangka.

Pada tahun 1821 Belanda menduduki Palembang melalui Jenderal Mayor De Kock. Selanjutnya mereka kembali menyusun rencana untuk menduduki Belitung. Usaha tersebut berkaitan dengan upaya untuk menghentikan aksi perompakan di perairan Bangka. Namun strategi pendudukan Belitung diubah karena cara kekerasan yang dilakukan pada era Inggris dianggap tidak membuahkan hasil. Maka itu Jenderal Mayor de Kock mengambil kebijakan untuk mendekati penduduk Belitung dengan cara halus dan meminta Orang Laut (Sekah) agar meninggalkan aksi perompakan. Untuk misi ini Pemerintah Hindia-Belanda menunjuk wakilnya dari kalangan bangsawan Palembang bernama Pengeran Syarief Mohammad sebagai Kepala Belitung.

Singkat kata, pada tanggal 25 Oktober 1821 Pangeran Syarief menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera Belanda di Pulau Belitung. Dengan berkibarnya bendera Belanda tersebut, maka berakhir pula masa penjajahan Inggris di Pulau Belitung. Sejak mengambil alih Belitung dari kekuasaan Sultan Palembang pada tahun 1812, Inggris tidak pernah sekalipun menduduki Belitung secara langsung.

b. Masa Kolonial Hindia-Belanda

Konflik politik mewarnai awal kekuasaan Belanda di Belitong. Konflik tersebut terjadi antara Depati Rahad dengan para wakil Belanda yang ditunjuk untuk menjadi Kepala Belitong (Hoofd van Billiton). Depati Rahad adalah anak Depati Hatam yang dulu berhasil menyelamatkan diri dari serangan utusan Inggris. Tak lama setelah ayahnya meninggal, Depati Rahad didapuk oleh masyarakat Belitong sebagai Depati, penerus Raja-Raja Balok yang menguasai Belitong selama berabad-abad.

Pada tanggal 22 Mei 1822 Pemerintah Hindia-Belanda menempatkan satuan militer yang dipimpin oleh J.P. de la Motte. Kapten berkebangsaan Belgia itu ditunjuk sebagai Komandan Militer sekaligus Kepala Pemerintahan Sipil Belanda di Pulau Belitong. Tanggal 31 Oktober 1822 Motte melaporkan dirinya telah menyelesaikan pembangunan benteng di Tanjong Simba, Cerucuk. Sedangkan pemerintahan pribumi dikepalai oleh Pengeran Syarief Mohammad. Pengangkatan bangsawan Palembang sebagai Kepala Belitong dilakukan Belanda dengan anggapan bahwa Belitong adalah bagian dari wilayah Kesultanan Palembang. Namun Belanda tak menyadari bahwa Belitong dikepalai oleh seorang Depati selama beberapa masa yang memerintah secara otonom, dan baru kemudian masuk dalam kekuasaan Sultan Palembang. Bahkan Sultan Palembang sendiri memberikan kewenangan yang luas kepada Depati untuk memerintah di Belitong.

Pengangkatan Pengeran Syarief Mohammad sebagai Kepala Belitong tentu membuat Depati Rahad kecewa, karena posisi tersebut seharusnya diberikan kepadanya. Kemudian Pengeran Syarief Mohammad merespon dengan mengangkat Rahad sebagai Depati dan memberinya gaji serta tunjangan. Namun pengakuan tersebut tidak memuaskan Depati karena hak-hak ulayatnya tetap dikuasi oleh Pengeran Syarief Mohammad.

Tanggal 17 Juli 1823 Komisaris Pemerintah Hindia-Belanda di Palembang Jaan Isaac Van Sevenhoven tiba di Belitong. Kedatangannya dalam rangka evaluasi sekaligus menentukan rencana-rencana selanjutnya terhadap pendudukan Pulau Belitong. Menurut kondisi politik di Belitong saat itu sangat kacau. Kapten Motte dianggap keras kepala dan melalaikan tugas utama yang dulu diberikan kepadanya. Tugas tersebut adalah mengatasi perompakan dan melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat dan para pemimpin lokal di Belitong. Dengan demikian kekuasaan Belanda terhadap Belitong bisa diterima secara damai. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bahkan Sevenhoven mendapat perlakuan buruk dari Depati dan para kepala lainnya.

Sevenhoven mengatakan, Depati Belitong adalah orang yang harus mendapat perhatian khusus dalam upaya Pemerintah menduduki Pulau Belitong. Usia Depati saat itu sekitar 21 atau 25 tahun dan memiliki gelar *Tjakra di Ningrat* (Cakra di Ningrat). Sevenhoven adalah orang pertama yang menulis gelar Cakra di Ningrat dalam laporannya. Gelar ini sebelumnya digunakan oleh Depati Hatam, ayah dari Depati Rahad. Gelar Cakra Ningrat tersebut digunakan secara turun temurun dan disematkan

kepada Depati yang memimpin Pulau Belitong. Dalam tradisi lisan, gelar ini disebut telah digunakan sejak masa Depati pertama pada abad ke-17. Namun versi lain menyebut gelar tersebut mungkin baru digunakan oleh Depati ketiga, saat Belitong takluk kepada Palembang. Perintis perusahaan tambang timah Billiton Maatschappij J.F. Loudon mengatakan, saat dirinya tiba di Belitong tahun 1851 Depati Rahad menyebut gelar tersebut Tjakra Ningrat (Cakra Ningrat), bukan Cakra di Ningrat atau Cakra Adiningrat. Begitu pula stempel Depati Rahad yang bertuliskan aksara Arab-Melayu yang isinya bertuliskan Depati Cakra Ningrat. Sementara almanak pemerintah Hindia-Belanda tampak konsisten menulis gelar tersebut dengan sebutan Cakra di Ningrat. Depati terakhir yang berkuasa hingga tahun 1873 juga menulis gelar tersebut Depati Cakra di Ningrat dalam surat wasiatnya. Sementara Cornelis de Groot yang juga perintis perusahaan timah menulis gelar tersebut dengan sebutan Cakra Adiningrat. Hingga kini penulisan gelar tersebut umumnya ditulis Cakra Ningrat atau Cakra di Ningrat.

“Ketika Panembahan (Syarif Muhammad) hendak menguasai pulau ini, dia (Depati) pun mengambil alih, walaupun tidak mengikuti tata aturan yang sah, sebagai putra dia tetap mengklaim gelar Dipati tersebut dari mendiang ayahnya. Depati ini dapat dikatakan sebagai pribumi paling cerdas yang saya temui,” kata Sevenhoven dalam laporannya (1867:66).

Menurut Sevenhoven, kecerdasan Depati tampak dari caranya menempatkan diri di antara Kapten Motte dan Panembahan Syarief Muhammad. Pada satu sisi, Depati membiarkan posisinya berada di bawah kekuasaan Panembahan. Namun pada sisi lain Depati berhasil mempengaruhi Kapten Motte agar tidak mengikuti saran-saran Panembahan. Satu contoh kasus yang sangat vital adalah soal pembangunan benteng. Panembahan dari awal menyarankan agar Kapten Motte membangun benteng di Tanjong Gunong, muara Sungai Cerucuk. Sebaliknya Depati mengatakan bahwa daerah muara sangat rawan dari serangan bajak laut dan terlalu jauh dari permukiman penduduk asli. Maka itu Depati menyarankan Kapten Motte untuk membangun benteng di Tanjong Simba, ke arah hulu Sungai Cerucuk sekitar tiga jam perjalanan. Kapten Motte menerima saran Depati dengan alasan penempatan benteng di Tanjong Gunong akan memudahkannya untuk menjangkau penduduk di pedalaman. Selain itu Depati juga berjanji akan membangun benteng dan 200 rumah di sekitarnya.

“Depati telah mengelabui Komandan kami mentah-mentah, sedang dia (Komandan) tidak bisa mengatasi tipu muslihat tersebut. Komandan berpikir jika dia bersama dengan Depati Belitong, maka itu akan menjadi suatu kelemahan bagi pihak Panembahan (Syarief Muhammad). Dalam khayalannya sendiri, dia membayangkan, jika dia bersikap manis dan bijak kepada Depati, dia akan memenangkan keberpihakan sang Depati, hal itu tentu akan mengurangi bebannya secara kondusif. Komandan telah mengabaikan peringatan dari Panembahan dan membiarkan dirinya diperdaya oleh Dipati yang cerdas tersebut,” kata Sevenhoven (1867:66).

Sevenhoven tiba di benteng Kapten Motte di Tanjong Simba pada tanggal 18 Juli 1823 dan ia pun menginap di sana selama beberapa bulan. Menurutnya benteng itu berupa palisade atau benteng berpagar kayu runcing, berbentuk persegi dengan lebar 160 kaki (sekitar 48 meter). Bagian depan tempat pertahanan benteng tersebut berjarak hanya beberapa meter dari tepi sungai Cerucuk. Tidak terbayangkan tempat yang lebih tidak nyaman dibandingkan lokasi benteng tersebut. Sungai di depan benteng tidak lebar, dan dipenuhi hutan lebat disepanjang alirannya sehingga menutupi pemandangan. Sungai tersebut juga menjadi sangat dangkal saat air laut surut sehingga tidak bisa dimasuki oleh kapal kecil sekalipun. Situasi tersebut tidak menguntungkan pertahanan dan menyulitkan mobilisasi logistik. Sevenhoven yakin benteng tersebut akan mengalami kesulitan jika menghadapi serangan besar. Bahkan jika pasukan terdesak, mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri melalui jalan sungai maupun jalan darat.

Pada sisi lain, Depati juga tinggal di dekat Tanjong Simba. Posisi itu membuat Depati sangat mudah memata-matai gerak gerik Kapten Motte. Sementara Panembahan Syarif Muhammad tinggal di Tanjong Gunong. Depati berhasil menjauhkan keduanya sehingga memperburuk koordinasi antara komandan militer dan kepala pemerintah bumiputra.

“Dia(Kapten Motte) di kemudian hari mengetahui bahwa tempat benteng itu berdiri di *Tandjong-Semba* (Tanjong Simba) sangat tidak menguntungkan, Depati telah mengarahkan dia ke tempat yang salah. Akhirnya Kapten memutuskan untuk memindahkan lokasi benteng ke *Tandjong Goenong* (Tanjong Gunong) di dekat muara sungai,” kata Sevenhoven (1867:68).

Kapten Motte sadar keputusan memindahkan benteng ke Tanjong Gunong akan sia-sia. Sebab orang-orang akan memulai pembangunan dari awal dan biaya yang dibutuhkan tentu tidak sedikit. Kapten Motte akhirnya digantikan oleh J.W. Bierschel pada tanggal 23 September 1823. Bierschel ditugaskan sebagai Asisten Residen yang mengepalai pemerintahan sipil Belanda di Belitong. Sedangkan komandan militer dijabat oleh Kapten Kuhn. Bierschel adalah Asisten Residen pertama Belitong yang tiba pada tanggal 23 September 1823. Kebijakan pertamanya adalah menyiapkan Tanjong Gunong untuk merelokasi benteng Kapten Motte di Tanjong Simba.

Pemindahan benteng di Tanjong Simba ke Tanjong Gunong sebelumnya juga telah direkomendasikan oleh Sevenhoven. Menurutnya Tanjong Gunong adalah nama sebuah bukit setinggi 100 kaki (30 meter) di muara sungai Cerucuk. Di bawahnya terdapat ceruk yang bagus untuk kapal berlabuh. Bahkan kapal perang bisa aman ditempatkan di sana. Pemandangannya luas dari puncak bukit, bisa melihat jauh ke laut dan ke daratan. Aliran sungainya juga terang dan pantai-pantainya berpasir sehingga bebas dari pohon nipah. Sementara daratan di dekatnya terlihat subur dan sangat cocok dijadikan perkampungan bagi penduduk lokal. Tak jauh dari bukit terdapat sungai Seburik yang mengalirkan air bersih. Selain aman dan nyaman, di Tanjong Gunong

juga terdapat batu karang dan pohon-pohon besar yang bisa dimanfaatkan untuk material bangunan.

“Kami harus mewujudkannya di tempat ini, karena lautan menyediakan sumber makanan; ikan, tripang, agar-agar dan beraneka jenis hasil laut yang menguntungkan hingga mudah didapatkan masyarakat sekitar Tanjong Gunong tanpa terlalu lama dan susah payah,” kata Sevenhoven (1867:69).

Tak lama setelah tiba di Belitong, Asisten-Residen Bierschel langsung menebas semak belukar dan menebang pohon-pohon di bukit Tanjong Gunong. Ia kemudian meminta pendapat komandan militer Kapten Kuhn. Menurutnya Tanjong Gunong memiliki posisi yang bagus dan menguntungkan untuk pembangunan benteng.

“Karena ketinggian dan posisinya, tepat di dalam muara sungai, maka ia juga dapat dilihat dari jarak yang sangat jauh oleh pelaut dan kapal yang datang dari alur pelayaran dan digunakan sebagai titik pengintaian,” kata Bierschel yang dikutip oleh Van Diest (1874:224).

Setelah yakin dengan pemeriksaannya, Bierschel kemudian mengajukan usulan kepada Pemerintah untuk merelokasi benteng dari Tanjong Simba ke Tanjong Gunong. Usulan tersebut disetujui dengan terbitnya Keputusan Pemerintah No.19 tanggal 24 November 1824 dengan anggaran senilai 20.000 Gulden. Selanjutnya pada tahun 1825 benteng Tanjong Gunong sudah bisa ditempati oleh satuan militer. Di dalamnya juga dibangun rumah untuk Komandan dan penjara.

Sejak awal pendudukan Belanda di Belitong, Depati Rahad terus melancarkan gerakan politiknya untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai penerus Raja-Raja Balok. Gerakan itu utamanya ditujukan kepada para bangsawan Palembang yang ditunjuk untuk mengepalai Belitong. Para bangsawan Palembang itu mulai dari Pangeran Syarif Muhammad, Syarif Hassim, sampai Mas Agus Mohammad Asik. Singkat kata, Pangeran Sarief Mohamad kemudian meninggal pada tahun 1824 di Muntok, dan Sarief Hassim meninggal di Belitong pada 1837. Sedangkan Mas Agus Mohammad Assik memilih mengundurkan diri pada 1838.

Pemerintah Hindia-Belanda akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengakui kedudukan Depati Cakra di Ningrat KA Rahad yang merupakan penerus Raja-Raja Balok. Kemudian pada 1 Juli 1838, Pemerintah melalui Residen Bangka mengakui kedudukan Depati Rahad sebagai Kepala pulau Belitong (*Hoofd van Billiton*). Pengakuan tersebut diperkuat lagi dengan surat keputusan pemerintah Hindia-Belanda nomor 9 tanggal 11 Oktober 1838.

Depati Rahad sepiantas tampak berhasil meneruskan kekuasaan kerajaan Balok atas pulau Belitong. Namun ternyata Pemerintah Hindia-Belanda telah memberikan sejumlah batasan mengenai kekuasaan tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam surat keputusan pemerintah Hindia-Belanda nomor 9 tanggal 11 Oktober 1838 sebagai berikut :

1. Tugas dan kewajiban pertama Depati adalah mencegah perampokan-perampokan di laut dan perdagangan gelap.
2. Depati harus bersikap baik dengan kepala-kepala yang lain, antara lain dengan Belantu, Sijuk, dan Buding.
3. Depati jangan merintangi menghalangi kehidupan orang laut dengan cara yang tidak adil.
4. Selain dari yang sekarang yang sudah ada dari orang-orang luar pulau, dari Lingga dan Johor, tidak diperkenankan lagi orang lain masuk Belitung dan harus ada izin dari Residen Bangka.
5. Semua penduduk dan pedagang kecil harus mendapat keamanan.
6. Depati harus menahan diri dari pemerasan dan menerima harta yang tidak terpuji.
7. Penampungan orang-orang Tionghoa sedapat mungkin digalakkan, karena orang-orang ini golongan yang rajin dan bisa menumbuhkan perdagangan dan kebudayaan, kecuali orang-orang Tionghoa pelarian, pekerja-pekerja tambang timah dari Bangka.
8. Depati harus sedapat mungkin mencegah adu ayam dan perjudian, dan menggalakkan anak buahnya supaya mencari kesenangan dengan permainan-permainan yang lain.
9. Depati harus segera mungkin membuat daftar penduduk.
10. Depati tidak boleh mengangkat pejabat yang lebih rendah dan memberhentikannya sebelum diketahui dan disetujui oleh Residen Bangka.
11. Depati wajib menempati rumah tempat kediaman yang ditetapkan di Tanjong Gunung di mana juga ada detasemen militer yang tinggal dan dijaga dengan baik.
12. Anak-anak Raja Lingga diperbolehkan menetap di Belitung dengan syarat berkelakuan baik.
13. Depati harus mentaati semua yang sudah ditetapkan maupun yang akan diatur kemudian.

Dalam tradisi lisan, Depati Rahad juga dikenal dengan gelar Depati Cakraningrat VIII. Selam Beliau berkuasa, terdapat sejumlah peristiwa yang menjadi catatan bagi pemerintah Hindia-Belanda. Pada tahun 1826 Belanda menarik pemerintahan sipilnya dari Belitung karena dianggap membebani anggaran. Selanjutnya pengelolaan Pulau Belitung sepenuhnya dipimpin oleh Depati seorang sebagai Kepala Daerah. Depati mengusulkan pembukaan pelayaran antara Belitung dengan seluruh pelabuhan di Hindia-Belanda. Penetapannya tercantum dalam Keputusan Pemerintah Nomor 8 tanggal 24 April 1839. Penetapan ini membuat pelayaran dari dan ke pulau Belitung bisa dilakukan tanpa harus melewati Muntok terlebih dahulu.

Sekalipun Belanda membatasi kekuasaan Depati, tapi tetap saja ada perlawanan secara diam-diam yang dilakukan oleh K.A. Rahad, contohnya dalam bidang

perdagangan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan antar pelabuhan di Hindia-Belanda, tapi juga lebih jauh sampai ke Singapura. Namun perdagangan antara Belitung dan Singapura akhirnya diketahui oleh Belanda pada tahun 1848. Pemerintah menuding kegiatan perdagangan terlarang itu dilakoni oleh seorang yang berasal dari Palembang bernama Kemas Mail. Pemerintah juga menganggap Depati ikut terlibat dengan memberikan dukungan. Maka itu kemudian Pemerintah melalui Residen Bangka menetapkan Depati untuk membayar ganti rugi atas kejadian perdagangan terlarang tersebut.

Pada masa kolonial Hindia-Belanda, Pulau Belitung awalnya masuk dalam wilayah Keresidenan Bangka en Onderhoorigheden, Gouvernement van Sumatra's Westkust en Onderhoorigheden (Keresidenan Bangka dan Dependensinya, Kegubernuran Pantai Barat Sumatera dan Dependensinya). Pembagian wilayah ini membuat Belitung berada di bawah Residen Bangka yang berkedudukan di Muntok. Para perintis tambang timah swasta Belanda yang dimotori oleh J.F Loudon kemudian merasa kesulitan karena jarak antara Tanjungpandan dan Muntok terlampaui jauh. Akibatnya urusan administrasi dalam pertambangan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi saat itu Residen Bangka sering mempersulit perintisan usaha Loudon. Pada saat itu, perusahaan Loudon adalah perusahaan swasta pertama di Hindia Belanda dalam bidang pertambangan timah. Sebelumnya timah selalu hanya dikelola oleh Negera, seperti halnya yang terjadi di Pulau Bangka.

Pada tahun 1852 Loudon mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda agar memisahkan Belitung dari Keresidenan Bangka. Usul tersebut disetujui dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 1 tanggal 15 Maret 1852. Kemudian disusul dengan Staatblad nomor 17 Besluit 17 Maret 1853 nomor 17 tentang pedoman tindakan atas penunjukkan Asisten Residensi Belitung dan Dependensinya. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa Belitung adalah sebuah afdeling yang mandiri, lepas dari campur tangan Residen di Bangka maupun di Jawa. Asisten Residen pertama yang ditunjuk bernama Dielwart, yang tiba di Tanjungpandan pada awal bulan Mei 1853. Ia datang bersama istrinya dan kemudian disebut sebagai wanita Belanda pertama yang menginjakkan kakinya di Pulau Belitung.

Tanggal 20 April 1854, Depati Cakraningrat VIII KA Rahad wafat pada usia 54 tahun. Posisinya digantikan oleh adik kandungnya yakni KA Mohamad Saleh. Beliau akhirnya diangkat pada tanggal 24 November 1854 dengan gelar Depati Cakra di Ningrat. Sedangkan dalam tradisi lisan sering pula disebut Depati Cakra Ningrat IX. Gambaran pemerintahan Belitung pada masa ini sudah sangat terang karena tercatat dalam arsip Belanda.

Pada masa Depati KA Rahad sampai tahun 1854, pembagian wilayah Pulau Belitung terdiri dari Tanjungpandan, Lenggang, Sijuk, Badau, Buding, dan Belantu. Empat distrik yakni Sijuk, Badau, Buding, dan Belantu dikepalai oleh Ngabehi. Seorang Ngabehi memiliki kewenangan mengatur masyarakat dan wilayahnya. Sedangkan

Lenggang dikepalai oleh seorang keria (krio) yang membantu Depati menjalankan pemerintahannya di Tanjungpandan.

Sewaktu Depati Muhammad Saleh memimpin, wilayah Belitong tetap dibagi menjadi enam distrik. Namun pada tahun 1856 distrik Tanjungpandan dan Lenggang juga dikepalai oleh seorang kepala distrik dengan gelar Ngabehi sama seperti empat distrik lainnya. Dengan begitu ada enam Ngabehi pada masa awal pemerintahan Depati KA Muhammad Saleh. Pada tanggal 24 Juni 1865 diangkat seorang Ngabehi untuk distrik baru yakni Dendang. Namun menurut Cornelis de Groot, distrik Dendang baru berdiri pada tahun 1867 seiring dibukanya distrik tambang timah Dendang oleh perusahaan timah NV. Billiton Maatschappij. Sedangkan dalam Almanak Pemerintah untuk Hindia Belanda (*Regerings Almanak voor Nederlandsch-Indie*) nama distrik Dendang baru tercatat pada tahun 1870.

Pemerintahan K.A Muhammad Saleh dengan gelar Depati Cakra di Ningrat berakhir pada tahun 1873. Kemudian pada tahun 1876 Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Cerucuk dalam sebuah situs yang sekarang dinamai Kute Tana. Pemerintahan Kedepatian Belitong sempat ditiadakan karena Depati tidak memiliki keturunan laki-laki. Depati Muhammad Saleh adalah Depati terakhir yang menyandang gelar Depati Cakra di Ningrat penerus trah Raja-raja Balok. Dalam buku *Gedenkboek Billiton Tweede deel* (1927:224) disebut bahwa pada 1876 daerah Belitong ditetapkan menjadi satu distrik yakni Distrik Belitung. Sedangkan wilayah yang sebelumnya disebut distrik berubah menjadi onder-distrik. Namun dalam Almanak Pemerintah tahun 1876 sampai 1879, pembagian wilayah Belitung tetap ditulis dengan tujuh distrik. Ketujuh distrik itu yakni Tanjong Pandan, Sijuk, Buding, Badau, Blantu, Lenggang, dan Dendang.

Pada tahun 1879 Pemerintah Hindia-Belanda melaksanakan kebijakan reorganisasi Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Staatsblad No 45, Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 9 tanggal 17 Januari 1879. Isinya mengubah pemekaran sebelumnya dan menetapkan Belitung menjadi sebuah distrik dengan empat onder-distrik yakni :

1. Onderdistrik Tanjung Pandan, yang meliputi bekas distrik Tandjoeng Pandan dan Badau, serta pulau Mendanau dan Dependensinya;
2. Onderdistrik Buding, yang meliputi bekas distrik Buding dan Sijuk.
3. Onderdistrik Linggang (Manggar).
4. Onderdistrik Dendang, yang meliputi bekas distrik Dendang dan Blantu.

Setiap onder-distrik dikepalai oleh seorang Kepala Onder-Distrik (*onder-distrikts hoofden*) dengan gelar Ngabehi. Jabatan ini langsung berada di bawah Kepala Distrik (*distrikthoofd*) dengan gelar Depati. Sosok penyandang gelar Depati itu adalah K.A Endek, menantu Depati K.A Muhammad Saleh. Depati Endek menjabat sampai tahun 1890 dan merupakan orang terakhir menyandang gelar Depati di Pulau Belitung. Statusnya yang hanya menantu membuat Depati Endek tidak berhak menyandang gelar Depati Cakra di Ningrat.

Pada tahun 1891 Kepala Distrik Belitung dihapus sehingga tidak ada lagi pemimpin tertinggi dalam pemerintahan bumiputra. Namun sistem distrik kembali diberlakukan dengan menambah satu distrik baru. Pembagian wilayah Belitung ke dalam lima distrik ini diketahui lewat Staatsblad No 114, Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 April 1891. Lima distrik tersebut yakni :

1. Tanjungpandan
2. Buding
3. Manggar
4. Dendang
5. Linggang

Pada 1914 pejabat Kepala Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Asisten-Residen sebagai kepala pemerintah daerah Belitung. Kebijakan baru ini ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Besluit 20 April 1914 nomor 20 Staatblad Nomor 361. Pada tahun 1921 Belitung menjadi sebuah distrik yang wilayahnya dibagi menjadi dua onder distrik yakni Belitung Barat (onderdistrict West-Billiton) dan Belitung Timur (onderdistrict Oost-Billiton). Distrik Belitung dikepalai oleh seorang Demang, sedangkan onder distrik dikepalai oleh Asisten-Demang. Kebijakan ini dilaksanakan setelah terbitnya Staatblad tahun 1920 nomor 548 Besluit 20 Juli 1920 nomor 69 tentang reformasi pemerintahan distrik di daerah Belitung (*Hervorming van het districtsbestuur in het gewest Billiton*).

Pada tahun 1924 dibentuk kelurahan (*Inlandsche gemeenten*) atau yang biasa disebut haminte, yang dikepalai oleh lurah. Haminte memiliki status otonomi hukum aslinya sendiri. Lurah dipilih oleh warganya dan dalam melaksanakan pemerintahannya ia dibantu oleh 2-3 orang Kepala Kampung. Setiap kepala kampung juga dipilih langsung oleh warganya untuk masa tugas selama tiga tahun. Kebijakan pemerintahan kelurahan ini dilaksanakan setelah terbitnya Besluit 21 Februari 1924 nomor 20 Staatblad tahun 1924 nomor 75. Jejak haminte tersebut kemudian bisa dilihat dalam lampiran surat keputusan Residen Bangka dan Belitung pada tanggal 26 Mei 1953 No.84.

Kewedanaan Belitung Barat

Kecamatan Tanjungpandan

1. Tg. Pandan. (Tanjungpandan)
2. Kp. Parit. (Kampong Parit)
3. Djuruseberang. (Juru Seberang)
4. Pkl. Lalang (Pangkal Lalang)
5. Pasa I. (Pal Satu)
6. Air Saga
7. Terong
8. Tg. Pinga.(Tanjong Binga)
9. Sidjuk (Sijuk)
10. Sungaipadang

11. Airselumar
12. Airseruk
13. Perawas.
14. Katjangbotor (Kacang Butor)
15. Air Batu B. (Air Batu Buding)
16. Tjerutjuk. (Cerucuk)
17. Badai. (Badau)
18. Keciput.

Kecamatan Membalong

1. Membalong.
2. Bantan.
3. Simpangrusa.
4. Lasar.
5. Perpat.
6. Mentiga. (Mentigi)
7. Tg. Rusa. (Tanjung Rusa)
8. Kembiri.
9. P. Seliau. (Seliu)

Kewedanaan Belitung Timur

Kecamatan Manggar

1. Manggar.
2. Lalang.
3. Padang.
4. Kelubi.
5. Tjendral. (Cendil)
6. Seruding. (Buding)
7. Senjubuk. (Senyubuk)
8. Mengkubang.
9. Kp. Baru (Kampong baru)
10. Air Kali. (Air Kelik)

Kecamatan Gantung

1. Gantung.
2. Betupenju (Djangkarasam). Batu Penyu (Jangkar Asam)
3. Lilangan.
4. Simp. Pesa. (Simpang Pesak).
5. Tg. Kelumpang. (Tanjung Kelumpang).

6. Dendang.
7. Djangkang. (Jangkang)
8. Njurus. (Nyurok)
9. Lintang.
10. Tenggiang. (Renggiang).

Pada 1 Maret 1933 status Belitung sebagai wilayah yang mandiri sejak 1852 akhirnya dihapus. Belitung dimasukkan lagi sebagai bagian dari wilayah Keresidenan Bangka dan Dependensinya (Bangka en Onderhoorigheden). Penghapusan itu ditandai dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Besluit 20 Februari 1933 No.19 Staatblad 1933 No.81. Dalam keputusan itu diatur pembagian administrasi baru Keresidenan Bangka dan Dependensinya. Wilayahnya dibagi menjadi dua afdeling yakni Afdeling Bangka dan Afdeling Billiton.

A. Afdeeling Bangka

1. Distrik Pangkalpinang (Ibukota di Pangkalpinang)
 - Onderdistrik Pangkalpinang.
 - Onderdistrik Mungdo-barat.
 - Onderdistrik Soengeislan.
2. Distrik Muntok. Ibukota di Muntok.
 - Onderdistrik Muntok
 - Onderdistrik Klappa
3. Distrik Noord-Bangka (Bangka Utara) Ibukota di Belinyu
 - Onderdistrik Belinjoe
 - Onderdistrik Djeboes
4. Distrik Soengeiliat (Sungailiat) Ibukota di Sungailiat
 - Onderdistrik Soengeiliat
 - Onderdistrik Morawang
5. Distrik Zuid-Bangka (Bangka Selatan) – Ibukota di Koba
 - Onderdistrik Koba
 - Onderdistrik Toboali
 - Onderdistrik Lepar-eilanden

B. Afdeeling Billiton

1. Distrik Billiton. Ibukota di Tandjongpandan.
 - Onderdistrik Oost-Billiton
 - Onderdistrik West-Billiton

Lima onderdistrik yakni Pangkalpinang, Muntok, Belinyu, Sungailiat, dan Koba diurus langsung oleh Kepala Distrik setempat. Di setiap distrik ditempatkan seorang Kontrolir (*controleur*) dari bangsa Eropa yang membawahi Kepala Distrik. Para Kontrolir itu seluruhnya, termasuk Belitung berada di bawah Residen Bangka. Sebelumnya dalam periode tahun 1852-1933, pejabat Eropa tertinggi di Belitung adalah seorang Asisten-Residen yang kewenangannya tidak berada di bawah Residen Bangka. Maka dengan dihapusnya jabatan Asisten Residen, praktis posisi tertinggi di Belitung ditempati oleh seorang Kontrolir yang merupakan bawahan Residen Bangka. Namun bedanya, seorang Kontrolir di Belitung diberi gelar Asisten Residen.

Perubahan kembali terjadi menjelang akhir tahun 1934. Bangka yang awalnya lima distrik diubah menjadi enam distrik. Sedangkan Belitung yang awalnya satu distrik menjadi dua distrik. Dasar perubahan ini merujuk pada keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.12 Besluit 26 September 1934 Staatblad 1934 No. 573 tentang penetapan pembagian wilayah administrasi baru di Keresidenan Bangka dan Dependensinya.

A. Afdeeling Bangka

1. Onderafdeeling West-Bangka. Ibukota di Muntok.
 - Distrik Muntok.
 - Djeboes.
2. Onderafdeeling Noord-Bangka. Ibukota Belinjoe.
 - Distrik Belinjoe.
 - Soengeiliat.
3. Onderafdeeling Midden-Bangka. Ibukota di Pangkalpinang.
 - Distrik Pangkalpinang.
 - Distrik Mundobarat.
 - Distrik Soengeislan.
4. Onderafdeeling Zuid-Bangka. Ibukota di Koba.
 - Distrik Koba
 - Distrik Toboali.

B. Afdeeling Billiton. Ibukota di Tandjong-Pandan.

1. Distrik West-Billiton. (Belitung Barat)
2. Distrik Oost-Billiton. (Belitung Timur)

Pada tahun 1938 nama keresidenan Bangka dan Dependensinya (Bangka en Onderhoorigheden) berubah menjadi Keresidenan Bangka dan Belitung (Residentie Bangka en Billiton). Perubahan ini dilaksanakan setelah diterbitkannya keputusan

Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam Besluit tanggal 16 Juni 1938 No.27 Staatblad 1938 No. 352. Namun penggunaan nama Bangka dan Belitung dalam peta sudah lebih dulu digunakan, setidaknya sejak tahun 1885. Selanjutnya hingga awal masa kemerdekaan penamaan Keresidenan Bangka dan Belitung masih tetap digunakan.

Tahun 1939 tata pemerintahan Keresidenan Bangka dan Belitung kembali berubah dari dua afdeling menjadi satu afdeling. Kebijakan ini merujuk pada Besluit Gubernur Sumatera tanggal 26 September 1939 no.214/A.Z. 118. Keresidenan Bangka Belitung terdiri dari satu afdeeling yang diberi nama Afdeeling Bangka en Billiton dengan Ibukota di Pangkalpinang. Wilayahnya dibagi menjadi enam onderafdeeling yakni :

1. West-Bangka (Ibukota di Muntok)
 - Distrik Muntok
 - Distrik Djeboes
2. Noord-Bangka (Ibukota di Belinjoe)
 - Distrik Belinjoe
3. Soengeiliat (Ibukota di Soengeiliat)
 - Distrik Soengeiliat
 - Distrik Merawang
4. Midden-Bangka (Ibukota di Pangkalpinang)
 - Distrik Pangkalpinang
 - Distrik Mundobarat
 - Distrik Soengeiselan
5. Zuid-Bangka (Ibukota di Koba)
 - Distrik Koba
 - Distrik Toboali
 - Distrik Lepar-eilanden
6. Billiton (Ibukota di Tandjongpandan)
 - Distrik West-Billiton.
 - Distrik Oost-Billiton.

E. SEJARAH MASA PENDUDUKAN JEPANG

Tanggal 14 Februari 1942 pasukan Jepang menduduki Palembang. Kemudian 28 Februari 1942 pesawat-pesawat Jepang mulai menjatuhkan bom di Pulau Belitung dan menimbulkan kepanikan. Penduduk kota mengungsi ke kampung, sekolah-sekolah ditutup, dan sebagian orang Eropa diungsikan ke Jawa. Serangan bom dari pesawat Jepang terjadi di Lenggang, Kelapa Kampit, dan Tanjungpandan. Manggar juga ikut diserang dengan senapan mesin pesawat. Namun tidak tercatat korban jiwa dari serangkaian serangan tersebut. Serangan tersebut diduga hanya untuk menakut-nakuti penduduk Belitung.

Tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia-Belanda menyerah kepada Jepang. Akhirnya pada tanggal 10 April 1942 sebanyak 200 tentara Jepang menginjakkan kakinya di Tanjungpandan dengan motor boat dan kapal tunda. Hari pertama kedatangan Jepang itu tampak seperti hari biasa. Petugas polisi masih bertugas dengan pistol di pinggang dan para pekerja perusahaan tambang timah tetap bekerja sesuai rutinitasnya. Namun ketenangan itu ternyata hanya berlangsung sebentar. Pada hari ketiga tentara Jepang mulai menangkap polisi dan menyita senjatanya. Banyak orang Eropa diinterogasi dan dimasukkan ke penjara. Pejabat bumiputra ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan di bawah komandan militer Jepang.

Pada masa pendudukan tentara Jepang, wilayah bekas Pemerintah Hindia -Belanda dibagi menjadi tiga garis Komando, yaitu :

1. Jawa dan Madura dilakukan oleh Tentara ke 16 .
2. Sumatera dilakukan oleh Tentara ke 25 .
3. Kepulauan Indonesia lainnya oleh Angkatan Laut.

Pemerintahan di Sumatera dibagi atas bekas-bekas Keresidenan yang disebut Syuu, dikepalai oleh Syu tyokan. Nama-nama dalam tatanan pemerintahan Belanda diubah ke bahasa Jepang.

- Bunsyu (dahulunya afdeeling), dikepalai oleh Bun Syuu Tyoo.
- Si (Stadsgemeente atau kota praja), dikepalao oleh Si- Tyoo.
- Gun (Onderafdeeling), dikepalai oleh Gun-Tyoo.
- Son (Marga/Haminte), dikepalai oleh Son- Tyoo.
- Ku (dusun /kampung), dikepalai oleh Ku- Tyoo.

Di Pulau Belitung, Distrik Belitung Barat dan Belitung masing-masing dikepalai oleh seorang Gun-tyoo. Pada tahun 1943 Jepang melakukan sejumlah aksi dalam bidang ekonomi. Perusahaan tambang timah Belanda, N.V. GMB dilebur ke dalam perusahaan bentukan Jepang bernama Mitsubishi Kogyoka Kaisha (M.K.K). Tambang terowongan (*onderdagbouw*) di Selumar diaktifkan kembali setelah dulu dihentikan sejak 1930. Penambangan di Selumar era Jepang khususnya ditujukan untuk menggali biji besi dan tembaga. Jepang juga membuka persawahan dan mengadakan kursus menanam padi di Perpat selama enam bulan. Dalam tahun 1943 Belitung tercatat telah menghasilkan 800 ton beras.

Pelabuhan Belitung era Jepang dijadikan pelabuhan bebas bea masuk. Kondisi itu membuat perdagangan berkembang dan pasar menjadi ramai. Namun pada sisi lain, kebijakan tersebut menuntut penambahan jumlah kapal. Jepang kemudian berdalih membuka sekolah pertukangan pembangunan kapal. Namun nyatanya sejumlah pekerja tambang timah dipaksa untuk mengerjakan kapal-kapal tersebut di Manggar. Siapa saja yang beralasan akan dianggap melawan dan akan mendapatkan siksaan berat tentara Jepang. Selama 3,5 tahun penjajahan Jepang tercatat Manggar telah

menghasilkan empat kapal ukuran M-boat dengan bobot 50 ton.

Pada tahun 1944 dilaksanakan pembangunan bandara Buluh Tumbang. Para pekerjanya diambil dari penduduk lokal dengan jumlah sekitar 2000 orang. Dalam proses pembangunan tersebut para pekerja mengalami kondisi kurang makan, penyakit, dan tindakan kekerasan dari militer Jepang. Hingga berakhir Perang Dunia ke-2, bandara tersebut belum selesai.

Pemerintahan tanpa perwakilan rakyat adalah ciri khas pemerintahan pendudukan Jepang. Namun setelah terdesak dalam serangkaian peperangan, Jepang mulai merasa perlu lebih banyak melibatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Maka itu Jepang membentuk dewan perwakilan rakyat yang dinamai *Siu Sangi Kai*. Belitung mendapat jatah 3-7 orang wakil rakyat untuk mengisi dewan tersebut, yang pemilihannya dilakukan oleh pemerintah Jepang setempat.

Pada awal tahun 1945 Jepang membentuk dibentuk Badan Kebaktian Rakyat. Dewan ini merupakan badan penasehat yang mendampingi pejabat-pejabat Jepang dalam menjalankan kewajibannya. Namun pada kenyataannya, dewan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Kemudian disusul bom atom kedua di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Selanjutnya Kaisar Jepang Hirohita berbicara di radio nasional menyampaikan kabar kekalahan Jepang dalam perang dan menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada 15 Agustus 1945. Kabar ini berlanjut dengan serangkaian aksi di Indonesia hingga akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sementara di Belitung, sebagian masyarakat telah mendengar kabar tentang proklamasi di Jakarta. Namun pemerintahan daerah di Belitung belum merespon sama sekali kabar tersebut.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 dilaksanakan Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta. Dalam rapat itu dirumuskan pembagian sementara wilayah Indonesia sebelum ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilaksanakan. Untuk sementara daerah Republik Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Wilayah itu adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Setiap provinsi terbagi menjadi sejumlah keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Gubernur Sumatera pertama yang ditunjuk adalah Tengku Muhammad Hasan, berkedudukan di Medan. Pada masa itu Provinsi Sumatera terdiri dari 10 Keresidenan, termasuk Keresidenan Bangka dan Belitung. Bertindak sebagai Residen Bangka dan Belitung adalah Masyarif Datuk Bandarolelo.

Tanggal 23 Agustus 1945 tentara Jepang di Belitung mengabarkan kealahannya dari pihak Sekutu. Mereka selanjutnya meninggalkan Belitung secara bertahap sampai awal bulan September 1945 tanpa menyerahkan kekuasaan kepada siapa pun. Tanggal

6 September 1945 Ketua Komite Nasional Daerah Sumatera di Bukit Tinggi mengirim surat kawat kepada Rasiden Bangka dan Belitung. Surat berisi informasi resmi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia itu diteruskan kepada Gun-co (Demang) Belitung, K.A Larif. Selain itu juga diinstruksikan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia yang bertugas mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Namun instruksi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Demang mengingat militer Jepang telah meninggalkan Belitung. Selanjutnya Demang Belitung lebih memilih mengambil sikap menunggu.

Pada 11 September 1945 sejumlah tentara Jepang kembali ke Belitung mengambil persenjataan mereka untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun pada sumber lain menyebut kedatangan itu terjadi pada 11 Oktober 1945.

C. SEJARAH MASA KEMERDEKAAN

Pada tanggal 29 September 1945 terjadi pergantian kepemimpinan di Belitung, Demang Latif digantikan oleh K.A. Mohamad Joesoef (baca: Kiai Agus Muhammad Yusuf). Beliau adalah salah satu pemimpin di Belitung yang sebelumnya dipindahkan ke Bangka untuk menjabat sebuah jabatan tinggi dalam pemerintahan Jepang di Pangkalpinang. Beliau kembali ke Belitung dengan jabatan sebagai Bun Syuu Tyoo. Jabatan tersebut tampaknya membuat status Belitung naik dari onderafdeeling menjadi afdeling. Sebab Bun Syuu Tyoo dalam tata pemerintahan militer Jepang adalah kepala dari wilayah Bun Syuu atau afdeeling. Namun dalam penulisan sejarah, jabatan Bun Syuu Tyoo itu lebih sering ditulis demang.

Sejak awal menjabat, Demang Yusuf juga mendapat sejumlah instruksi dari Residen Bangka. Namun instruksi terkait langkah-langkah menyambut kemerdekaan Republik Indonesia tersebut tidak diumumkan ke masyarakat. Sampai pada akhirnya surat-surat kawat itu bocor ke tengah masyarakat. Maka sejumlah pemuka masyarakat mengirim surat kepada Demang Yusuf untuk mendiskusikan sikap Belitung dalam menyabut kabar kemerdekaan Indonesia. Pertemuan antara Demang dan pemuka masyarakat Belitung berlangsung pada 18 Oktober 1945. Pertemuan dilaksanakan di rumah Demang Yusuf. Sedangkan pemuka masyarakat yang hadir yakni M. Saad, Mahran, dan Elias serta K.A. Johar.

Elias yang pertama berbicara menyampaikan pandangan masyarakat Belitung. Pada umumnya masyarakat menantikan pengumuman dari pemerintah daerah Belitung tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu masyarakat juga ingin pemerintah daerah menjelaskan pendiriannya terhadap kemerdekaan (mengakui atau tidak) dan menetapkan sikap masyarakat. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan menunjukkan tindakan-tindakan dalam pembangunan negara merdeka.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu Demang Yusuf menyatakan terima kasih atas dukungan dari para pemuka masyarakat yang hadir. Beliau juga setuju dengan adanya kemerdekaan, tapi belum setuju mengumumkannya secara resmi

kepada masyarakat. Sebab masih ada keraguan dalam pandangan Demang terhadap cara-cara kerja pemimpin-pemimpin republik di Bangka. Maka itu Beliau mengatakan ingin menunggu bukti yang sebenarnya. Demang Yusuf yang sebelumnya pernah menjabat kepala Distrik Belitung Barat mengaku kenal masyarakat Belitung. Beliau belum percaya sepenuhnya bahwa cita-cita kemerdekaan rakyat itu begitu besar di Belitung. Maka itu Beliau merasa belum perlu terburu-buru menyiarkan kemerdekaan Indonesia tersebut. Andai kata masyarakat Belitung tidak ikut serta sekalipun dalam usaha-usaha merebut kemerdekaan, tidaklah akan terjadi halangan karena apalah artinya pulau Belitung yang sekecil ini dalam lingkungan Indonesia yang luas itu ujar Beliau.

Sikap pemerintah daerah di Belitung Timur juga sama seperti di Tanjungpandan, yakni tidak terburu-buru mengumumkan kemerdekaan. Namun reaksi masyarakatnya tampak berbeda. Pada tanggal 12 Oktober 1945 muncul inisiatif dari para pemuda bersama tokoh masyarakat Manggar seperti Burhan, Amir Siregar, Sutan Arbi, P.Lubis, Abdullah Zaini, H. Mohamad Yasin. Mereka berkumpul untuk menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia di gedung Taman Kemajuan GMB di Lipat Kajang, Kampung Baru, Manggar. Selanjutnya dilaksanakanlah pengibaran Bendera Merah Putih untuk yang pertama kalinya di Pulau Belitung pada pukul 10.00 pagi. Peristiwa tersebut kemudian ditutup dengan pembacaan doa selamat oleh H. Mohamad Yasin.

Tanggal 14 Oktober 1945 para tokoh Belitung Timur menggelar rapat untuk menyatakan protes terhadap sikap pemerintah daerah. Esok harinya tanggal 15 Oktober Kepala Daerah Belitung Timur mengundang para tokoh tersebut untuk melaksanakan pembentukan pemerintahan RI. Namun jumlah orang yang hadir tidak kuorum dan rapat diundur esok. Tanggal 16 Oktober 1945 akhirnya berhasil dibentuk Komite Nasional Indonesia Belitung Timur. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

Ketua : Burhan

Wakil Ketua : Moh Saleh (Kepala Polisi Manggar)

Sekretaris : Abdullah Zaini (swasta)

Seksi Pemuda : Kombolo (guru)

Seksi Penerangan : Amir Siregar

Seksi Perhubungan : P. Lubis (swasta)

Pada hari yang sama saat terbentuknya KNI Belitung Timur, 16 Oktober 1945 Demang Yusuf mengumpulkan pegawai pemerintah daerah di gedung sekolah HIS (sekarang SMPN 1 Tanjungpandan). Dalam peristiwa tersebut Demang akhirnya mengumumkan secara resmi kemerdekaan Bangsa Indonesia. Seluruh pegawai negeri yang hadir kemudian menyatakan sumpah sebagai pegawai Republik Indonesia. Sementara itu pada tanggal 17 Oktober 1945 KNI Belitung Timur telah membentuk badan-badan pemuda dan pejuang di Manggar, Mengkubang, Gantung dan daerah sekitarnya.

Pada tanggal 18 Oktober 1945 sebuah pesawat catalina mendarat di muara sungai Cerucuk, Pelabuhan Tanjungpandan. Pesawat itu berisikan empat orang Belanda, Van den Berg (pegawai GMB), Verschure, Vermeulen, dan pilot Arnold. Kedatangan peninjau Belanda ini dijamu oleh seorang tokoh dan pengusaha Tionghoa Cong Kim Soe. Situasi itu sempat membuat masyarakat curiga dan mengepung kediaman Cong Kim Soe. Namun pemimpin masyarakat berhasil meredakan emosi massa, sesuai pesan yang pernah disampaikan oleh Residen Bangka sebelumnya. Setelah itu pesawat peninjau Belanda kembali lagi ke Jakarta dengan ikut membawa Cong Kim Soe bersama mereka.

Pada hari sama dengan kedatangan peninjau Belanda tanggal 18 Oktober 1845, pemerintah daerah Belitung melaksanakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia. Rapat ini dipimpin oleh Demang Yusuf dan dr. Marsidi Yudono. Sebanyak 34 orang hadir, terdiri dari para kepala kantor, tokoh masyarakat, dan dua orang Tionghoa pro republik yakni Tjiang Tjin Khon dan The A Tong. Setelah dilakukan pemilihan, maka terbentuklah susunan pengurus KNI Belitung sebagai berikut :

Ketua : Mohd. Saad

Wakil Ketua : Mahran.

Penulis I : K.A. Djohar

Penulis II : K.A. Zawawi

Anggota :

Elias

A. Jahya

Abubakar

Syarif

Wahab Ajis

H. Mas'ud

K.A. Gafar

M. Yatim

R. Suhadi

A. Aidit

M. Yasin

Sarono S.H.

Hasan Basri

Setelah KNI Belitung terbentuk, diadakan rapat raksasa di areal Panggung Batu (sekarang Pusat Perbelanjaan Puncak) tanggal 20 Oktober 1945 pukul 16.00 WIB. Lebih dari 1000 orang hadir dalam rapat tersebut. Demang Yusuf kemudian menyampaikan secara resmi kemerdekaan bangsa Indonesia dan disambut antusias oleh masyarakat Belitung.

Tanggal 21 Oktober 1945 kapal perang Belanda bernama "Hr. Ms. Tromp" berlabuh di Tanjungpandan. Kapal tersebut dinahkodai oleh Kolonel Stamp sebagai wakil tentara Sekutu. Selain itu kapalnya juga membawa satu detasemen tentara NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang dipimpin oleh Mayor Textor. Mereka tiba pukul 16.30 dan langsung menduduki kantor PTT (post telegraaf en telephone), kantor polisi, tangsi militer, rumah sakit, dan pos-pos pengawasan strategis. Bendera Merah Putih yang berkibar di kantor pos dan tangsi militer pusat kota (sekitar Tugu Satam sekarang) diturunkan.

Pada tanggal 26 Oktober 1945 pukul 10.00 diadakan penyerahan tentara Jepang kepada sekutu di kapal Hr. Ms. Tromp. Selanjutnya dr. Marsidi Judono diminta menjadi saksi sekaligus mewakili pemerintah daerah Belitung dalam upacara penyerahan tersebut. Pada hari yang sama, Demang Yusuf dan Kepala Polisi Belitung Bismark Sitompul mengundurkan diri dari jabatannya.

a. Perlawanan Rakyat Belitung

Tanggal 27 Oktober 1945 lima pemimpin rakyat Manggar ditangkap, yakni R. Bangsa Ratu Demang Belitung Timur, Mohamad Saleh Kepala Polisi Manggar, Burhan Ketua KNI Cabang Manggar, Kombolo pemimpin pemuda Manggar, dan Dani kepala gudang GMB Manggar. Mereka dijadikan tahanan militer di Tanjungpandan sekitar 51 hari. Kemudian tanggal 29 Oktober 1945 giliran Kepala Polisi Gantung KA Nanang yang ditangkap dan disatukan dengan rombongan pertama di sebuah rumah dekat tangsi polisi Tanjungpandan. Para tokoh di Tanjungpandan juga tak luput dari aksi penangkapan. Antara lain Mahran Ketua PNI, M. Saad Ketua KNI, M. Said Lurah Kampung Parit, Abubakar tokoh masyarakat Aik Seruk, dan Abuhasan.

Tindakan represif tentara NICA akhirnya memicu perlawanan rakyat di Belitung. Pada tanggal 25 November 1945 terjadi pertempuran di Aik Seruk, Aik Merbau, dan Simpang Empat Pal Satu Kampong Ujong. Akibatnya lima orang gugur yakni Mihidin, Dani, Ahim, Gaparman, Hayati Mahim. Selain itu juga terjadi pertempuran di Selat Nasik pada tanggal 14 Desember 1945. Sebanyak 12 orang gugur di Selat Nasik yakni Anwar Aid, Mat Yasin, Dahlan, Dullah Saidin, Mohammad Pak Sah, Ahmad Senuntjai, Akil Ali, Mohammad Noh, Kulup Tulang, Sabar, Gapur, dan Siti. Pada 18 Desember 1945 terjadi pula pertempuran di Tanjong Lancor yang menewaskan empat orang, yakni Abdurrahman bin Bujang, Basari bin Kulup Bus, Ali bin Uyup, dan Seridin.

Setelah perlawanan bersenjata dianggap tidak memungkinkan dan gerakan

selanjutnya ditujukan pada lapangan politik. Pada tahun 1946 Belanda membentuk Dewan Belitung Sementara dan Belitung dimasukkan ke dalam Gewest Borneo. Dalam tahun yang sama, Belitung digabungkan ke dalam Gewest Bangka Belitung Riau atau biasa disingkat BABIRI. Daerah BABIRI tersebut dikelompokkan di bawah Algemeen Regeerings Commissaris Borneo en Groote Oost (Komisaris Pemerintah Borneo dan Timur Besar).

Belanda kemudian mengganti lagi Dewan Belitung Sementara Dewan Billiton pada tanggal 12 Juli 1947. Selanjutnya Belitung menjadi Daerah Otonom dari Republik Indonesia Serikat. Namun pembentukan Dewan Billiton ini menuai kritik karena dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat Belitung. Maka itu pada tanggal 12-13 Juli 1947 diadakan musyawarah besar tokoh masyarakat Belitung di Balai Kelurahan Simpang Tiga. Dalam musyawarah itu dibentuk organisasi Gabungan Organisasi Rakyat Indonesia Belitung (GORIB). Organisasi ini juga dikenal dengan nama Panitia Musyawarah Rakyat Indonesia (PAMURI). Rapat berlangsung dua hari dua malam dan setiap peserta secara swadaya membawa beras $\frac{1}{2}$ Kg untuk makan bersama. Namun sejumlah tokoh di balik organisasi ini akhirnya ditangkap dan menjadi tahanan militer dan baru dibebaskan beberapa bulan kemudian.

Pada 23 Juni 1948, Belanda menggabungkan Dewan Belitung ke dalam Federasi Bangka Belitung Riau. Pada sisi lain masyarakat Pulau Belitung tetap berkeyakinan mendukung Republik Indonesia. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan mengirimkan uang dan pakaian untuk pemerintah pusat RI di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Desember 1949 Sekretaris Presiden Republik Indonesia Mr. Brotodiningrat mengirimkan surat ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat Belitung berupa persembahan uang sebenar 20 ribu rupiah dan sebungkus pakaian. Surat itu ditujukan kepada Burhan sebagai Ketua Pusat Panitia Penyokong Pembangunan Yogyakarta di Tanjungpandan. Tak lama kemudian, pada tanggal 4 April 1950 Presiden Republik Indonesia Serikat menyatakan Dewan Billiton tidak representatif. Daerah Belitung selanjutnya dihapus sebagai daerah bagian Republik Indonesia Serikat dan menggabungkan daerah Belitung kepada Republik Indonesia. Pada 14 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 10 Provinsi, salah satunya Sumatera Selatan. Wilayah Provinsi Sumsel kala itu meliputi Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Akhirnya pada 14 September 1950 Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta mengunjungi Pulau Belitung untuk pertama kalinya dan disambut meriah oleh ribuan masyarakat yang berkumpul di Padang Miring (sekarang Gedung Nasional), Tanjungpandan.

b. Belitung Menjadi Satu Kabupaten

Pengaturan wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pada tahun 1952. Sebuah tim dibentuk dengan nama Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom Propinsi Sumatera Selatan (PPKO) tanggal 20 Mei 1952. Hasil kerja tim tersebut mengusulkan Bangka dan

Belitung menjadi satu kabupaten yakni Kabupaten Bangka-Belitung. Wilayahnya dibagi menjadi 7 kewedanaan yakni Bangka Tengah, Sungai Liat, Bangka Utara, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Barat, dan Belitung Timur. Namun usulan tersebut diganti setelah mendengar sejumlah aspirasi dari Bangka dan Belitung. Kemudian melalui Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan No: GB/3/29/1/25 tanggal 9 Mei 1951 ditetapkan daerah Bangka dan Belitung menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung.

Mengenai pembagian wilayah Kabupaten Belitung diatur dalam Surat Keputusan Residen Bangka dan Belitung tanggal 26 Mei 1953 No. 84. Kabupaten Belitung dibagi menjadi dua kewedanaan yakni Kewedanaan Belitung Barat dan Kewedanaan Belitung Timur. Belitung Barat terdiri dari dua kecamatan yakni Tanjungpandan dan Membalong. Sedangkan 18 Haminte atau kelurahan yang dulu berada dalam wilayah Tanjungpandan digabungkan menjadi Negeri Tanjungpandan dan 9 haminte di Kecamatan Membalong menjadi Negeri Belantu. Belitung Timur dibagi menjadi dua kewedanaan yakni Manggar dan Gantung. Adapun 10 haminte dalam kecamatan Manggar digabungkan menjadi Negeri Manggar dan 10 haminte di Kecamatan Gantung digabungkan menjadi Negeri Gantung.

Pada tanggal 14 November 1956 nama daerah Billiton diubah menjadi Kabupaten Belitung dengan ibukota di Tanjungpandan. Perubahan ini berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Selatan. Perubahan itu kemudian ditetapkan lagi ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 pada tanggal 26 Juni 1959.

Pada tahun 1964 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 tentang Penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan. Pada tahun 1969 Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung terbagi menjadi empat kecamatan, empat marga, dan 54 dusun. Empat kecamatan tersebut yakni Tanjung Pandan, Membalong, Manggar, dan Gantung. Sedangkan empat pemerintahan marga tersebut yakni Kenegerian Tanjungpandan, Kenegerian Membalong, Kenegerian Manggar, dan Kenegerian Belantu. Kenegerian Tanjungpandan terdiri atas 24 dusun, Membalong 9 dusun, Manggar 9 dusun, dan Gantung 9 dusun. Tahun 1983 terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 142/KPTS/III/1983 Penghapusan Pemerintahan Marga. Maka terhitung sejak 4 April 1983 Pemerintahan Marga di Belitung dalam bentuk Kenegerian dihapuskan. Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Belitung kemudian dibagi menjadi empat kecamatan dan 54 desa.

Dalam Tahun 1983 wilayah Kabupaten Belitung dibagi menjadi empat kecamatan dan 3 perwakilan kecamatan. Rinciannya yakni Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Membalong, Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Perwakilan Kecamatan Selat Nasik, Perwakilan Kecamatan Simpang Pesak, dan Perwakilan Kecamatan Kelapa

Kampit. Pada tanggal 24 September 1986 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1986 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Dengan demikian Kabupaten Belitung menjadi enam kecamatan yakni Tanjungpandan, Membalong, Manggar, Gantung, Kelapa Kampit dan Dendang ditambah satu Perwakilan Kecamatan Selat Nasik. Tahun 1989 dibentuk lagi dua perwakilan kecamatan yakni Badau dan Sijuk.

Tahun 2000 tiga perwakilan kecamatan ditingkatkan menjadi kecamatan. Akhirnya Kabupaten Belitung terbagi menjadi sembilan kecamatan yakni Tanjungpandan, Membalong, Manggar, Gantung, Kelapa Kampit, Dendang, Selat Nasik, Badau, dan Sijuk. Susunan sembilan kecamatan ini bertahan hingga awal tahun 2003 dengan 69 desa dan 2 kelurahan.

c. Pembentukan Belitung Timur

Pada tanggal 4 Desember 2000 ditetapkan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Provinsi ke-31 di Republik Indonesia ini meliputi Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkalpinang. Selanjutnya dilakukan pemekaran dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 25 Februari 2003. Undang-Undang ini merupakan UU Inisiatif DPR RI yang disetujui oleh Wakil Ketua DPR RI Sutardjo Suryoguritno pada tanggal 27 Januari 2003 di Jakarta. Tanggal 'ketok palu' rancangan UU No.5 tahun 2003 pada 27 Januari 2003 akhirnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur.

Saat awal terbentuk, Kabupaten Belitung Timur terdiri dari empat kecamatan yakni Kelapa Kampit, Manggar, Gantung, dan Dendang. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2010 ditetapkan Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Simpang Pesak. Hingga tahun 2021 Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi 7 kecamatan dengan 39 desa. Sedangkan letak ibukotanya sejak awal terbentuk tetap berkedudukan di Manggar.

Terbentuknya Kabupaten Belitung Timur adalah berkat perjuangan dan kebersamaan berbagai elemen masyarakat baik melalui wadah Forum Masyarakat Peduli (FORMAP), Ikatan Sarjana Belitung Timur (ISBT) dengan menggelar seminar.

Kemudian terbentuklah Komite Pembentukan Kabupaten Belitung Timur yang dipimpin oleh Zahari MZ selaku Ketua Komite dan Drs. Jafri selaku Sekretaris Komite Pembentukan Belitung Timur. Seluruh rangkaian prosesnya melibatkan peran berbagai elemen masyarakat seperti PPRM, Pemuka Adat, LSM, para jurnalis, Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggota DPRD Belitung dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta DPR RI.



**CITRA KABUPATEN BELITUNG
DALAM ARSIP**



Geografis



Secara geografis Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS dengan luas seluruhnya 229.369 ha atau kurang lebih 2.293,69 km². Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama BILLITONIT yang bergaris tengah Timur-Barat + 79 km dan garis tengah Utara-Selatan + 77 km. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Cina Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil. Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2006 antara 3,3 mm sampai 691,6 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai 30 hari setiap bulannya.

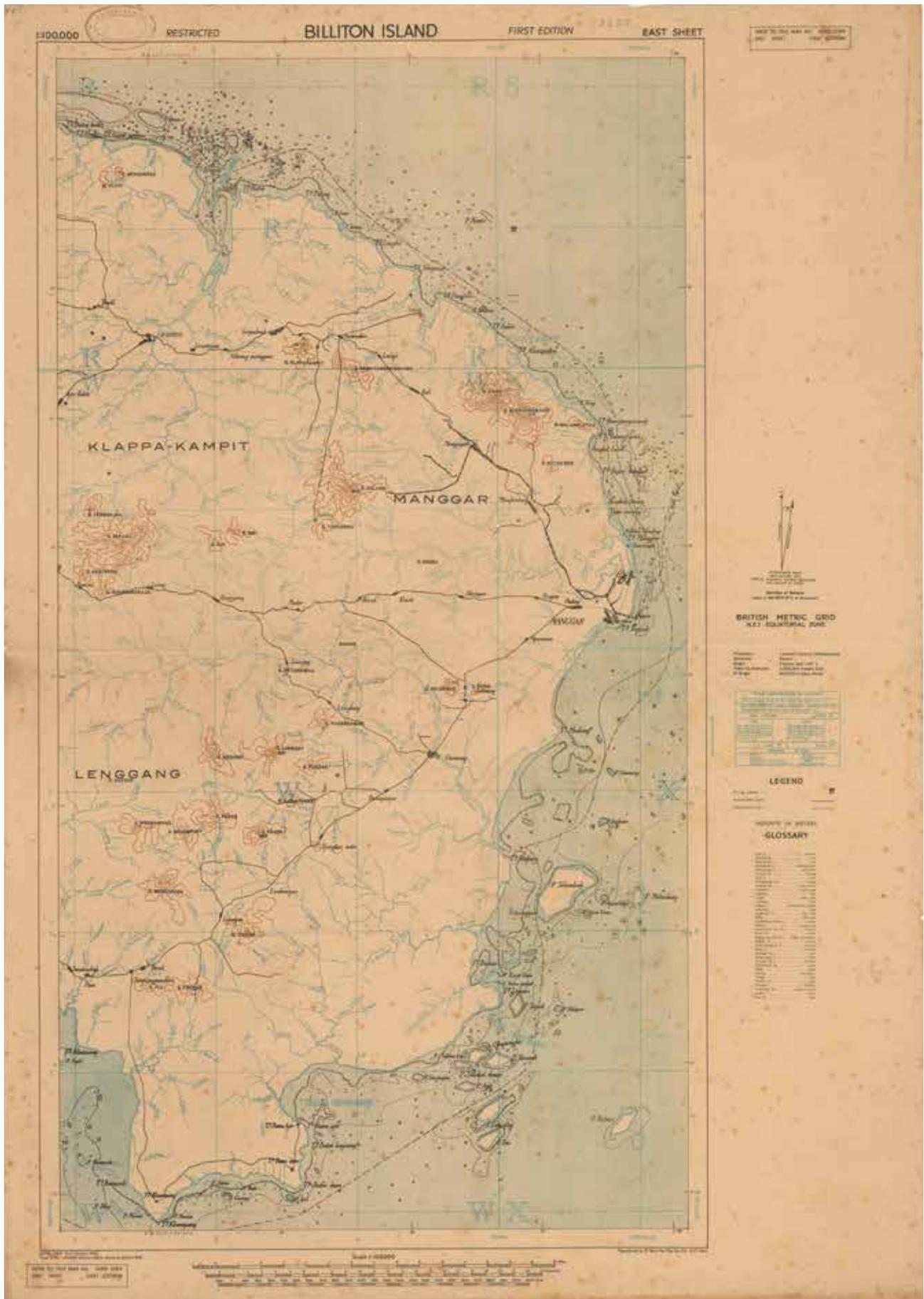
Curah Hujan tertinggi pada tahun 2006 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 691,6 mm. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2006 bervariasi antara 24,0 ° C sampai 27,9 ° C, dimana kelembaban udaranya bervariasi antara 81% sampai 92%, dan tekanan udara antara 1009,1 mb sampai dengan 1011,8 mb. Mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni:

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala & Kembiri
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Kondisi topografi Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, dimana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.



Peta Pulau Belitung, 1944.
 Sumber: ID-ANRI KG2 118-2254A Kartografi Indonesia - Belitung

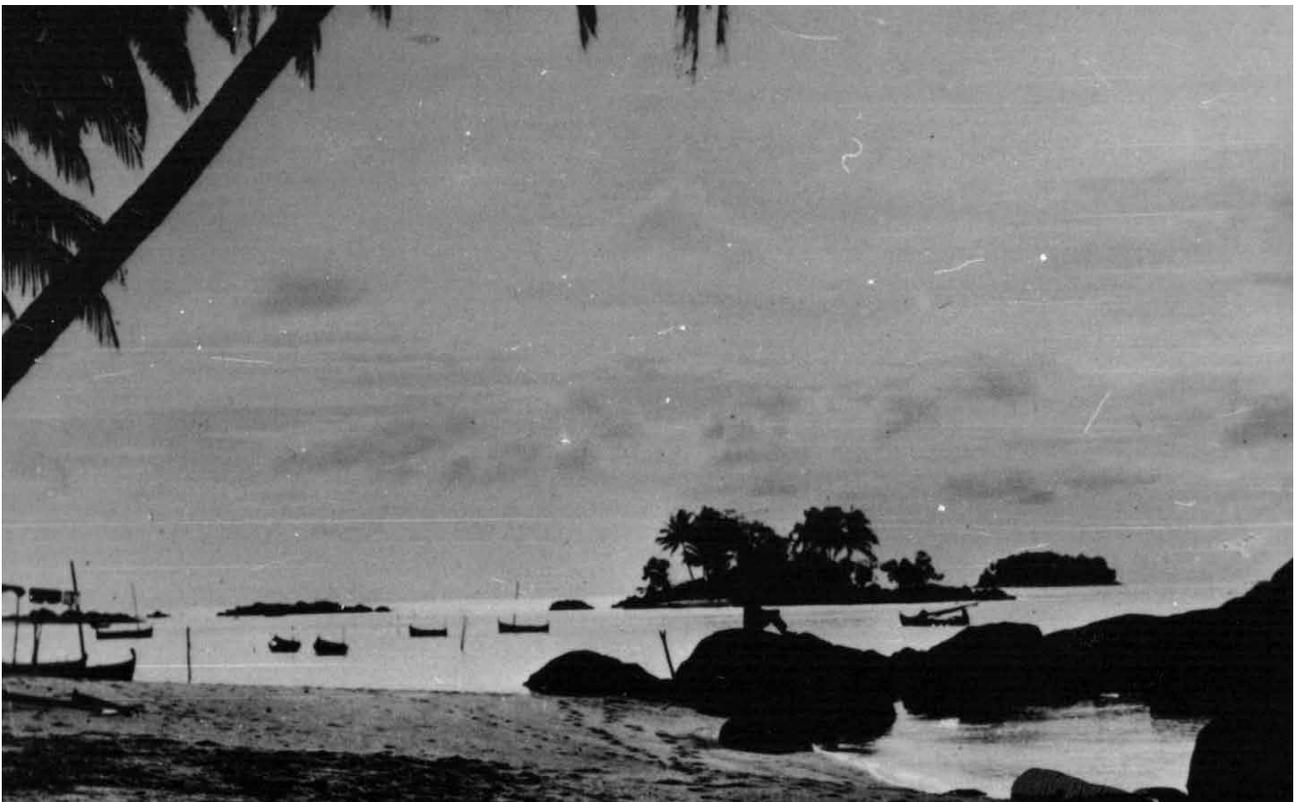


Peta Pulau Belitung, 1944.

Sumber: ID-ANRI KG2 118-2255 Kartografi Indonesia - Belitung



Air terjun di Gunung Tajem, Pulau Biliton, 1927.
Sumber: ANRI, KIT No. 0952/043



Pemandangan di Pantai Tanjungbinga,
Pulau Belitung, [1930].
Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 944-69



Air terjun di Gunung Tadjem, Pulau Belitung, 1950.

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 944-69

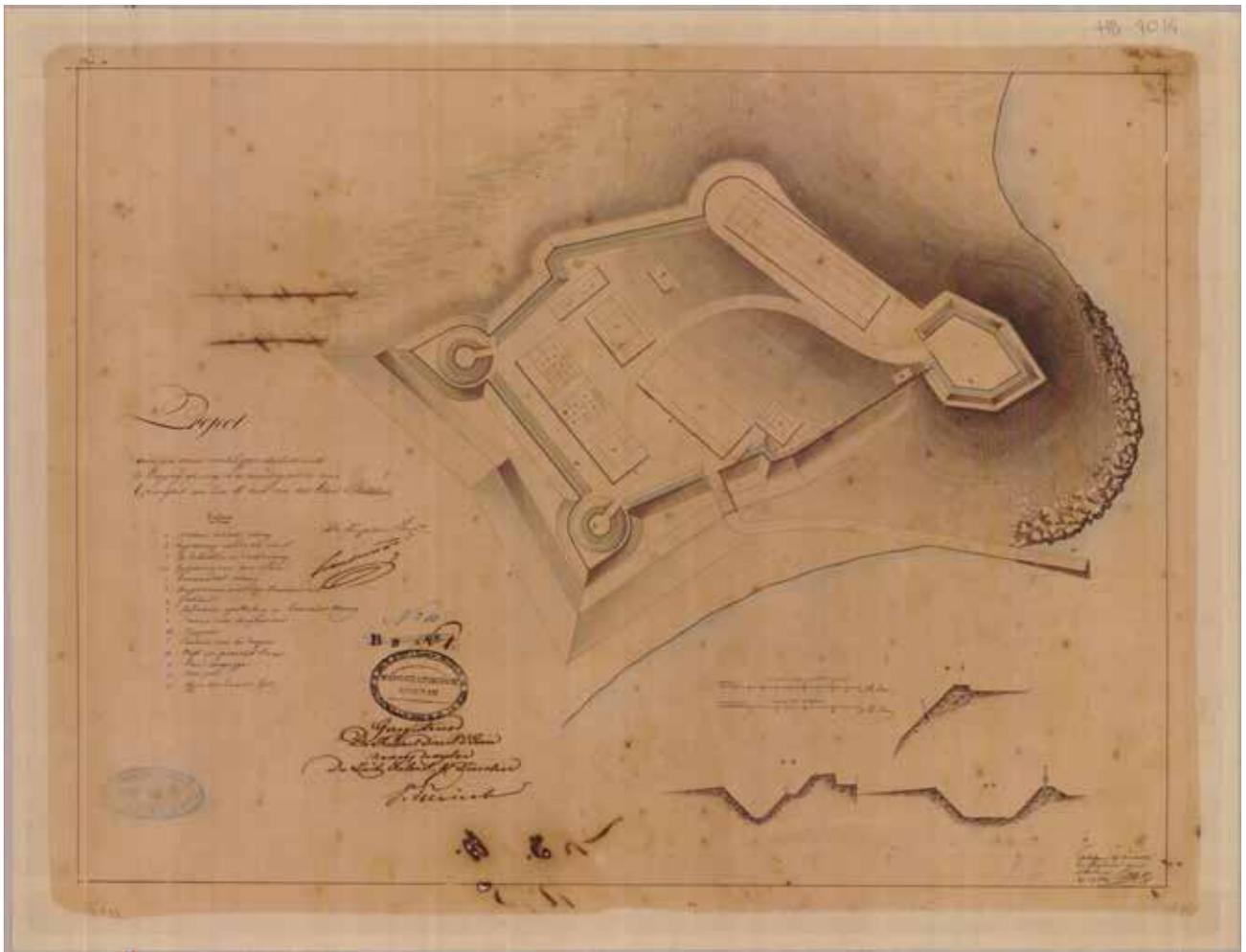
Politik dan Pemerintahan



Pulau Belitung sebagai bagian dari Residensi Bangka - Belitung, beberapa tahun lamanya pernah menjadi bagian dari Gewest Borneo, kemudian menjadi bagian Gewest Bangka - Belitung dan Riau. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena muncul peraturan yang mengubah Pulau Belitung menjadi Neolanchap. Selanjutnya sebagai badan pemerintahan dibentuklah Dewan Belitung pada tahun 1947. Pada waktu pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), Neolanchap Belitung merupakan negara tersendiri, bahkan karena sesuatu hal tidak menjadi negara bagian. Tahun 1950 Belitung dipisahkan dari RIS dan digabungkan dalam Republik Indonesia. Pulau Belitung menjadi sebuah kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Selatan dibawah kekuasaan militer, karena pada waktu itu Sumatera Selatan merupakan Daerah Militer Istimewa. Sesudah berakhirnya pemerintahan militer, Belitung kembali menjadi kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati.

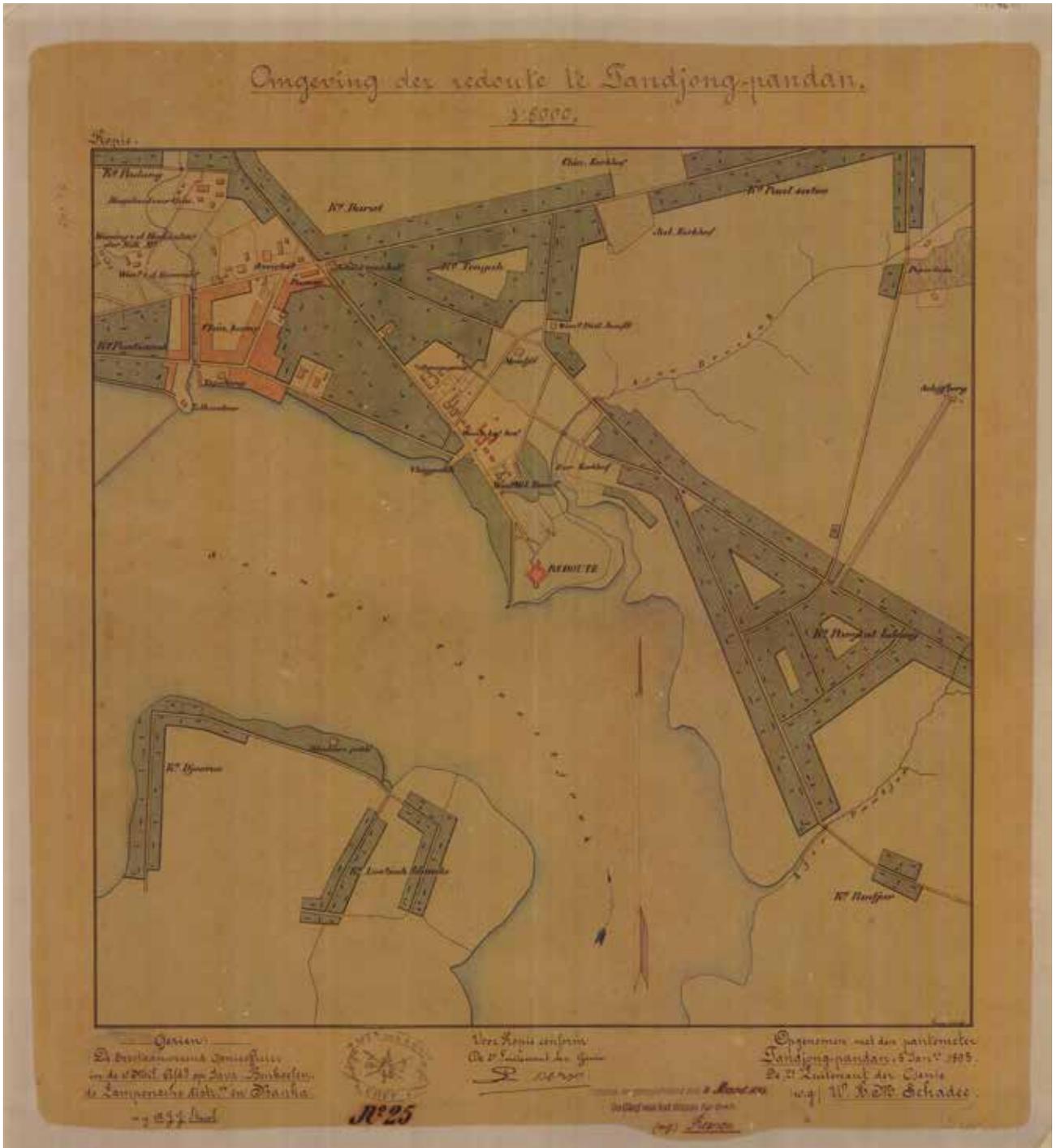
Pada tanggal 21 November 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Pulau Belitung bersama dengan Pulau Bangka memekarkan diri dan membentuk satu provinsi baru dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini merupakan provinsi ke-31 di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan setelah melalui berbagai pertimbangan, Kabupaten Belitung memekarkan diri menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung beribukota di Tanjungpandan dengan cakupan wilayah meliputi 5 kecamatan dan Kabupaten Belitung Timur dengan Manggar sebagai ibukotanya dengan cakupan wilayah meliputi 4 kecamatan.

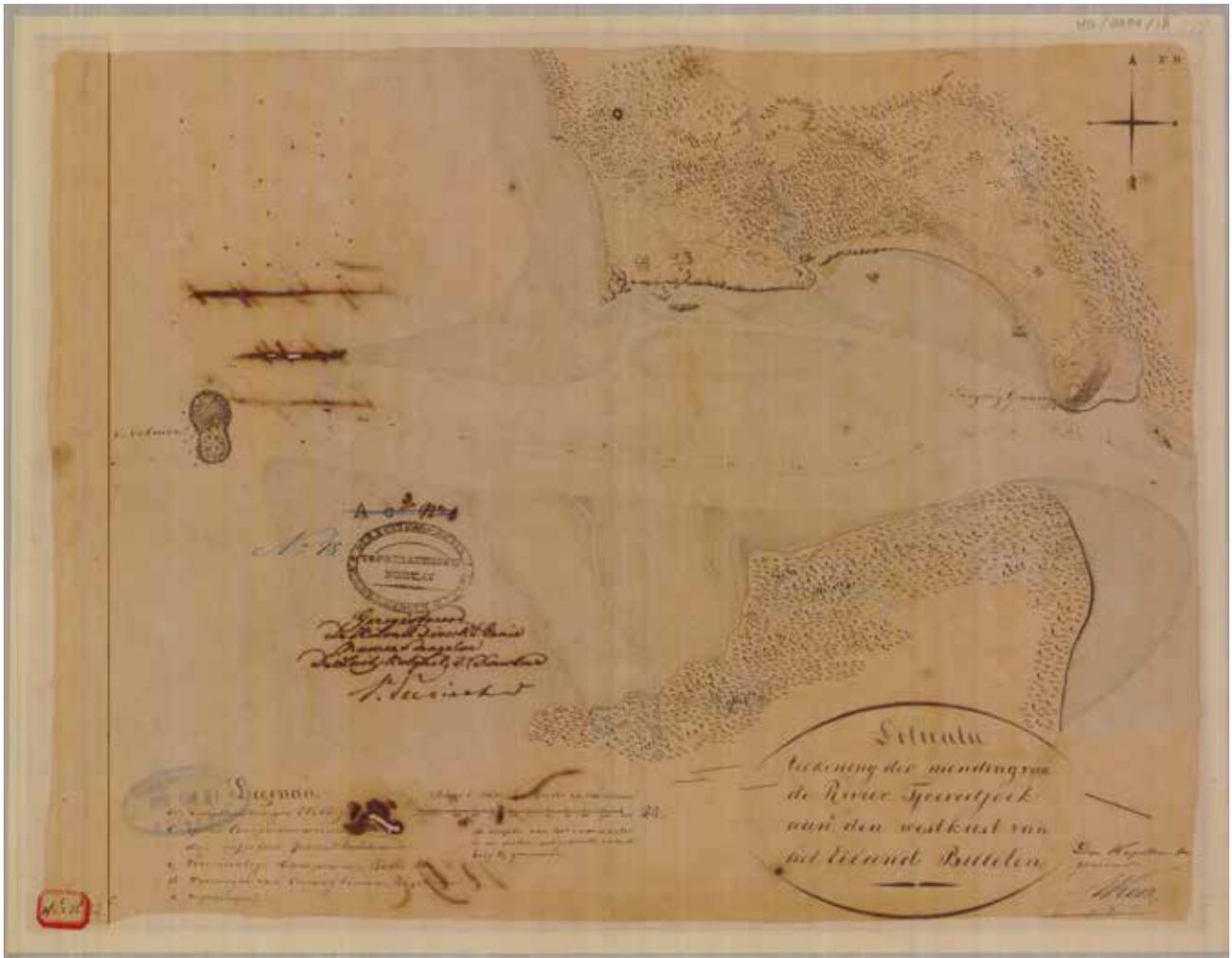


Gambar denah situasi proyek pembangunan benteng di Oejoeng Goenong, muara sungai Tjoeroetjoek, Pantai Barat Pulau Billiton (2 Gambar, 1 Plattegrond, 1 Situatie). 1824.08.00

Sumber: ANRI, HB. 4014



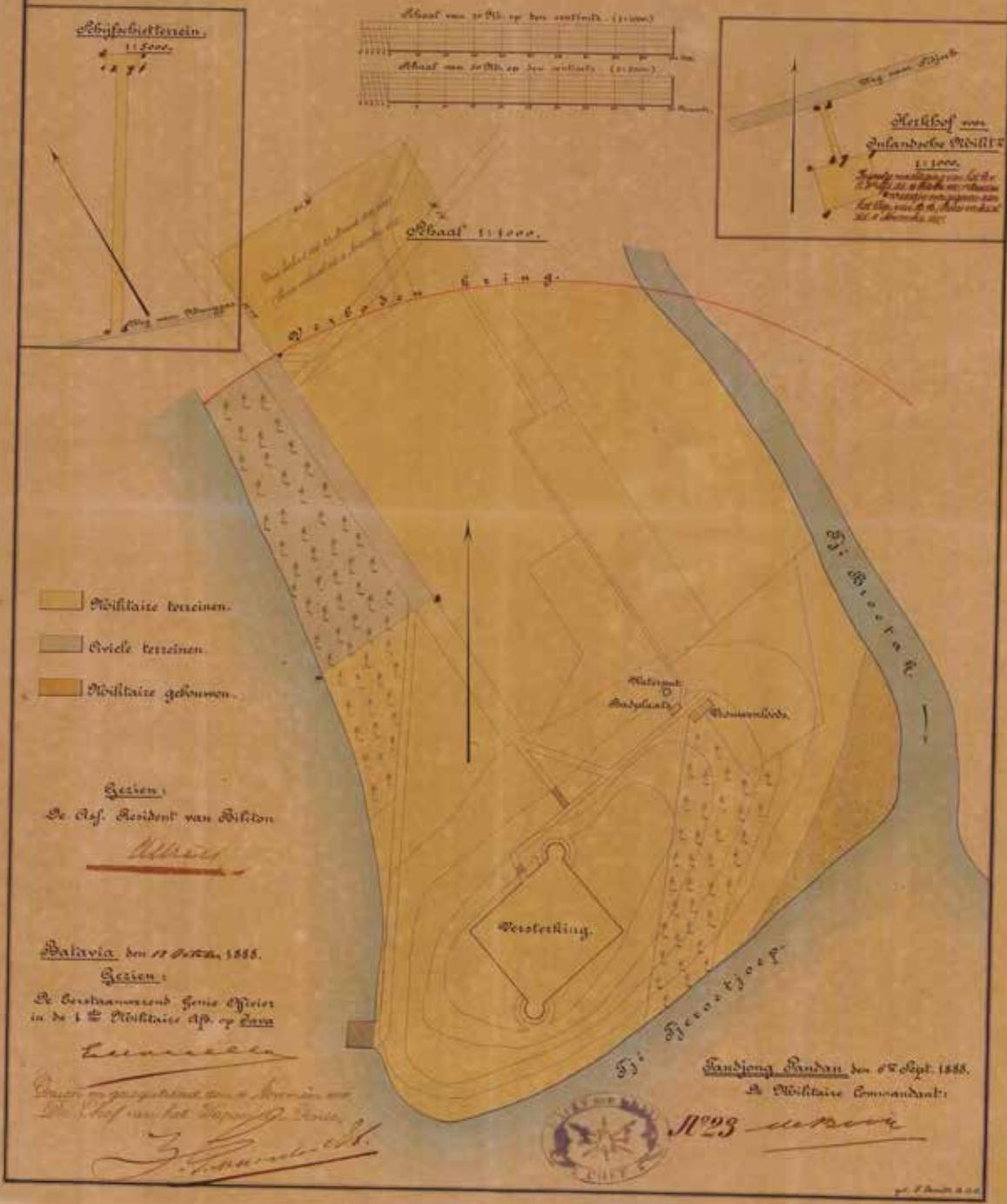
Gambar denah situasi sekitar benteng di Tandjongpandan, 1893.03.04
 Sumber: ANRI, HB. 4651



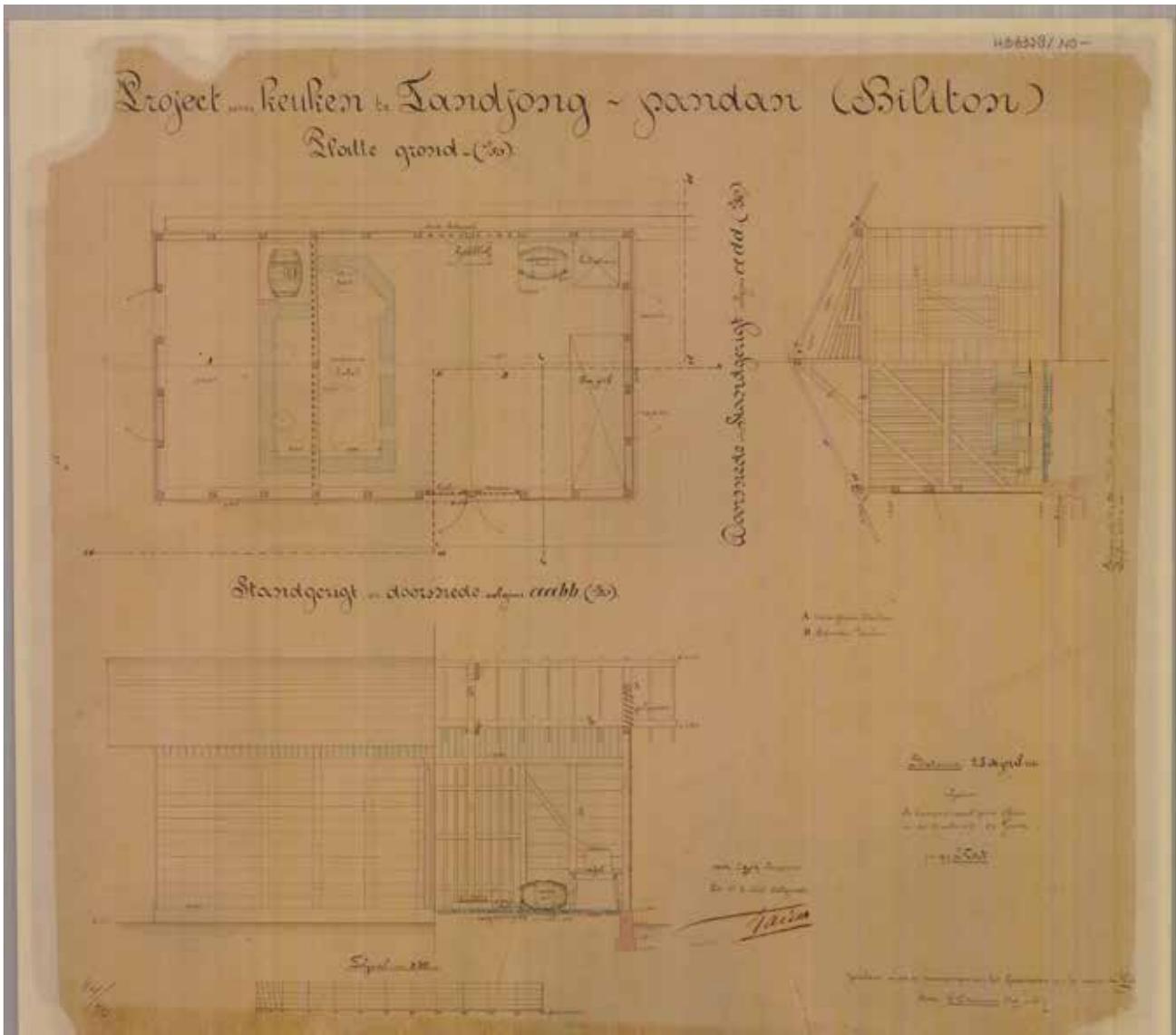
Gambar denah situasi mulut sungai Tjoeroecoek di pantai barat Pulau Billiton.

Sumber: ANRI, HB. 5954

Kaart van de Militaire terreinen te Tandjong Pandan.

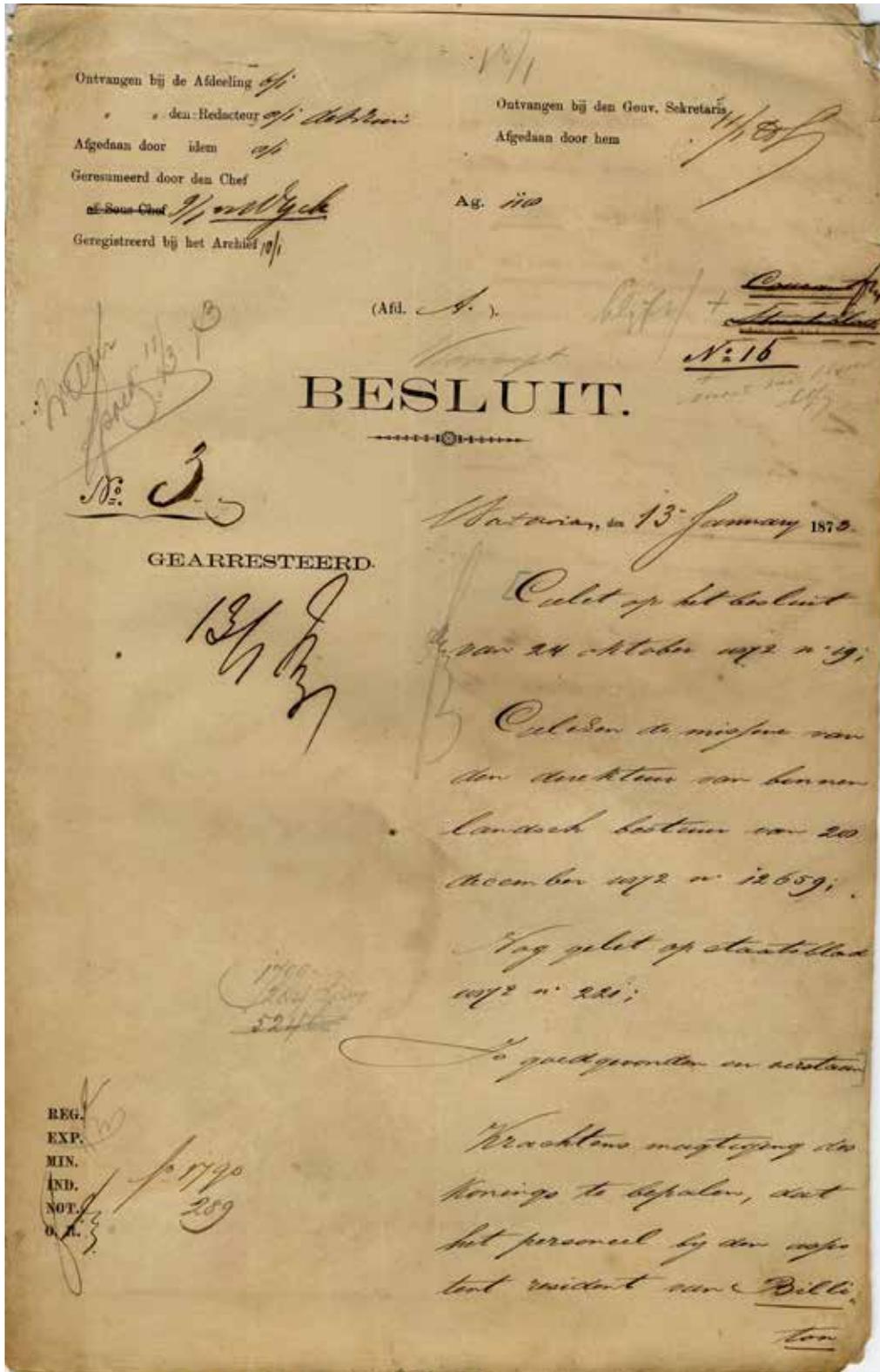


Peta kawasan Militer di Tandjong Pandan
 (3 Gambar; 3 Situatie). 1888.11.14
 Sumber: ANRI, HB. 4019

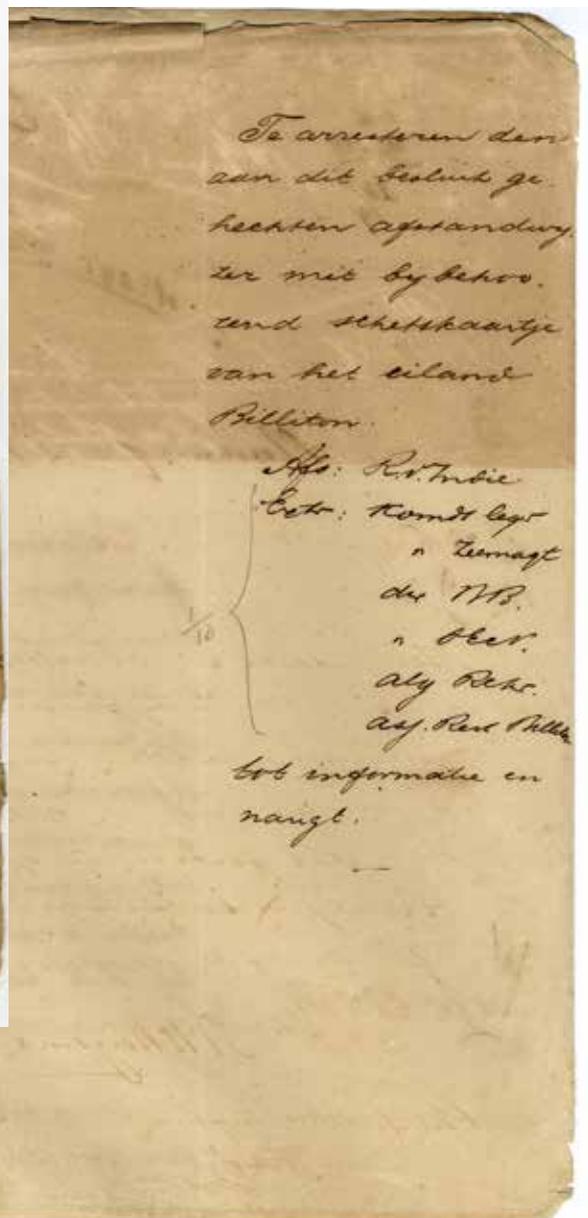
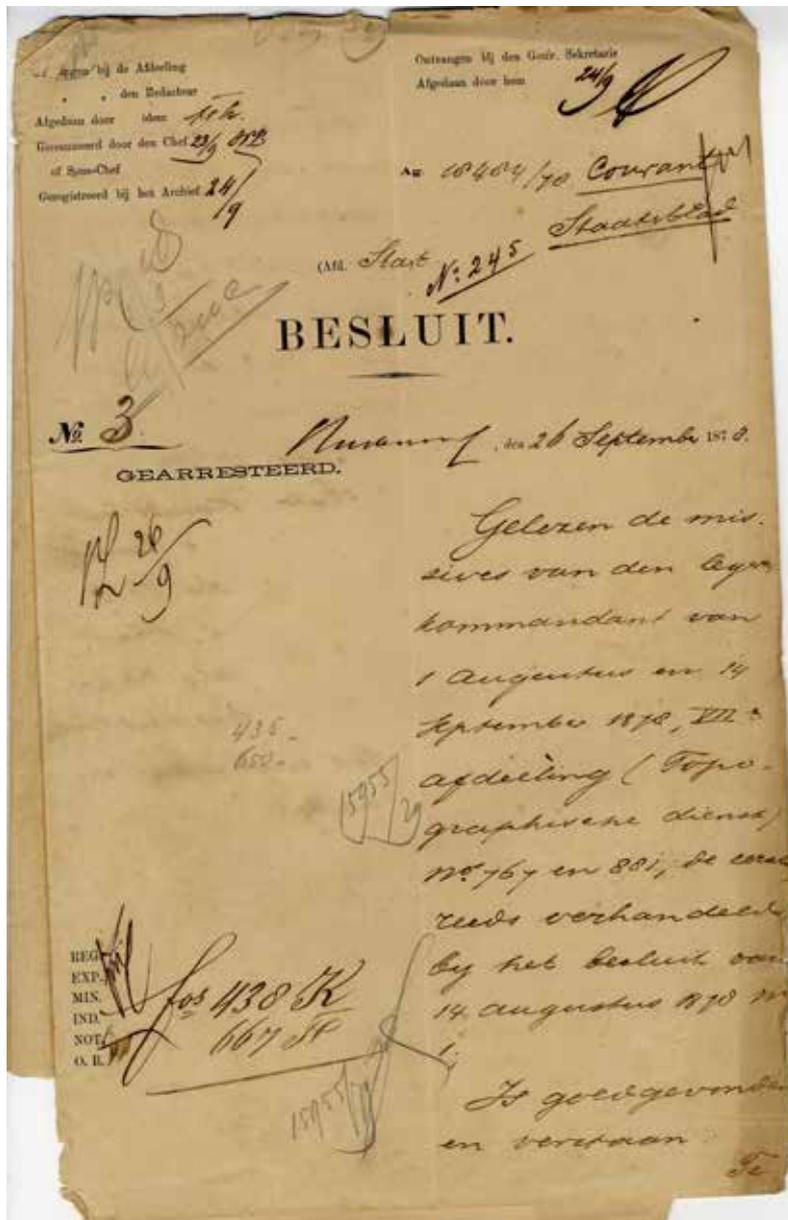


Gambar konstruksi pembangunan dapur pada kamp militer di Tandjong Pandan Billiton (3 gambar: 1 Plattegrond, 1 Standgezigt, 1 Doorsnede), 10 Mei 1876.

Sumber: ANRI, HB. 6328



Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 3 tanggal 13 Januari 1873 tentang kenaikan gaji bagi pegawai dan juru tulis di Kantor Asisten Residen Billiton sebesar 150 gulden /tahun, 13 Januari 1873.
 Sumber: ANRI, Besluit 13 Januari 1873 No. 3



Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 3 tentang pengesahan batas wilayah Kepulauan Billiton, 26 September 1878.

Sumber: ANRI, Besluit 26 September 1878 No. 3

Amalcedin.

AFSCHRIFT van het Besluit van den Resident van Bangka en Billiton .-

Nó. 9/Au.-

PANGKALPINANG, 13 Februari 1940.-

DE RESIDENT VAN BANGKA EN BILLITON.

Gelezen het schrijven van den Gouverneur van Sumatra te Medan van 26 Januari 1940 No.296/F.Z.19; zomede de daarbij overgelegde opgave van toegestane credieten ten behoeve kantoorkosten van het Inlandsch Bestuur in de residentie Bangka en Billiton;

Gelet op het Gouvernementsbesluit van 16 December 1939 No. 20 (Staatsblad 1939 No.709);

Heeft besloten :

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te

- a. Pangkalpinang
- b. Soengeiliat
- c. Belinjoe
- d. Koba
- e. Muntok
- f. Tandjongpandan

te machtigen om voor het eerste halfjaar 1940 te beschikken over een som van ten hoogste:

- a. / 45.- (vijf en veertig gulden)
- b. / 15.- (vijftien gulden)
- c. / 15.- (vijftien gulden)
- d. / 30.- (dertig gulden)
- e. / 30.- (dertig gulden)
- f. / 30.- (dertig gulden)

voor het doen van materiele uitgaven nl. kantoorkosten ten behoeve van het Inlandsch bestuur in de onderafdeeling:

- a. Midden-Bangka
- b. Soengeiliat
- c. Noord-Bangka
- d. Zuid-Bangka
- e. West-Bangka
- f. Billiton;

onder aanteekening, dat de uit dit besluit voortvloeiende uitgaven sullen worden gebracht ten laste van sub-artikel 4A.4.2.1b. van hoofdstuk II van de afdeeling IV A der begrooting voor 1940.

AFSCHRIFT dezes zal worden verleend aan de Algemeene Rekenkamer, den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, den Resident van Palembang (Centraalkantoor voor de Comptabiliteit) te Palembang en de Hoofden van Plaatselijk Bestuur in de residentie Bangka en Billiton tot inlichting en bericht.-

Stemt overeen met voorzeggd Besluit:
De Residentie-Secretaris.

A A N

den Directeur van Binnenlandsch Bestuur

te

Batavia-Centrum.

Keputusan Residen Bangka dan Biliton tentang penempatan kepala pemerintahan di Pangkalpinang, Sungailiat, Belinyu, Koba, Muntok dan Tanjungpandan, 13 Februari 1940.

Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 410

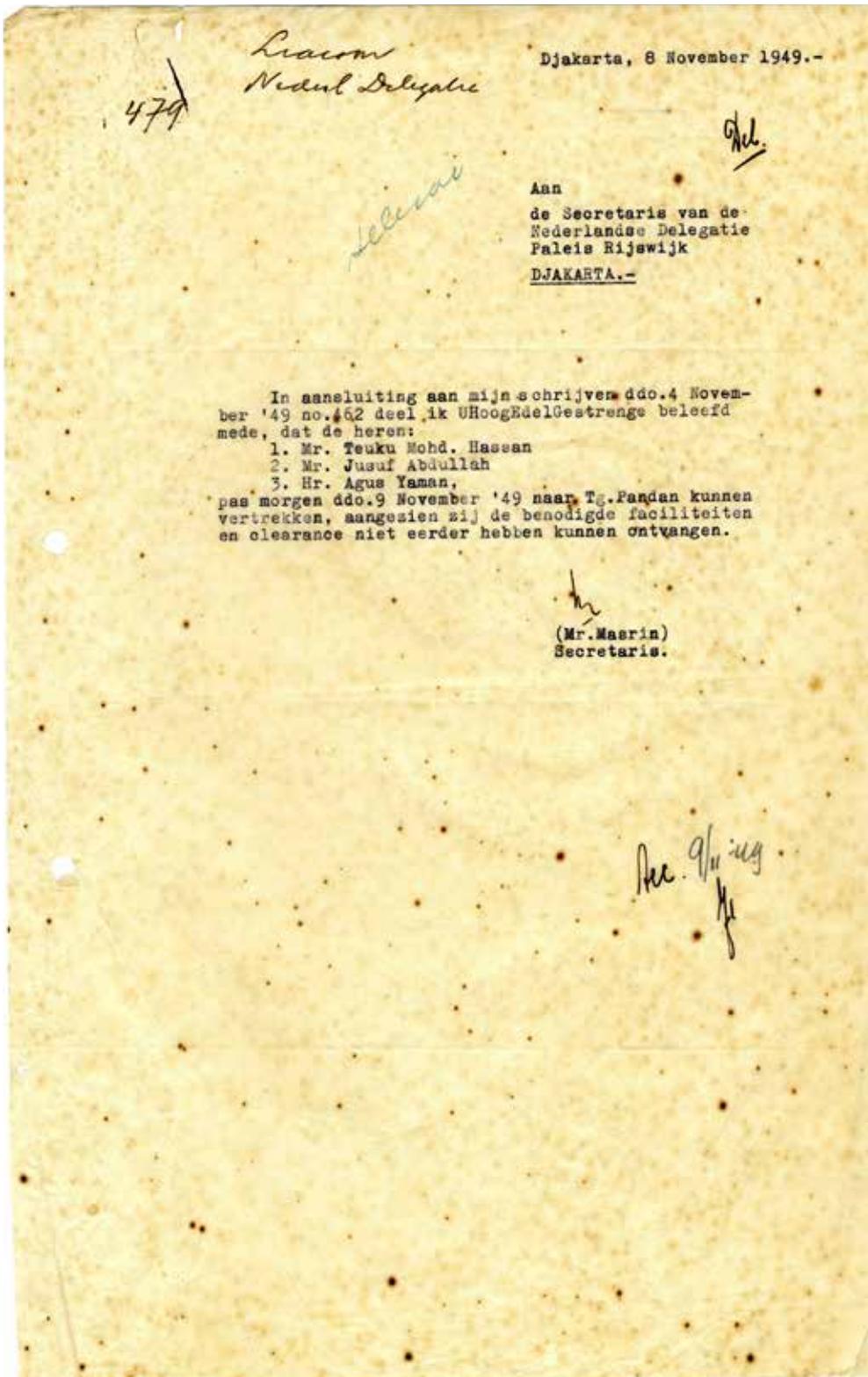


Stempel Kerajaan Balok, Belitung berbahan logam, bertuliskan Depati Tjakraningrat Billiton. Depati Tjakra Ningrat adalah gelar yang disandang oleh Depati sebagai seorang penguasa, 1921.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



Stempel Asisten Residen Belitung yang terbuat dari logam ini bertuliskan Assistent Resident van Billiton. Jabatan ini dimulai untuk pertama kalinya di Belitung pada tahun 1822 dan berakhir hingga pendudukan Jepang tahun 1942.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



Surat dari Mr. Masrin (Sekretaris Delegasi Indonesia) kepada Sekretaris Delegasi Nederland mengenai permintaan clearance dan fasilitas untuk Mr. Teuku Mohammad Hasan, Mr. Jusuf Abdullah dan Hr. Agus Yaman yang akan ke Tanjungpandan, 8 November 1949.

Sumber: ANRI, *Delegasi Indonesia No. 1089*



Kunjungan kerja Presiden Sukarno ke Tanjungpandan, 14 September 1950. Sukarno beserta pilot dan armada di Lapangan Bulu Tumbang Tanjung Pandan. Presiden Sukarno ke Belitung menggunakan pesawat dan tiba di bandara Bulutumbang pada pagi hari. Bersamanya juga ikut serta Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dari bandara kemudian rombongan Presiden menuju Padang Miring (sekarang menjadi Gedung Nasional di Tanjungpandan) untuk memberikan pidato.

Sumber: ANRI, Kempen No. 501329



Presiden Sukarno tiba di Tanjung Pandan dalam rangka Kunjungan Kerja ke Belitung dan tampak tengah memeriksa barisan di Lapangan Terbang Bulu Tumbang. Tanjung Pandan, 13 September 1950.

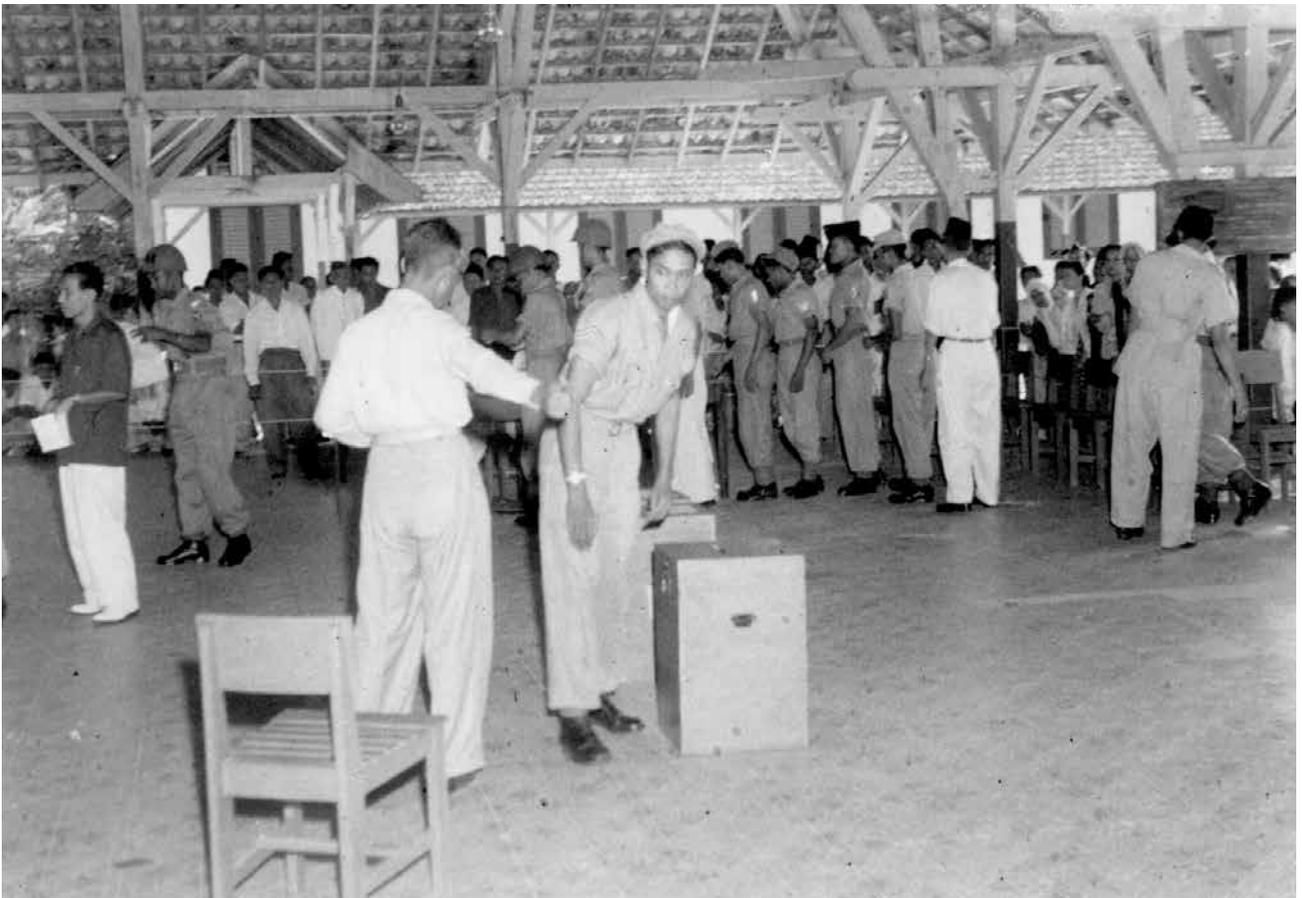
Sumber: ANRI, Kempen Sumsel No. 1569, 1572, 1573





Wakil Presiden Mohammad Hatta diantar Gubernur Sumatera Selatan, Mohammad Isa, ke Lapangan Udara Tanjungpandan, Belitung, saat akan kembali ke Jakarta, 17 Juli 1954. Sebelumnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta sempat berpidato pada Rapat Umum di Sungailiat, Bangka dan meninjau pabrik timah di kepulauan Bangka-Belitung.

Sumber: ANRI, Kempen No.540717 EE 4



Situasi pemilihan umum tahun 1955 di Kab. Belitung dimana salah satu pemilih anggota tentara sesudah mempergunakan hak pilihnya, dipersilahkan untuk keluar melalui pintu keluar TPS. Kota Tanjungpandan, Kab. Belitung, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen Sumsel 1950 1967 (3748)



Pameran Jepenkab (Jawatan Penerangan Kabupaten)
Belitung di Tanjung Pandan, 16 agustus 1957.

Sumber: ANRI, Kempen Sumsel 1950-1967 (3214)



Masyarakat umum melihat-lihat pameran Jepenkab (Jawatan Penerangan Kabupaten) di Tanjung Pandan, 16 agustus 1957.

Sumber: ANRI, Kempen Sumsel 1950-1967 (3212)



Suasana Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpandan, Desember 1957.
Sumber: ANRI, Kempen (14)



Pendukung kembali ke UUD 45 di
Tanjungpandan, 1 Desember 1957.
Sumber: ANRI, Kempen Sumsel 1050-1967 (3781)





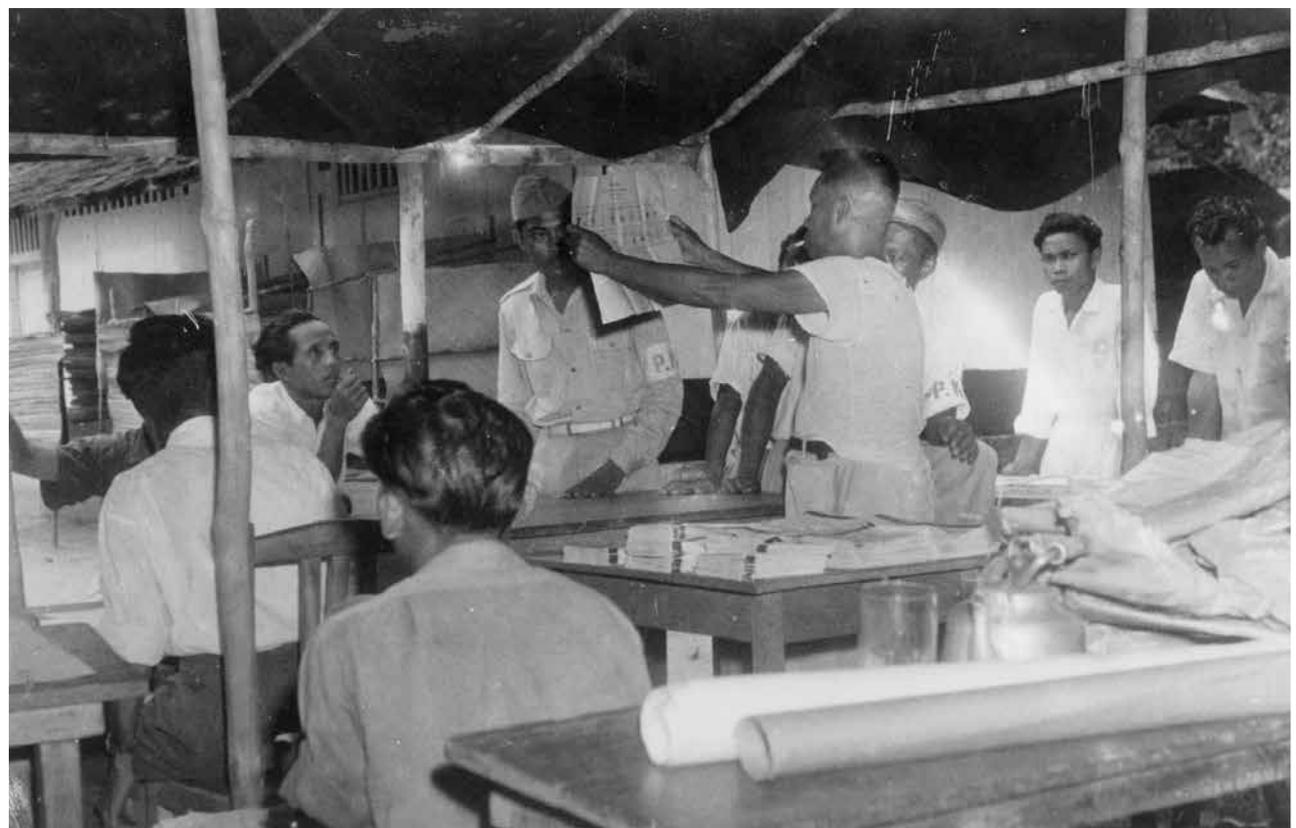
Slogan patriotisme berisikan “Belanda! mau selamat? Tinggalkan Irian Barat” terpasang di sebuah jalan daerah Tanjung Pandan, Tahun 1958.
Sumber: ANRI, Kempen Sumsel No 3039



Penandatanganan formulir pemilihan anggota konstituante aksi Irian Barat di Tanjung Pandan, 1958.
Sumber: ANRI, KEMPEN SUMSEL 1950-1967 (3058)



Panitia pemilihan anggota konstituante di Tanjung Pandan sedang membacakan beberapa partai, 1958.
Sumber: ANRI, Kempen Sumsel 1950-1967 (3041)



Panitia pemilihan anggota konstituante di Tanjung Pandan sedang memberikan arahan pada peserta calon pemilih, 1958.

Sumber: ANRI, Kempen Sulsel 1950-1967 (3042)



Seorang wanita sedang memasukkan surat suara ke kotak suara saat pemilihan anggota konsituante, 1958.
Sumber: ANRI, KEMPEN SUMSEL 1950-1967 (3060, 3061)



Dukungan kembali ke UUD'45,
di Tanjung Pandan, 19 April 1959.

Sumber: ANRI, KEMPEN SUMSEL 1950-1967 (3780, 3782)



Kunjungan Kepala Kepolisian Negara, R.S. Sukanto ke Tanjung Pandan, Belitung, 25 September 1959.
Sumber: ANRI, Kempen A kunjungan Ka Pol001



Foto mengenai pembangunan hari veteran ke III, Tanjung Pandan, Tahun 1959/1960.
Sumber: ANRI, KEMPEN SUMSEL No. 3220



Duta Besar Bolivia untuk Inggris, DR. Manuel Barau, mendengarkan penjelasan Dr. Osberger tentang maket tambang timah di Museum PN Tambang Timah Belitung, saat kunjungannya ke Belitung pada tanggal 16-19 Desember 1962.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



Stempel Kapitan Ho A Yun, yang mengepalai orang-orang Cina di Billiton, pada paruh kedua abad ke-19.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung

Keagamaan



Berdasarkan data penduduk menurut agama Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2017, mayoritas penduduk Belitung beragama Islam dengan jumlah 148.328 (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan) orang, sedangkan penduduk yang lain beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu. (Sumber : <https://portal.belitung.go.id/sosial-budaya/4>)

Akulturasasi dan toleransi pada masyarakat Belitung terefleksikan pada tinggalkan budaya materialnya. Beberapa kerajaan lokal pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Belitung. Institusi kerajaan yang pertama muncul dari bagian tengah pulau Belitung pada suatu tempat yang kini bernama Pelulusan, sekitar abad XVI. Kerajaan yang pertama di Belitung yaitu Kerajaan Badau, dirintis oleh seorang bangsawan Majapahit bernama Datuk Moyang Geresik, di kaki Gunung Badau, sekitar abad XVI. Kerajaan lokal lainnya yaitu Kerajaan Balok yang dirintis oleh Ronggo Udo alias Kyai Ronggo, pada akhir abad XVI.

Putri Kyai Ronggo, Nyi Ayu Siti Kusuma, dinikahi oleh seorang bangsawan Mataram Islam bernama Kyai Mashud yang datang ke Belitung pada awal abad XVII. Islam pertama kali masuk ke Belitung bersamaan dengan kedatangan pendiri-pendiri kerajaan pertama di Belitung, Datuk Moyang Geresik, pendiri Kerajaan Badau berasal dari daerah Gresik, Jawa Timur, tempat ditemukannya makam Islam pertama di Indonesia. Menurut Ki Djohar, Datuk Moyang Geresik juga pernah berguru pada Sunan Giri. Makam Datuk Moyang Geresik yang terletak di puncak Gunung Lilangan menunjukkan pengaruh tersebut. Sementara itu Kyai Mashud yang kemudian menjadi Depati Tjakraningrat I adalah seorang bangsawan keturunan Mataram Islam di Jawa Tengah. Namun pada periode ini, ajaran Islam belum tersebar secara luas.

Beberapa makam kuno yang ditemukan di berbagai tempat di Belitung; diantaranya Tuk Bidare Pute di Gunung Riting, Tuk Semandi di Aik Batu Buding, Tuk Pasip di Padang Kelarin, Sungai Padang, merupakan makam-makam penyebar Islam lainnya. Masjid pertama dibangun di Badau, dipelopori oleh Syech Abubakar Abdullah. Kemudian di Belantu dan Buding. Masjid Belantu diperkirakan terletak di Situs Balai Lu, Gunung Riting di mana masih ditemukan fragmen gerabah yang menyerupai kemuncak masjid.



Mesjid Jamik Tanjungpandan ketika sedang dipugar pada akhir dekade 1960. Rintisan pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1868, dan selesai tahun 1870. Bentuk lamanya masih memperlihatkan ciri arsitektur mesjid-mesjid kuno di Indonesia yaitu beratap tumpang.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



Mesjid Jamik Tanjungpandan (kini Masjid Al Maburr) sekitar tahun 1970. Masjid ini terletak di permukiman keturunan Depati Belitung, karena itu dinamakan Kampong Raje (Kampung Raja). Disebut pula Kampong Ume karena sebelum dibuka oleh KA Muhammad Saleh (Depati Tjakraningrat IX) pada tahun 1854, kawasan ini merupakan Ume (huma/ladang).

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung

Sosial Budaya



Masyarakat Belitung yang bermacam-macam etnis telah sekian lama berbaur dan bisa hidup berdampingan. Keanekaragaman adat istiadat yang ada membuat pulau Belitung begitu kaya akan seni budaya. Masyarakat Belitung pada umumnya terdiri dari berbagai suku seperti melayu, tionghoa, bugis dan berbagai suku lainnya. meskipun didominasi oleh suku melayu, namun demikian untuk perkembangan seni budaya dari masing-masing suku tetap terpelihara dengan baik.

Adat istiadat yang dilakukan biasanya dilakukan per periode mengikuti perhitungan waktu seperti nirok nanggok yang dilakukan pada musim kemarau atau Maras Taun yang diadakan pada musim panen begitu juga ceng beng yang diadakan satu tahun sekali oleh penduduk tionghoa. Tidak hanya itu, budaya tradisional sebagai hiburan rakyatpun telah turun-temurun memberikan ciri khas di setiap desa/tempat seperti drama tradisional masyarakat dul muluk dari desa Membalong dan permainan lesong panjang dan musik stambul dari pulau selat nasik. Keseimbangan antara kategori budaya ini membuat hubungan masyarakat semakin erat satu dengan yang lainnya.



Para lurah mengenakan pakaian adat Melayu Belitung sewaktu menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Fock (1921-1926) yang berkunjung ke Billiton pada tanggal 25 September 1925.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung





Ornamen di jalan masuk tempat
perkumpulan tambang timah di
Tanjungpandan, Pulau Belitung,
Sumatera Selatan, [1930]

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 490-84



Areal pemakaman di Tanjungpandan, Pulau Belitung,
Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 817-4



Penampilan Kesenian Tradisional Beripat Beregong pada event Sail Indonesia 2010. Kesenian Beripat Beregong merupakan olahraga tradisional, yg dimainkan oleh satu atau beberapa pasang pemain yg saling memukul (beripat) menggunakan rotan, berdasarkan aturan tertentu. Permainan ini diiringi alunan gong (beregong).

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung



Penampilan Kesenian Tradisional Lesong Panjang pada event Sail Indonesia 2010. Kesenian Lesong Panjang dimainkan pada saat Ritual Maras Taun (Upacara panen padi). Permainan ini menggunakan sebuah lesong (lesung) panjang dan beberapa alu (alat pemukul) yang dipukul seirama menurut aturan tertentu, sehingga menghasilkan suara yang saling berpadu.

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung



Prosesi mengantar perahu (Jong) dalam ritual Muang Jong Suku Sawang Belitung, pada event Sail Indonesia 2010. Ritual Muang Jong merupakan ritual adat suku Sawang (suku laut) Belitung, yg dilaksanakan setiap tahun sebagai simbol pengharapan akan keselamatan dalam mengarungi lautan. Puncak ritual ini adalah melepas perahu (Jong) kecil berhias dan ancak (sesaji) ke laut lepas, yang diiringi dengan tarian dan nyanyian khas suku Sawang.

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung



Pariwisata



Dikenal dengan sebutan Negeri Laskar Pelangi, Kabupaten Belitung memiliki begitu banyak keindahan alam baik perbukitan, pegunungan, pulau dan lautnya. Hal ini menjadikan Pulau Belitung sebagai salah satu pilihan wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Hal ini menunjukkan gambaran perkembangan positif. Perkembangan ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak dari meningkatnya sarana dan prasarana objek wisata dan promosi yang dilakukan serta hasil program dan kegiatan pariwisata lainnya.

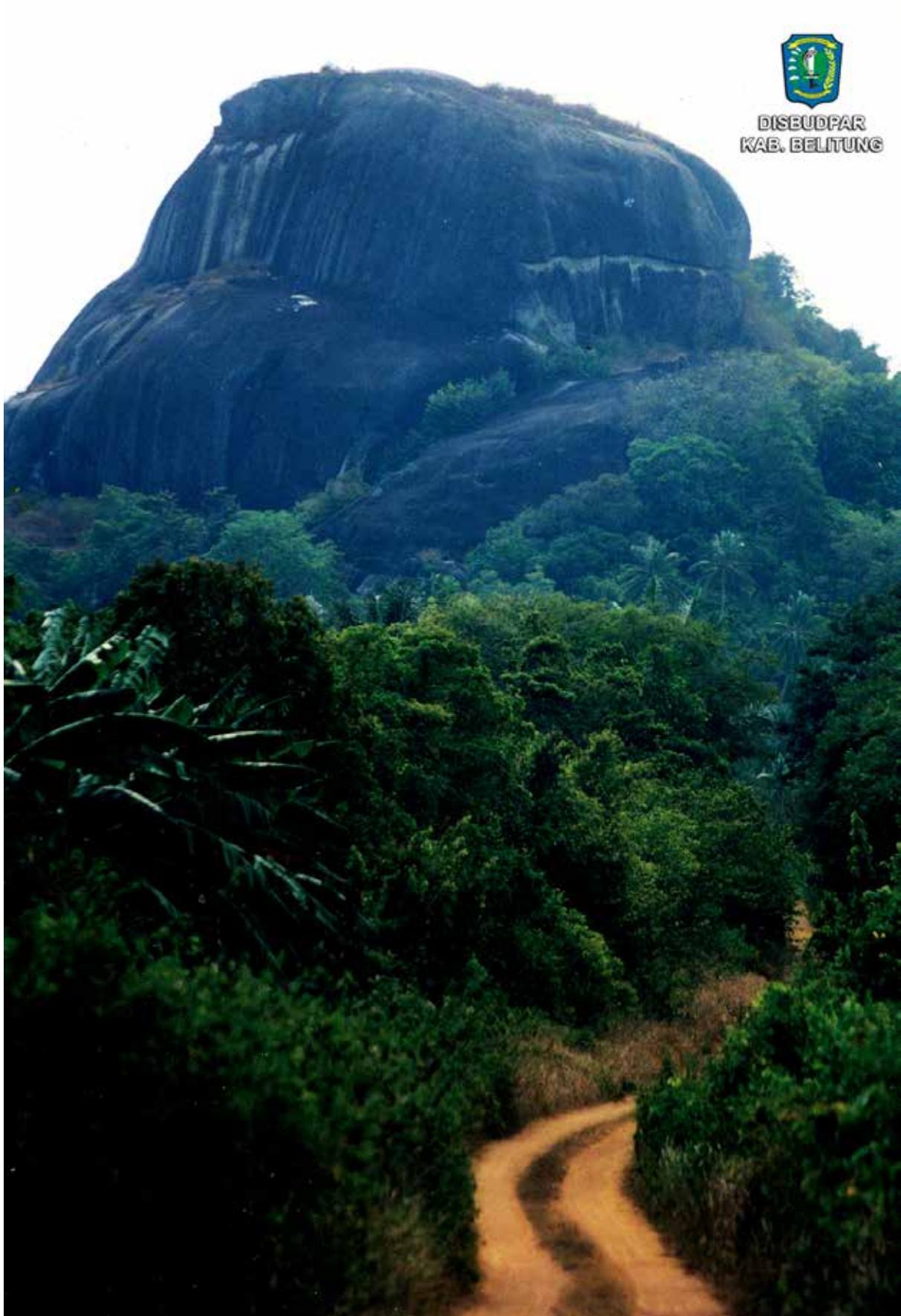


Duta Besar Bolivia untuk Inggris, DR. Manuel Barau, berwisata ke Pantai Tanjung Kelayang, saat kunjungannya ke Belitung pada tanggal 16-19 Desember 1962.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



Villa di Pantai Tanjung Kelayang pada tahun 1970-an.
Pembangunan fasilitas wisata di pantai ini dimulai pada masa
kepemimpinan Bupati HAS Hanandjoeddin (1967-1972).
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



Batu Baginde di Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, pada tahun 2010. Kini menjadi salah satu *geosite* dari Belitong *Unesco Global Geopark*.
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung



Batu Garuda di perairan Tanjung Kelayang, tahun 2010. Kini termasuk geosite dari Belitung *Unesco Global Geopark*.

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung



Mercusuar Pulau Lengkuas di perairan Tanjung Kelayang, pada tahun 2010. Mercusuar ini dibangun Belanda tahun 1883 dan kini termasuk kawasan *geosite* Tanjung Kelayang, pada Belitong *Unesco Global Geopark*.
Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Belitung



Bupati Belitong Ir. H. Darmansyah Husein bersama partisipan Sail Indonesia 2010 berfoto di Rumah Adat Belitung dengan latar pelaminan perkawinan adat Belitung. Pada tahun 2010, untuk keempat kalinya Kabupaten Belitung terpilih sebagai salah satu destinasi Sail Indonesia. Sail Indonesia sendiri merupakan kegiatan turnamen reli *yacht* tahunan yang terkait dengan tujuan wisata di Indonesia.
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung



Bupati Belitung Ir. H. Darmansyah Husein (2009-2013) mempersilahkan perwakilan peserta Sail Indonesia 2010 untuk mengunyah 'Sirih Pinang' sebagai simbol penyambutan kepada tamu.
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung



Pusat Kota Tanjungpandan dengan tugu batu satam dan logo Kabupaten di Taman Kota, pada tahun 2010.

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung

Pendidikan dan Olahraga



Pendidikan merupakan urusan strategis menyangkut pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Belitung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia didalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan didalam pembangunan di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya serta bidang-bidang lainnya. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan yaitu adanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Melalui program dan kegiatan pada urusan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Belitung mengarahkan pembangunan pendidikan untuk :

1. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang terjangkau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peningkatan ketersediaan dan mutu bahan ajar berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Peningkatan ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Optimalisasi dukungan penyelenggaraan pendidikan.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa.



Gedung HIS (Hollands Inlandse School)
di Tanjungpandan, Pulau Belitung,
Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 495-72, 495-74





Pertandingan Sepak Bola dalam rangka hari veteran ke-III di Tanjung Pandan, tahun 1959/1960.

Sumber: ANRI, KEMPEN SUMSEL 1950-1967 (3223)



Pertandingan Sepak Bola dalam rangka hari veteran ke-III di Tanjung Pandan, tahun 1959/1960.

Sumber: ANRI, KEMPEN SUMSEL 1950-1967 (3222)





Prosesi peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang pertama di Belitong, oleh Wakil (ad interim) Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tartib Prawirodihardjo, pada tanggal 18 April 1963.

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitong



Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. Abdul Gafur (1983-1988) didampingi oleh Bupati Belitung, H. Soemarsono (1981-1985), menandatangani prasasti peresmian Stadion dan GOR Tanjungpandan pada tanggal 23 Desember 1984.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



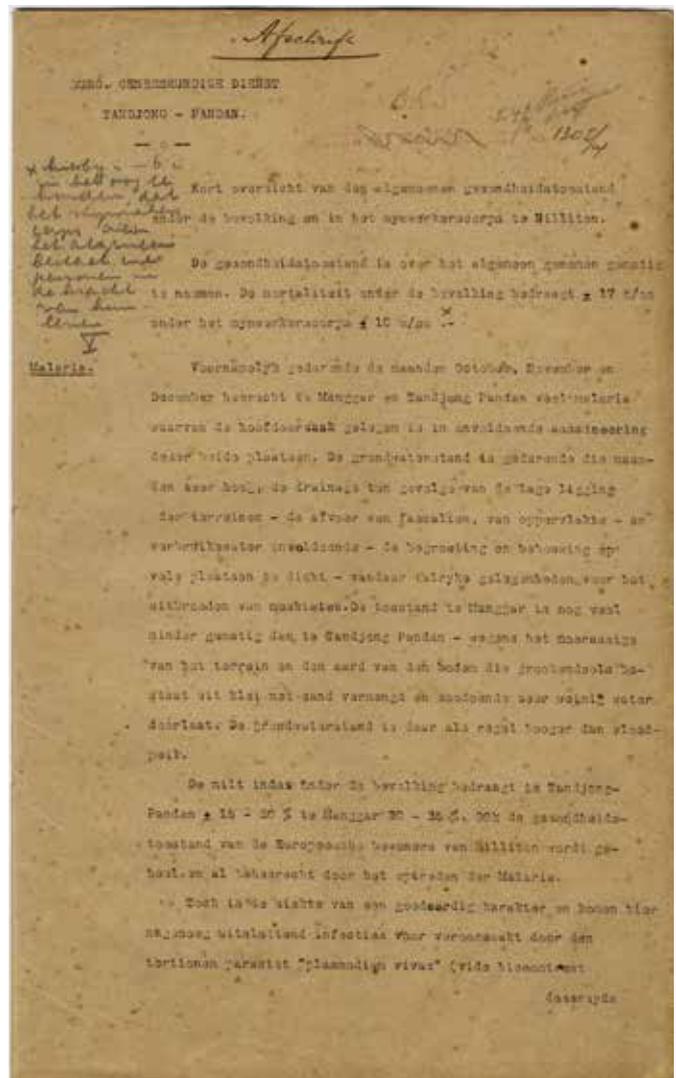
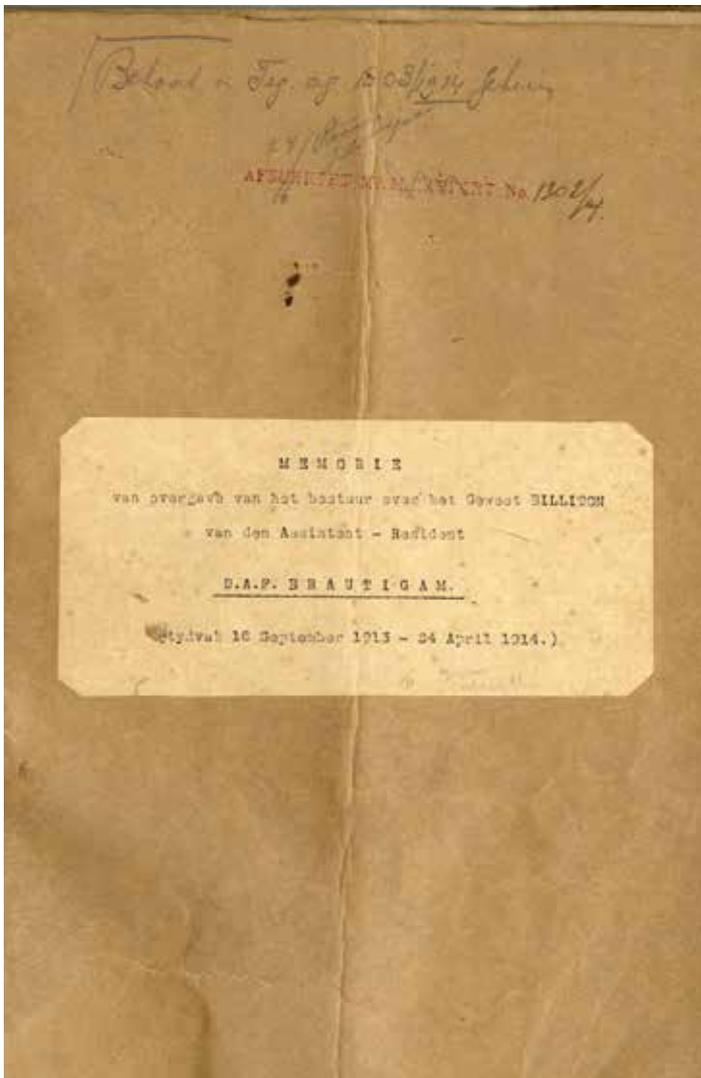
Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan saat peresmian oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. Abdul Gafur (1983-1988) pada tanggal 23 Desember 1984.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung

Kesehatan



Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berkualitas tidaknya sumberdaya manusia, oleh karena itu daerah sangat memperhatikan pembangunan kesehatan melalui pembangunan urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Belitung secara sederhana dapat dilihat melalui status kesehatan, gizi masyarakat dan pola penyakit.



Laporan singkat Direktur Kesehatan Tanjungpandan tentang kesehatan penduduk di wilayah Biliton, 17 April 1914.

Sumber: ANRI, *Memorie van Overgave Biliton 1910 - 1914*

By aansprakelykheid wegens schade van lava's op Java, komen steeds enkelf. gevallen van import - schade voor - welke evenwel door de toeziening der bestaande quarantaine bepalingen tot nu toe scheidlyk konden worden ontlikt en geïsoleerd.

Paasgevallen zyn tot nu toe niet waargenomen. Een onderzoek naar de ratten- en vloeten bevolking te Tandjong Pandan heeft evenwel de aanwezigheid van ratten en muis aangeleid op groete schaal aan het licht gebracht.

Abattoirs. Te Tandjong Pandan is het runder abattoir thans alreeds 2 jaar in gebruik. Het verbruik - abattoir moet nog worden geroevid. Ook te Manggar zal binnen afzienbare tyd een verbruik- en runder abattoir worden opgericht.

Watervoorziening. De roepstal is gedurende den drogen tyd te Manggar geheel en al onvoldoende en in de behoefte aan water te voorzien. Gedurende de maanden Juli, Augustus, September en October bereikte aldaar gedurende de laatste 3 jaar watergebrek. Om hierin te voorzien wordt nog in den loop dezes jaar door de Billiton-Maatsochappij een waterleiding aangelegd, waarvan de prijs d'een in Ajer Mengkorang aan de weg naar Gantong. Het water zal van uit sommige by fontein ook ter beschikking van de bevolking worden gesteld.

Op de oyerige plaatsen van het eiland is ook gedurende de droge maanden de watercapaciteit van den boden nog juist voldoende om in de behoefte te voorzien.

De Divisi Gemaesbaar,
(S.S.) Jannasari,
Voor gemeenschappelyk schrift,
De Assistent-Resident,
[Handwritten Signature]

Tandjong Pandan 17 April 1914.

17643

MÉMORIE van overzeggende het bestuur over het District Billiton van den Assistent-Resident D. A. F. HAUVIONG (1913-16 September 1913 - 24 April 1914).

Inleiding.

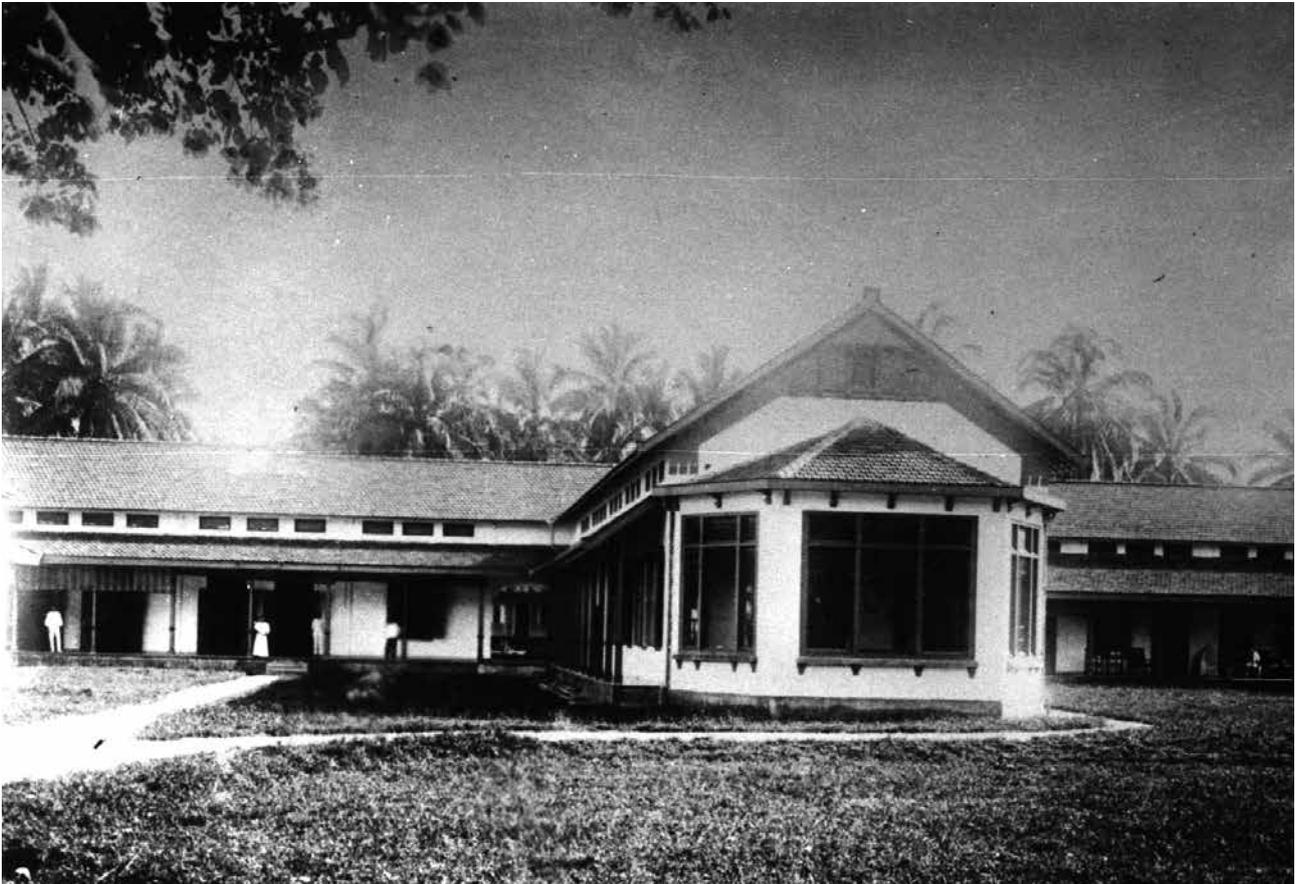
Gedurende myn kortstondig bestuur zyn de toestanden in dit gewest zagenog ongewoont gelieven, zodat ik Ynwendig heb - steeds niet in beschalingen te vervallen - myne mederie van overzeggende aansienlyk te kunnen bekorten en in hoofdzak te mogen verwyden naar de byzige memorien myner antecessoren en meer speciaal naar die van den Heer H. Orenlyk d.d. 3 April 1913.

Het door dezer Bestuurder voorgedragen systeem wordt ook door my gevolgd.

A. Verhanding tot de Billiton-Maatsochappij.

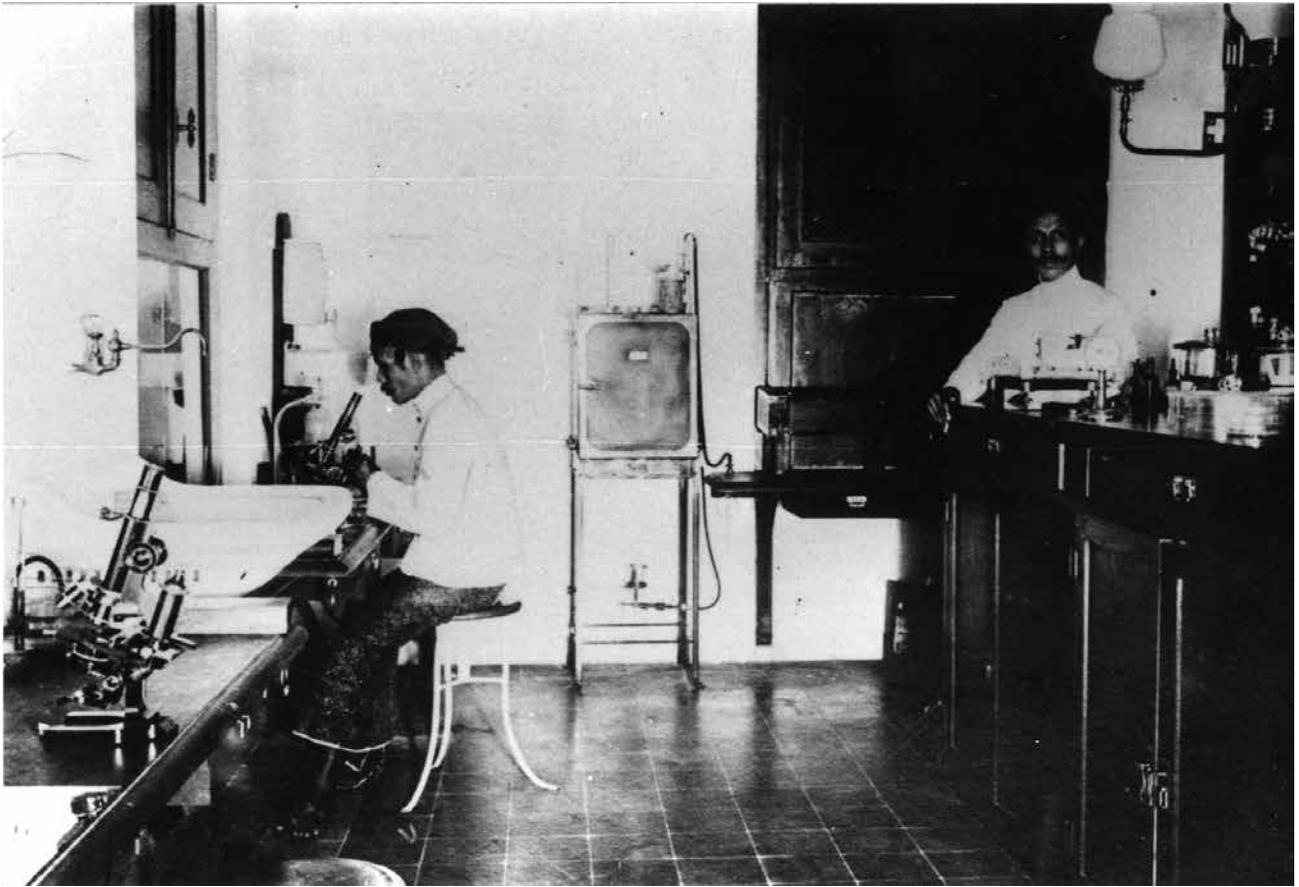
De sedert het optreden van den Assistent-Resident van Merle bestaende gelykzinnige verhouding tusschen het Bestuur en het personeel der Billiton-Maatsochappij, welke in hoofdzak te denken is aan de verantwoordelykheid van den hier gezetelden Verantwoordiger tevens Hoofd-Administrateur der Billiton-Maatsochappij, den Heer E. A. Paq, en zyne volzette en aangewyzen medier van samenwerking, bleef ook onder myn bestuur bestaan.

Ook de aansprakelyke verhouding tusschen antecessoren van het Hooversbestuur en



Rumah Sakit Tanjungpandan,
Pulau Billiton, [1930].

Sumber: ANRI, KIT No.349/004



Laboratorium Rumah Sakit Cina
di Tanjungpandan, Billiton, [1930].
Sumber: ANRI, KIT No.349/012

Ekonomi dan Industri



Bangka Belitung terkenal sebagai pulau penghasil timah dan lada. Wilayah ini merupakan bagian dari “sabuk timah” yang membentang dari Thailand, Malaysia, sampai ke Bangka Belitung, Singkep dan daerah Nusantara lainnya. Penduduk setempat menanam berbagai jenis lada, antara lain yang bernama lada kawur, lada manna dan lada putih. Keberadaan lada di Pulau Belitung tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat Belitung, khususnya Suku orang darat yang mata pencahariannya berladang. Suku ini hidup menetap dalam satu areal tempat tinggal satu keluarga besar yang juga sekaligus merupakan tempat bertani lading yang disebut dengan *keleka*’.

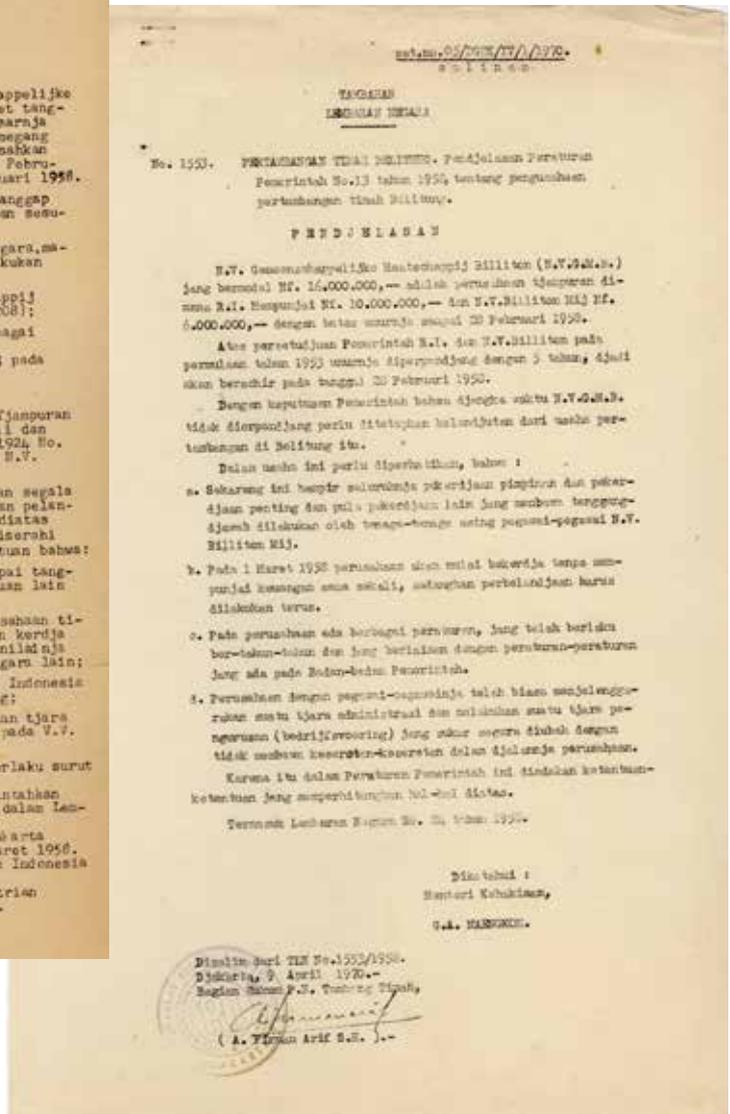
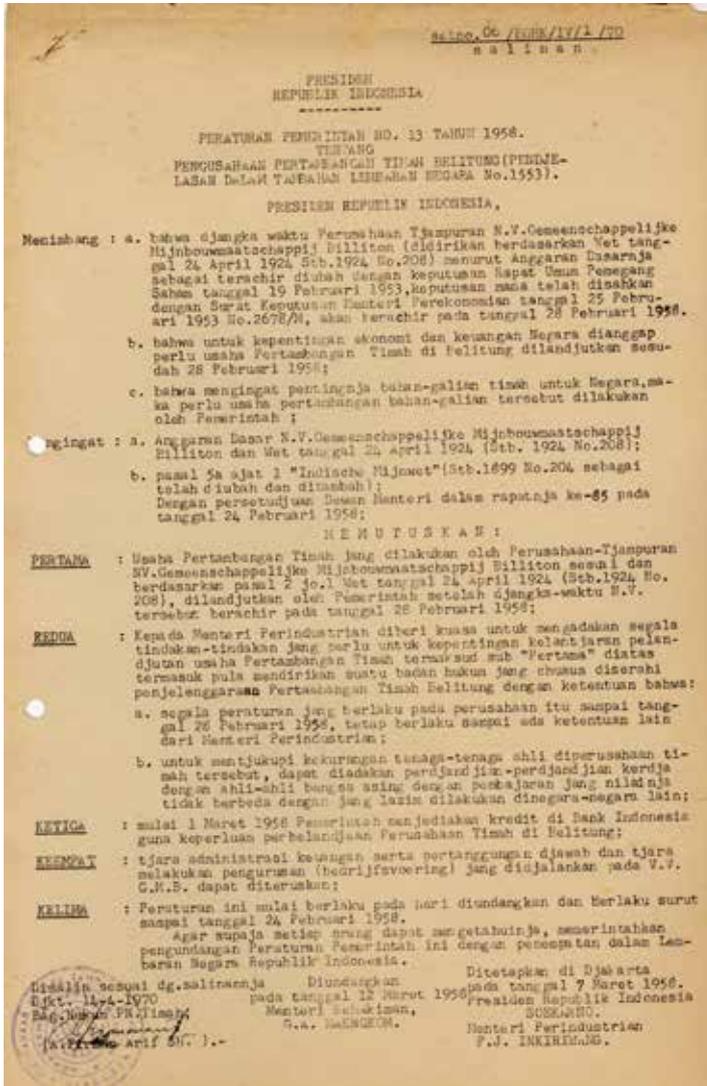
J.J. van Sevenhoven merupakan Komisararis Pemerintahan Belanda yang meninjau Pulau Belitung pada tahun 1823 memberikan laporan bahwa Belitung telah menghasilkan paku yang terbuat dari timah dengan bermacam ukuran. Kemampuan Belitung mengeksport barang dari besi diprediksi sejak sebelum abad ke-17.

Pada tahun 1852, Pemerintah Belanda mulai mengeksploitasi biji timah yang ada di Pulau Belitung (Erman, 1995: 19). Namun, jauh sebelum masa ini ketika timah di Bangka telah memasuki pasaran Eropa, sangat dimungkinkan Pulau Belitung menghasilkan timah karena pada masa itu diketahui masuknya timah ke pasar Palembang tanpa diketahui asal-usulnya.

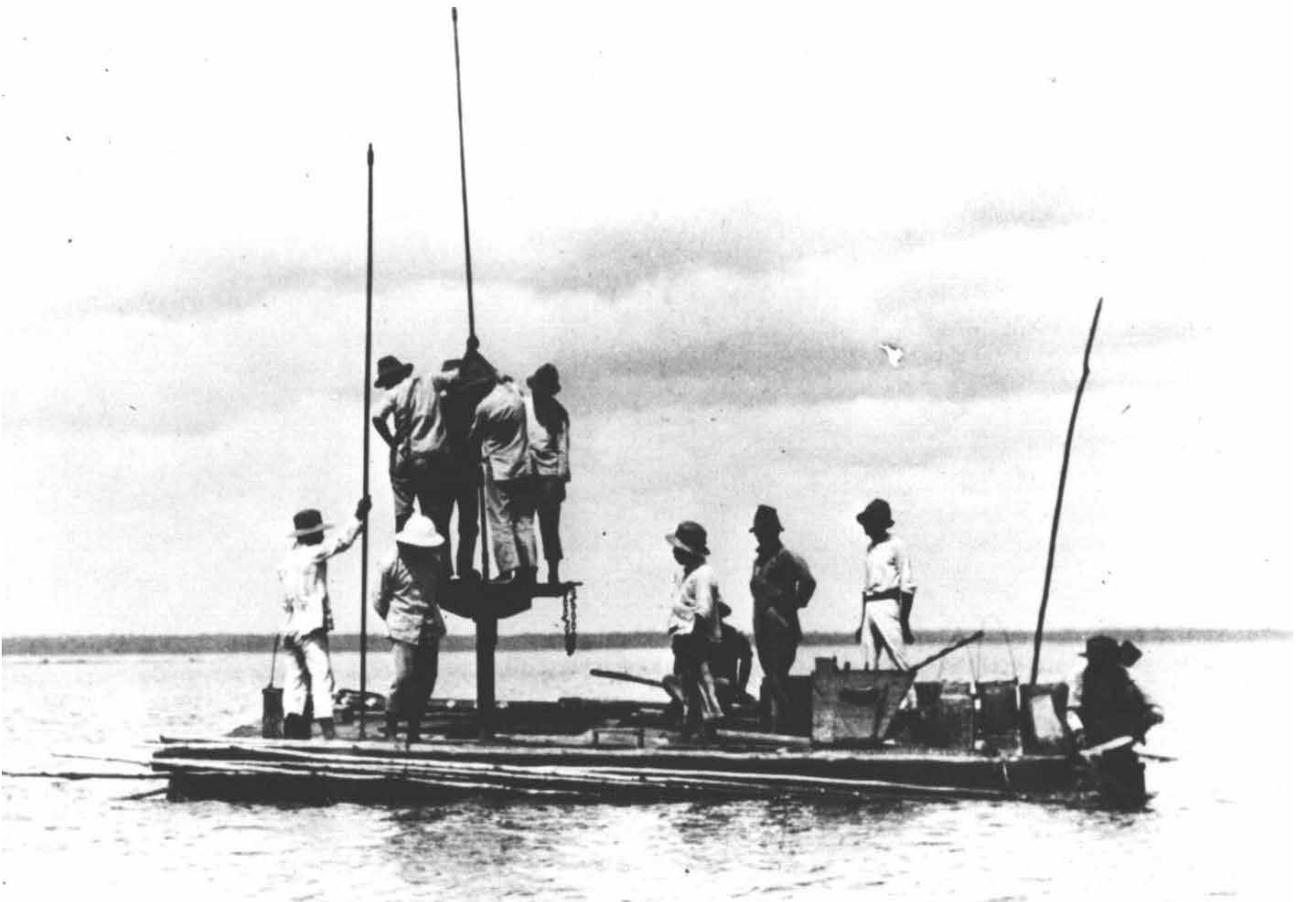
Pada abad ke-19, Pemerintah Belanda melakukan eksplorasi biji timah secara besar-besaran di Pulau Belitung. Hal ini dilakukan karena terjadi peningkatan permintaan dari negara-negara di Eropa dan Amerika seiring dengan munculnya industri plat timah.

Pada tahun 1860, pengelolaan timah yang ada di Pulau Belitung dialihkan kepada perusahaan swasta milik Pemerintah Belanda, yaitu *Billiton Maatschappij* (Perusahaan *Billiton*) dan pada tahun 1923 *Billiton Maatschappij* berubah menjadi *Gemeenschappelijke Billiton* atau *GMB*. *GMB* sendiri beroperasi sampai tahun 1957.

Untuk memenuhi permintaan dari pasar dunia yang terus meningkat, maka Pemerintah Belanda mendatangkan tenaga kerja yang sudah terampil dari Cina. Aktivitas penambangan sumber daya timah di Pulau Belitung berdampak pada perubahan tidak hanya pada kehidupan sosial-budaya, tetapi juga perubahan morfologi atau bentuk fisik Pulau Belitung. Perubahan bentuk fisik Pulau Belitung didasarkan pada fungsinya sebagai daerah industri pertambangan timah. Maka dapat dipastikan bahwa prioritas infrastruktur yang dibangun berkaitan erat dengan prasarana dan sarana pertambangan timah. Suatu bangunan yang diciptakan semuanya dilakukan dalam rangka untuk menunjang kegiatan penambangan timah di Pulau Belitung. Infrastruktur setidaknya dapat dilihat antara lain pada jaringan jalan, fasilitas pelabuhan, fasilitas kesehatan dan lain-lain.



Peraturan Pemerintah No 13/1958 tentang Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no 1553) Sumber: ANRI, PT Timah 207

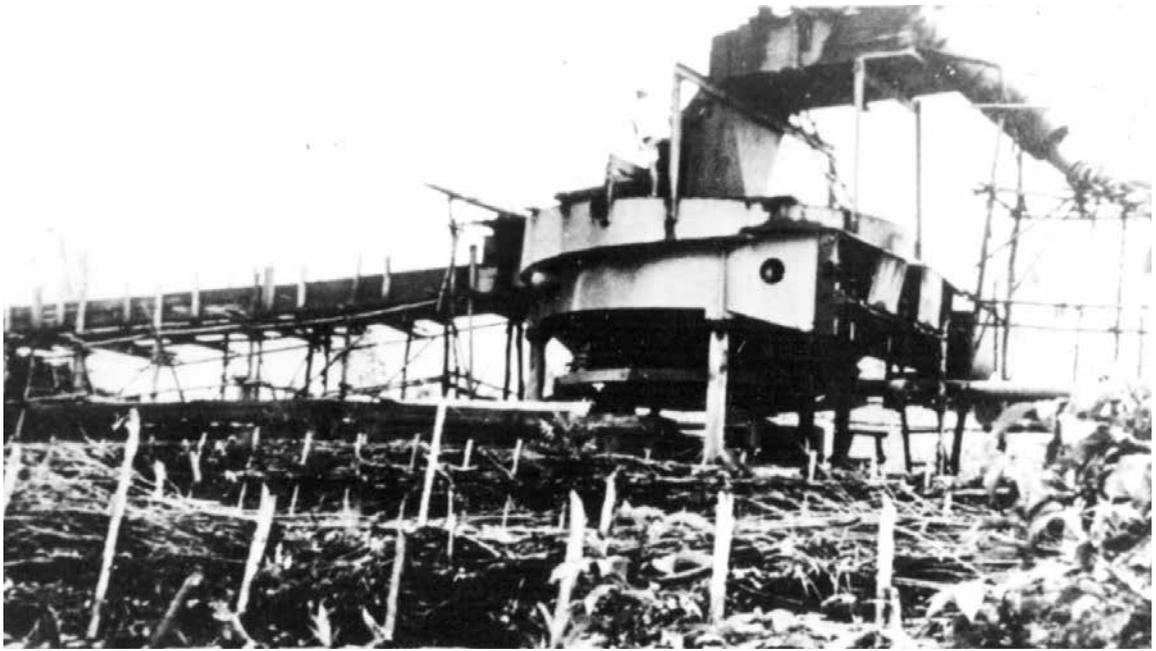


Grond onderzoeken en zeehozen/pengeboran di laut pada pertambangan timah di Tanjungpandan, Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 496-54

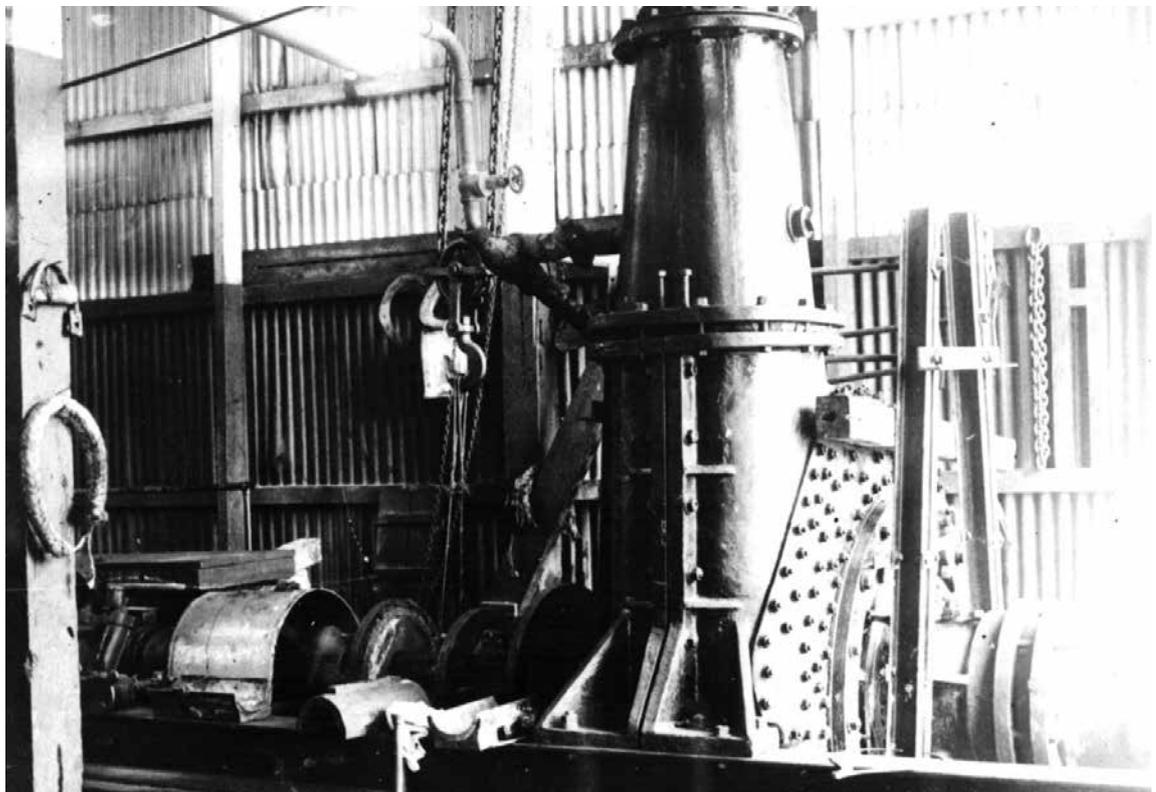


Area galian lumpur tambang timah
Belitung, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 500-30



Alat tambang timah Hockhorat Jig, Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 501-62



Alat pompa hangger buatan Australia di pertambangan timah, Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 500-24



Pekerja tambang timah di parit pada awal penggarapan, Tanjungpandan, Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 501-38



Kuli-kuli tambang timah pada awal penggarapan, Tanjungpandan, Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 501-40





Pasar Ikan Tanjungpandan sekitar tahun 1970. Kala itu pasar ikan yang terletak di tepi laut masih berupa bangunan kayu yang berdiri di atas air.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



Tugu Peringatan 75 Tahun Penemuan Timah (1851-1926). Saat diresmikan pada tanggal 28 Juni 1926, tugu ini berada di depan Kantor Pusat GMB, kemudian dipindahkan ke halaman Museum Tanjungpandan. Prasasti pada tugu batu granit ini tertera tulisan : Unuk mengenang 28 Juni 1851 dan untuk menghormati para perintis Billiton John Francois Loudon, Vincent G. Baron van Tuyll van Serooskerken, Johannes F. den Dekker, Cornelis de Groot, O.F.U.J. Huguenin. Yang bersama-sama dengan Pangeran Belanda Z.K.H. Willem Frederik Hendrik mendirikan pertambangan timah di Billiton. Tandjongpandan, 28 Juni 1926.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung



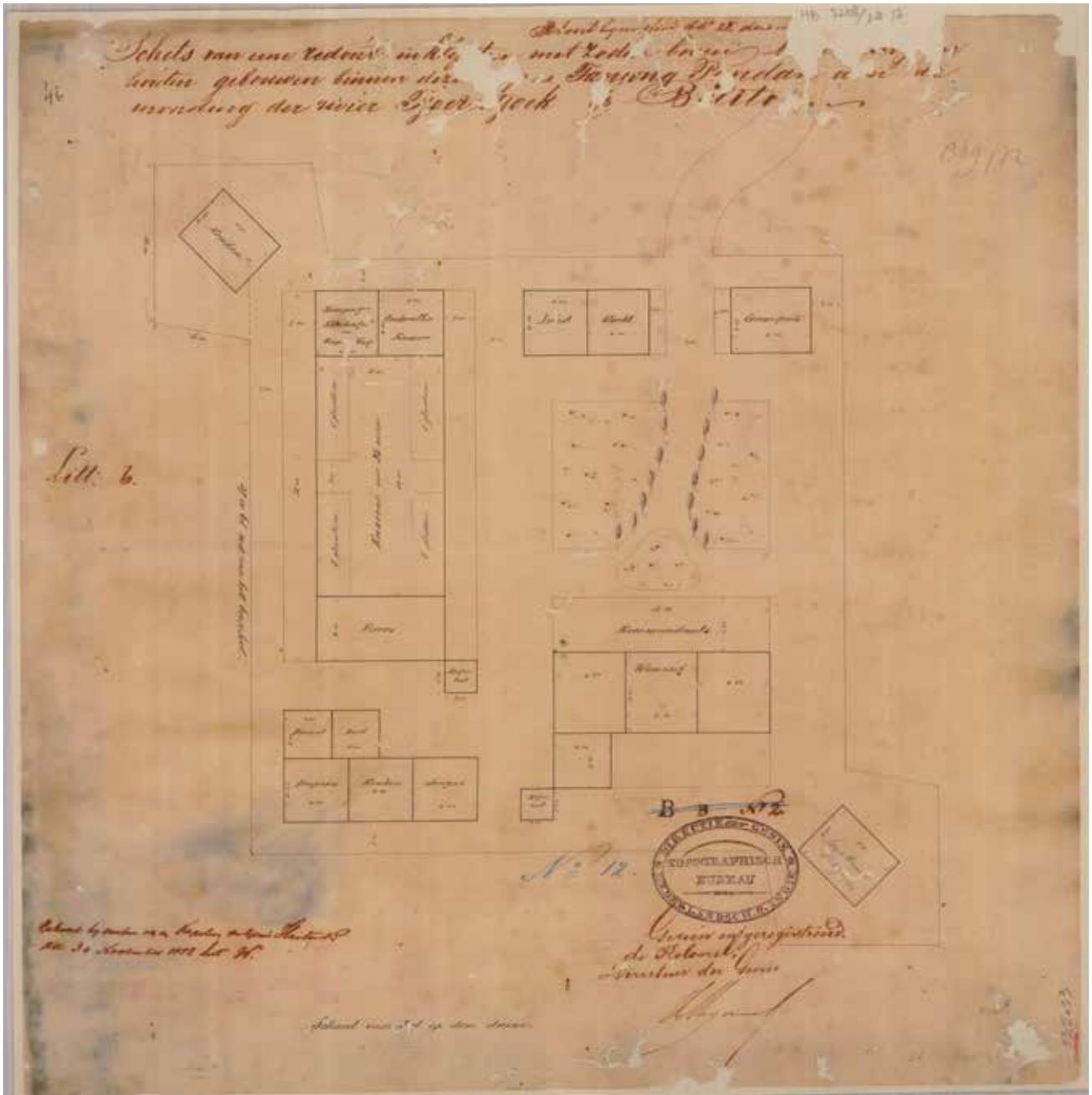
Tugu Peringatan Nasionalisasi GMB menjadi PN Tambang Timah Belitung, dimana terdapat prasasti bertulisan: Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Memberikan kekuatan pada kita Untuk melaksanakan cita-cita Negara Republik Indonesia. Ir. M.E.A Apitule. Tandjungpandan, 1 Maret 1958. Pada saat itu Ir. M.E.A. Apitule menjadi wakil Indonesia dan kemudian diangkat sebagai Presiden Direktur PN Tambang Timah Belitung.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung

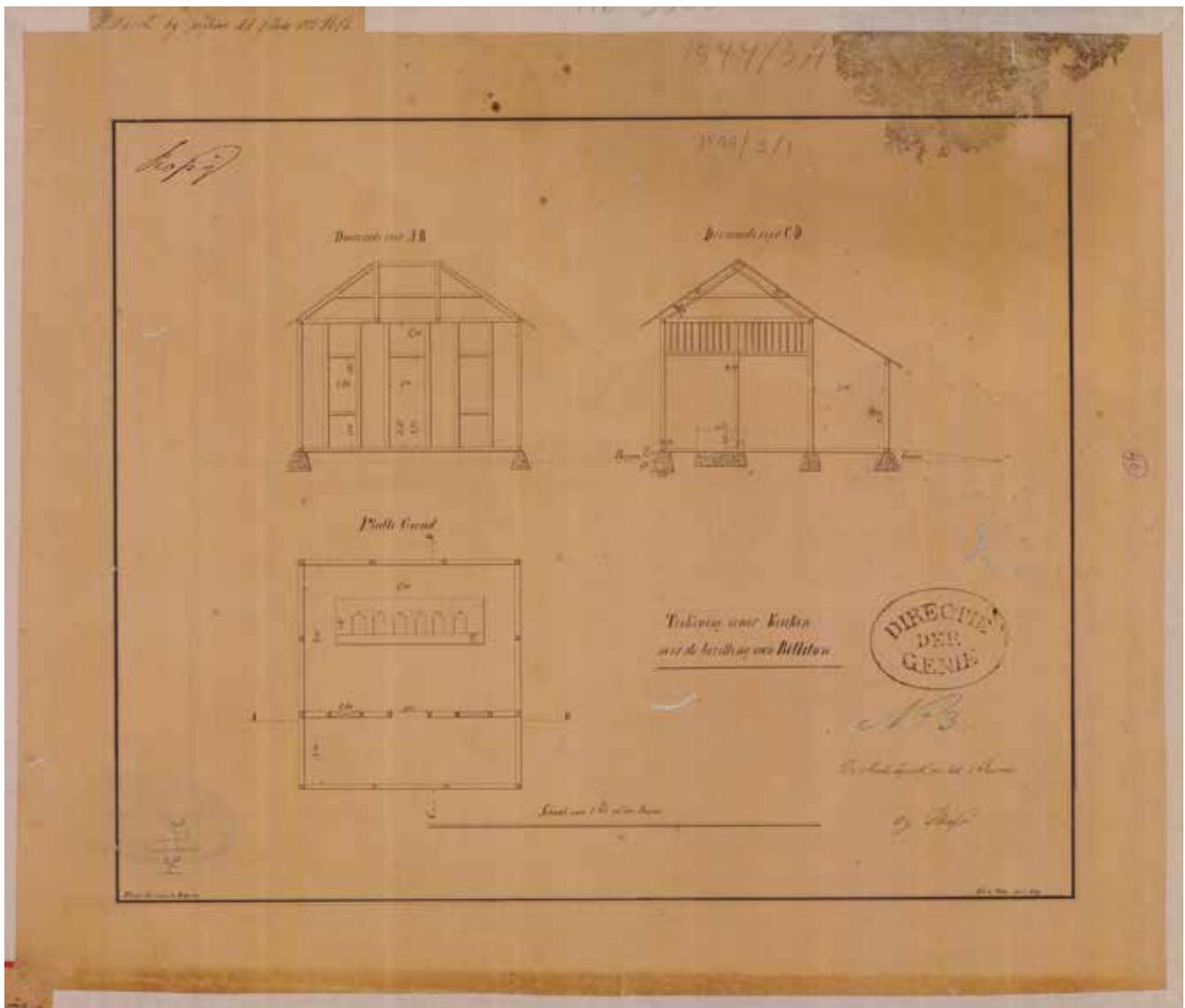
Infrastruktur



Dalam menunjang aktivitas pertambangan timah di Belitung, Pemerintah Belanda membangun kantor-kantor pemerintahan dan juga rumah dinas untuk pejabatnya, yang seiring perkembangan waktu, kini telah beralih fungsi.

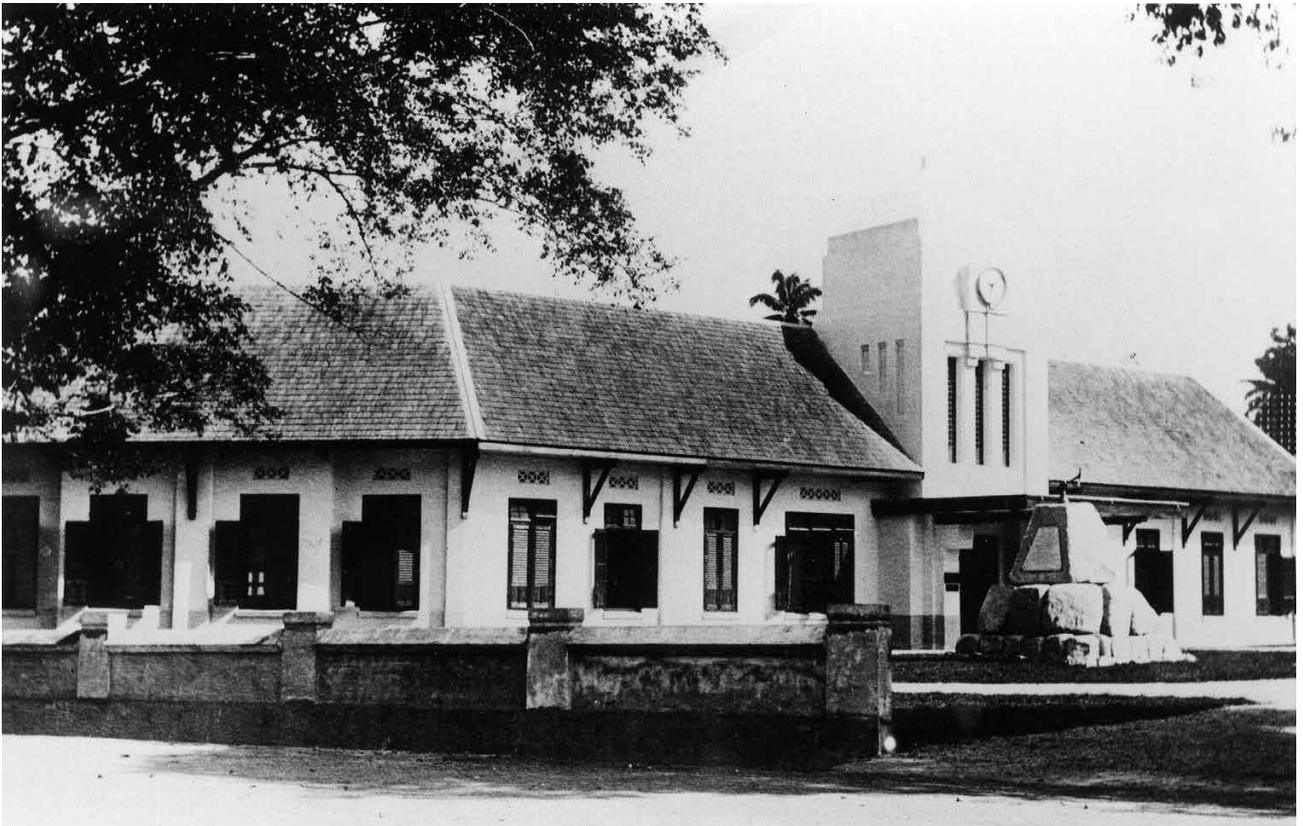


Gambar denah Denah kompleks tempat tinggal komandan dan bangunan lainnya di Tandjong Pandan dekat muara sungai Tjoertjoek.
 Sumber: ANRI, HB.3208 (No.12)



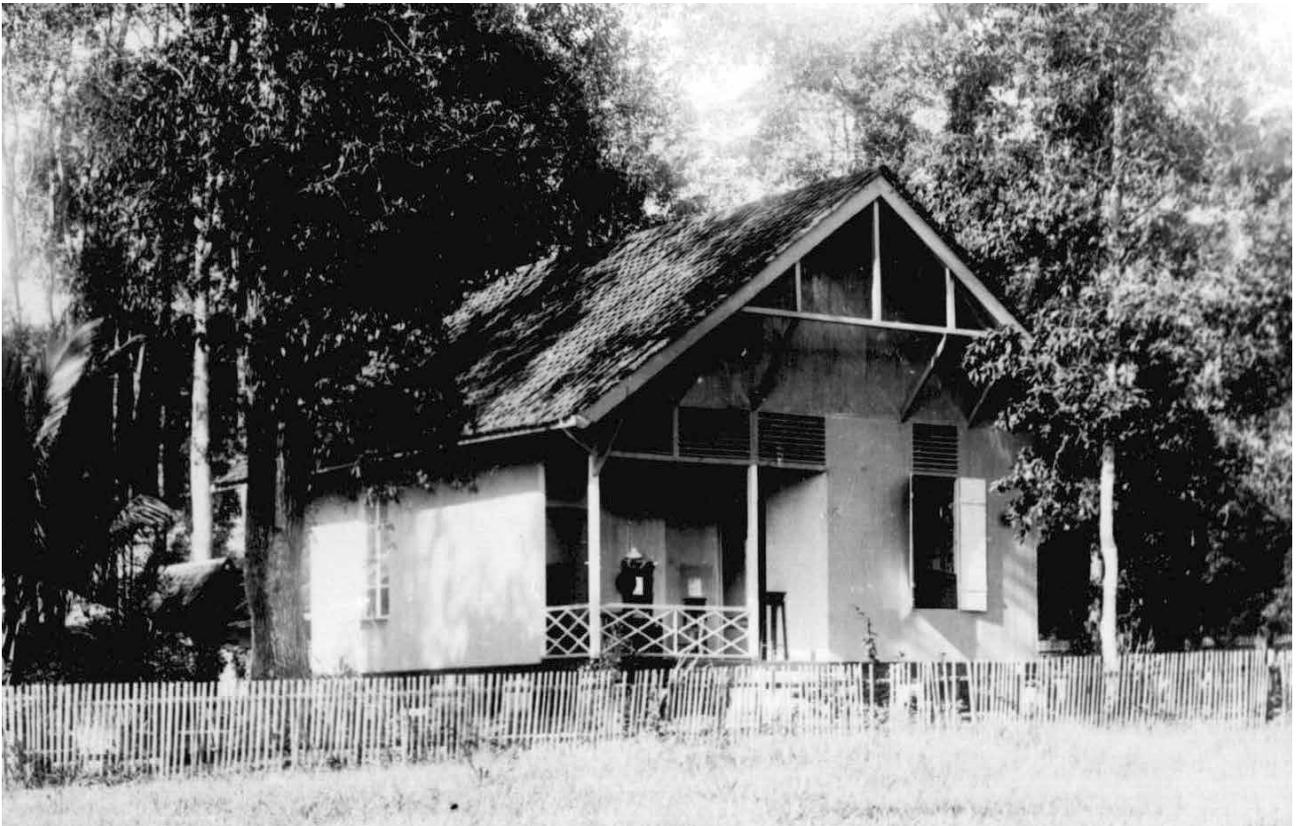
Gambar mengenai denah dapur untuk kepemilikan residensi Biliton (3 gambar, doorsnede, plattegrond), 19 Agustus 1902.

Sumber: ANRI, HB.3906



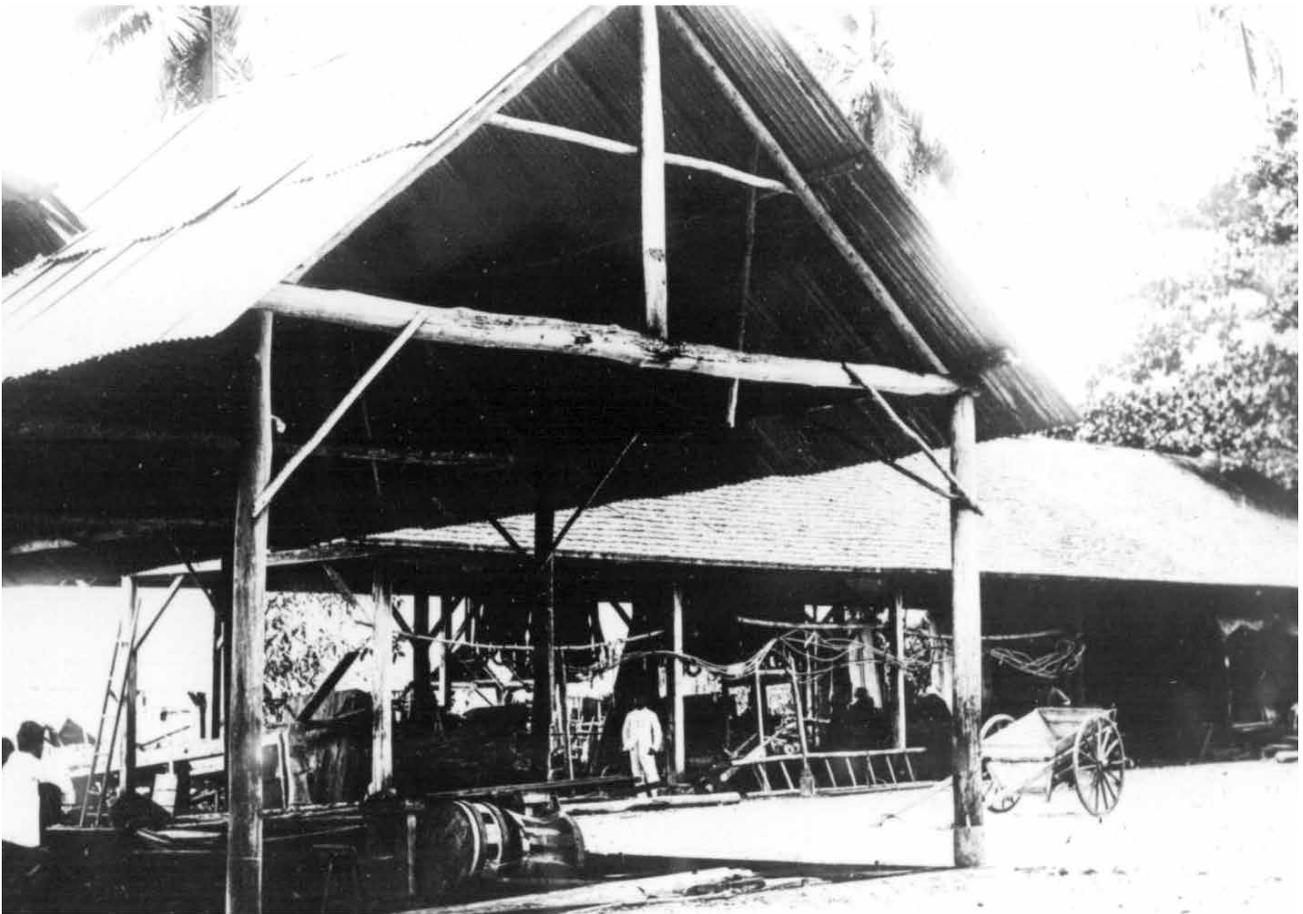
Kantor Kepala di pertambangan timah
Tanjungpandan, Pulau Belitung,
Sumatera Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT No.494/42

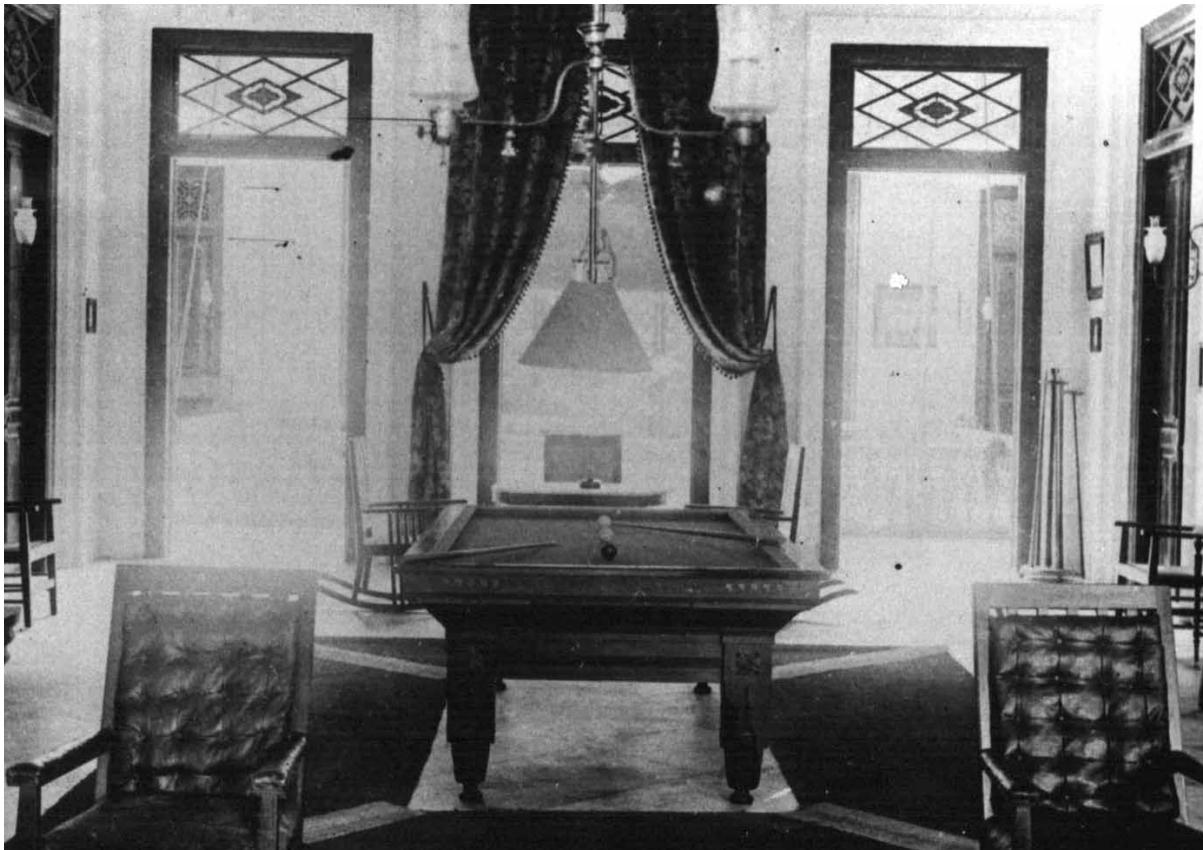


Rumah pegawai tambang timah
Tanjungpandan, Pulau Belitung,
Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 491-40



Tempat perbaikan dan pembuatan kapal
di pertambangan timah Tanjungpandan,
Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 493-34



Interior tempat perkumpulan di tambang timah di Tanjungpandan, Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 491-4



Interior ruang tamu rumah insinyur tambang timah di Tanjung Pandan, Belitung, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 687-80



Kantor Jawatan Penerangan di
Tanjungpandan, Belitung, April 1957.
Sumber: ANRI, Kempen (1) April 57007



Kantor Geo Wehry & C.O
di Tanjungpandan, 1958.

Sumber: ANRI, KEMPEN SUMSEL No. 130



Foto-foto mengenai pembangunan Hari Veteran ke III,
Tahun 1959/1960

Sumber: ANRI, KEMPEN SUMSEL 1950-1967 (3217-3218)



Kantor pusat NV. Gemeenschappelijk Mijnbouw Billiton (GMB), kemudian menjadi PN Tambang Timah Belitung, pada tahun 1960-an. Di depannya terdapat Standplaats, yaitu pangkalan mobil-mobil yang menghubungkan ibukota dengan distrik-distrik di Pulau Belitung.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung

Transportasi



Transportasi di Kabupaten Belitung terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat dan laut telah lama digunakan oleh masyarakat Belitung sejak dahulu. Bahkan, transportasi laut digunakan pula dalam kegiatan perekonomian masyarakat Belitung masa lampau sebagai transportasi pengangkut timah.

Ontvangen bij de Afdeling *11.*
" " den Redacteur

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris
Afgedaan door hem

Afgedaan door idem *van Kersen 2.*

Geresumeerd door

Ag. 29/10/14

(Afd. III / D.)

Haatsblad
Comand
Wink
Wink m/c
Billiton

BESLUIT.

AFSCHRIFT VAN HET BESLUIT No. 2298/14

23
No. *23*

R.A.

Bunderang, den 4 November 1914

GEARRESTEERD.

4/4

[Gelezen de missive van den Commandant der Zeemacht en Chef van het Departement der Marine in Nederlandsch-Indië van 20 September 1914 No. 9329]

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord; [advies van 30 October 1914 No. 5111]

Is goedgevonden en verstaan:]

In overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indië vast te stellen de volgende ordonnantie en te gelasten, dat zij zal worden afgekondigd door plaatsing in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië op deze wijze:

Zie bijgevoegd Staatsblad No. *701*

[Afschrift:

Raad van Nederlandsch-Indië tot informatie,

Extract:

Commandant der Zeemacht,
Assistent Resident Billiton,
tot informatie en bericht.]

199

17/11

100 spijder

Konsep Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 4 November 1914 tentang batas wilayah aman untuk berlabuh kapal di Tanjungpandan
Sumber: ANRI, Besluit 4 November 1914 No. 23



Alat transportasi yang modern pada
areal tambang timah di Pulau Belitung,
Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 501-34



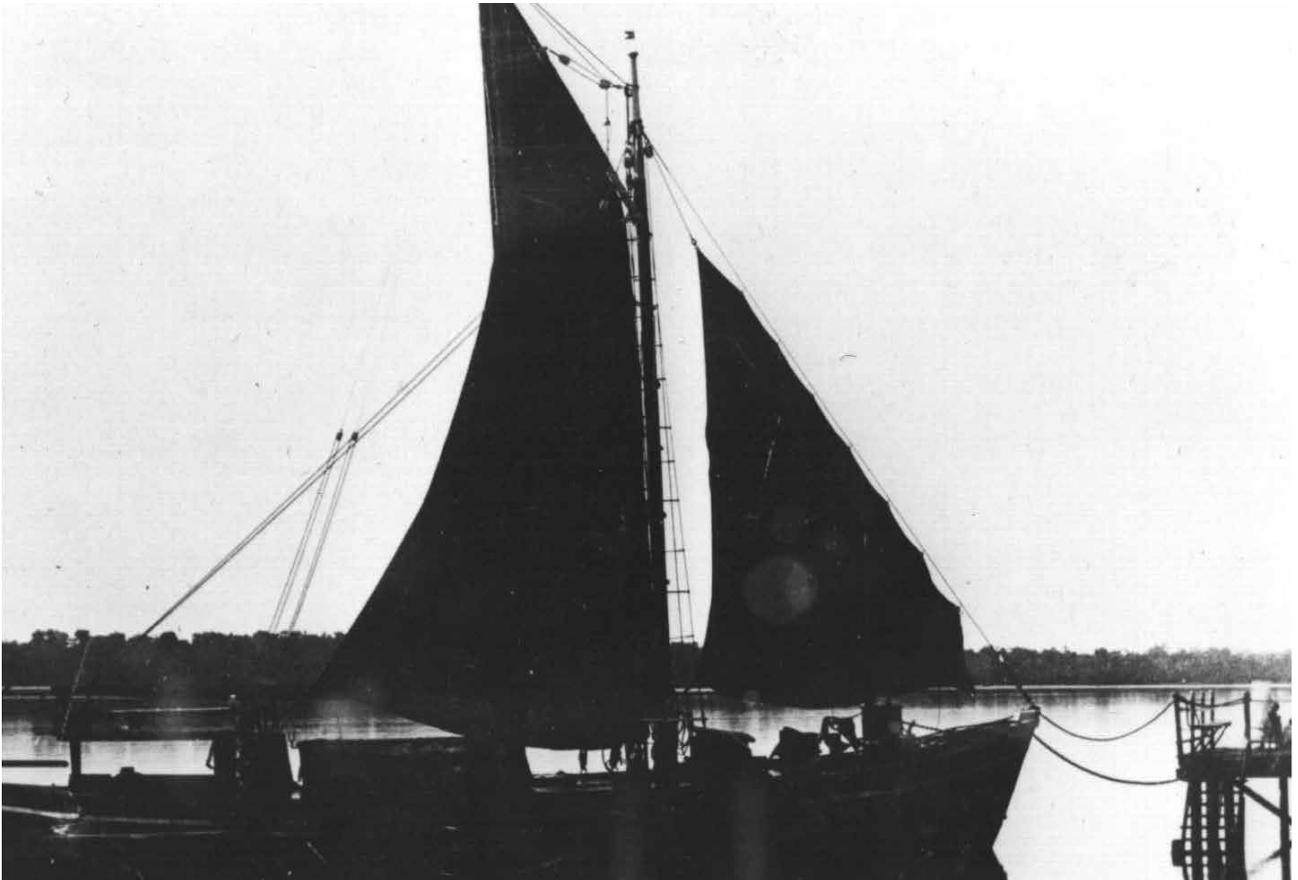
Pelabuhan kapal di pertambangan timah, Tanjungpandan,
Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 493-32



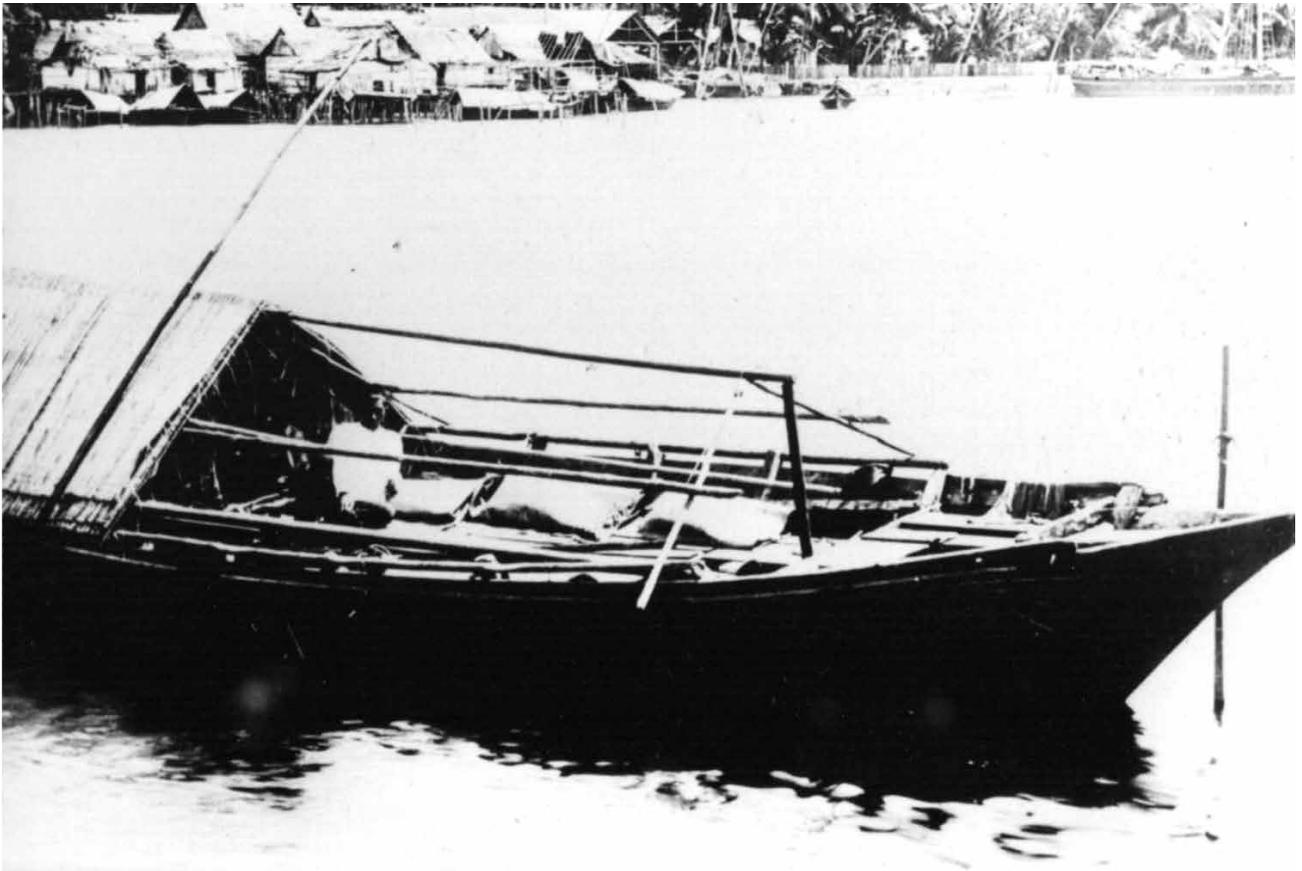
Perahu-perahu layar di Dermaga Pelabuhan Tanjungpandan, kompleks Pertambangan Timah, Biliton, sebagai sarana pengangkutan hasil pertambangan dari Biliton ke daerah lainnya, [1930].

Sumber: ANRI, KIT No. 493/080



Kapal bot kecil "Tjoenia" yang memakai layar milik perusahaan tambang timah di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 493-46

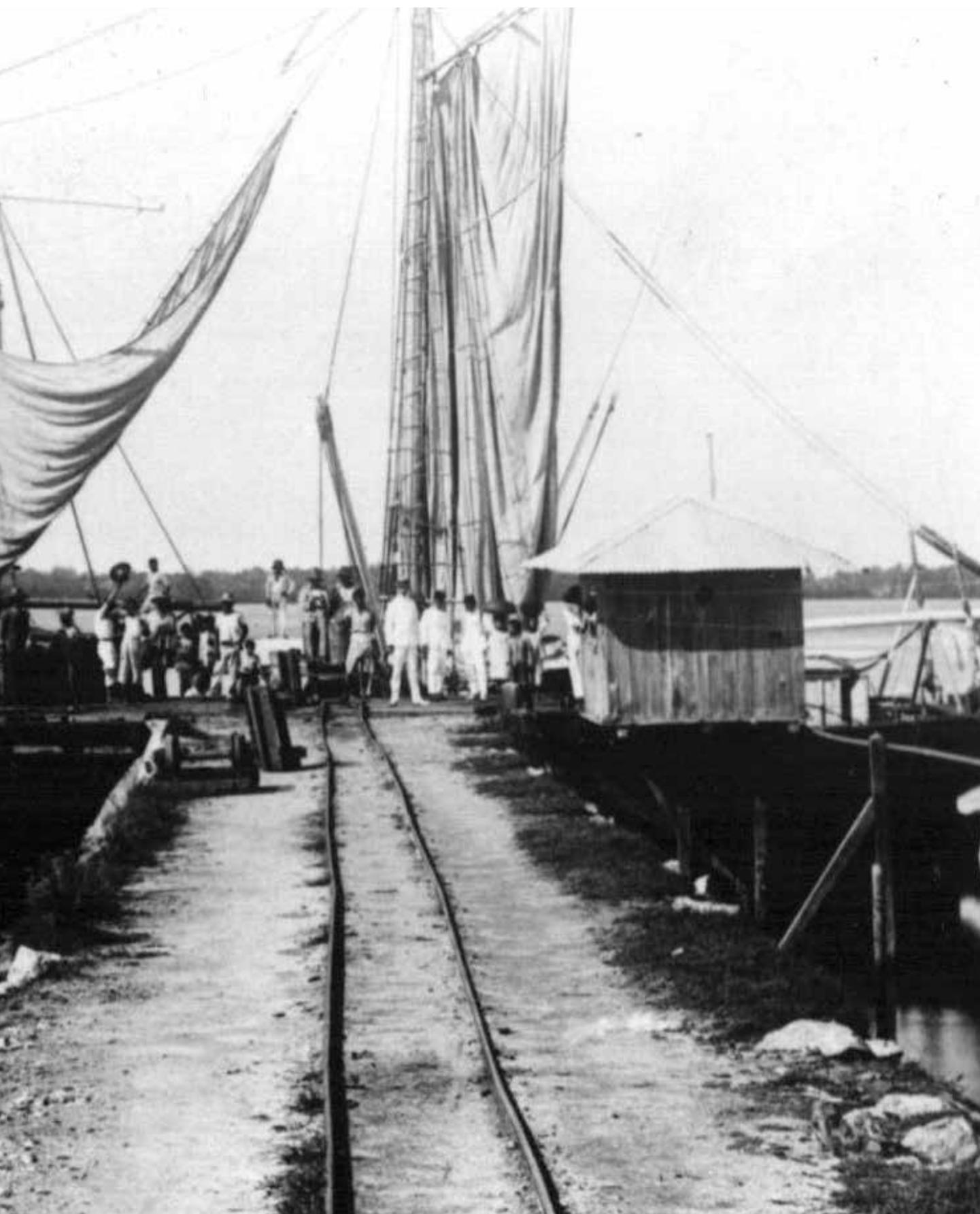


Perahu "Sekah" pengangkut timah di Tanjung Pandan,
Pulau Belitung, Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 493-48



Perahu-perahu layar di Belitung,
Tanjungpandan, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 528-40





*De Bilitonesche piekker voor personen
vervoer, (sejenis gerobak pedati),
Belitung, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : KIT Sumsel Riau Jambi No 1118-52*

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Husnial Husin. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka Belitung. Jakarta: PT Karya Unipress, 1983.
- Adjin, Abdul Hadi, Salim YAH dan Rosihan BA. Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924-1950. Pemkab Belitung, 1992.
- Akkringa, J.E. "Verslag van een Onderzoek Naar Tinertsaders op het Eiland Billiton door wijlen den mijnningenieur J.E. Akkringa Met Drie Kaarten een Plaatje". Jaarboek Van Het Mijn Wezen In Nederlandsch Oost-Indie Uitgegeven Op Last Van Zijne Excellentie Den Minister Van Kolonien. Tweede Jaargang. Amsterdam: C.F.Stemler. 1874.
- Cortesaio, Armando. The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues / editor by Armando Cortesau. London: The Hakluyt Society, 1944.
- Departemen Penerangan. Propinsi Sumatera Selatan. Indonesia: Kementerian Penerangan, 1953.
- Eti, Nunung Yuli. Selayang Pandang Kepulauan Bangka Belitung. Indonesia: Intan Pariwara, 2011.
- Gedenkboek Billiton 1852-1927. 1 vols. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1927.
- _____. 2 vols. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1927.
- Groot, Cornelis de. Herinneringen aan Blitong: historisch, lithologisch, mineralogisch, geographisch, geologisch en mijnbouwkundig. Den Haag: H. L. Smits, 1887.
- Guy, John. "Late Tang Ceramics and Asia's International Trade". The Belitung Wreck: Sunken Treasures from Tang China. Seabed Explorations New Zealand Ltd. 2004.
- Hil, A.K. Hikayat Raja-Raja Pasai. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, June, 1960, Vol. 33, No. 2 (190), Hikayat Raja-Raja Pasai (June, 1960). Singapura: MBRAS.1961.
- Jaya, Firman. Sejarah Politik Pulau Belitung. Tan Kinira, 2020. Kanpo, 1942.
- Kurniawan, Wahyu. Kulek Terakhir Sebuah Pengantar Sejarah Suku Sawang Gantong. Manggar: LPMP Air Mata Air, 2016.
- _____. Kerajaan Balok. Manggar: Dinas Perpustakaan Belitung Timur, 2017.
- Loudon, John Francis. De Eerste Jaren Der Billiton-Onderneming. Amsterdam: J.H.de Bussy, 1883.
- Melalatoa, M Junus. Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1995.

Osberger, R. Geologi P.Belitung, terj L.Kartadipoetra Bandung: Perpustakaan Direktorat Geologi Bandung, B 62-2.

_____. Sedjarah Ringkas Pulau Belitung, terj D.S. Kamil. Tanjungpandan: Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung, 1 Maret 1962.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan. Palembang: Pemerintah Daerah TK I Sumsel, 1995.

Ramli, Muhammad. Lacak Jejak Budaya Bahari Belitung. Indonesia: Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2012

Ramusio, Giovanni Baptista. Di Moltu Lvoghi Corretta, Et Ampliata, Nella Qvale Si Contengono La Descrittione Dell'Africa, & del paese del Prete Ianni, con varij viaggi ... et la Nauigatione attorno il Mondo. Venesia: Giunti.1554.

Regerings Almanak voor Nederlandsch-Indie 1854, 1856, 1868, 1870, 1876-1879, 1890-1920.

Stapel, Frederik Willem. Aanvullende gegevens omtrent de geschiedenis van het eiland Billiton en het voorkomen van tin aldaar. Den Haag: NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton, 1938.

Sudjitno, Sutedjo. Sejarah Timah Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

YAH, Salim. Buku Koleksi Museum Pemerintah Kabupaten Belitung. Tanjungpandan: UPT Museum, 2019.

Staatsblad 1852, 1920, 1924, 1933, 1934, 1938, 1939, 1946, 1947, 1948.

Website:

<https://belitungkab.bps.go.id/>

<https://data.belitung.go.id/>

<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ramusio1554bd1/0007/image/info>

<https://dispar.belitung.go.id/>

<https://en.unesco.org/silkroad/silk-road-themes/underwater-heritage/belitung-shipwreck>

<https://portal.belitung.go.id/>

<http://www.epress.nus.edu.sg/mssl/place/ma-ye-weng>

<https://www.iseas.edu.sg/centres/nalanda-sriwijaya-centre/research-tools/compilations/the-belitung-wreck-sunken-treasures-from-tang-china/>

<https://www.petabelitung.com/>

<https://www.southchinasea.org/2011/08/19/indies-petrus-plancius-1594-j-fisscher-1617-suarez-1999/>

PENUTUP

Program citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah diberbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan mampu menjadi salah satu dinas atau instansi yang dapat mewujudkan “*clean government*” dipemerintahan daerah maupun pusat dengan melakukan penyelamatan arsip yang bernilai pertanggungjawaban historis dan hukum.

Arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang terpercaya dalam sejarah perjalanan bangsa sesungguhnya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam pengambilan kebijakan pada masa kini. Dan juga kita dapat belajar dari sejarah masa lalu untuk kemajuan dimasa kini dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks. Citra Kabupaten Belitung ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat dengan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah akademisi, dewan, dan masyarakat umum.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Dan akhirnya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id